

Muhammad Ryan Fahlevi, S.E., M.M.

— B U K U A J A R —

PEREKONOMIAN DI INDONESIA



BUKU AJAR “PEREKONOMIAN DI INDONESIA”

Penulis : Muhammad Ryan Fahlevi, S.E., M.M

ISBN : ~

Copyright © Oktober 2022

Ukuran: 15,5 cm x 23 cm; Hal: viii + 184

Isi merupakan tanggung jawab penulis.

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Desainer sampul : Fahrul Andriansyah

Penata isi : Muhammad Faiz

Cetakan 1, Oktober 2022

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

CV. Literasi Nusantara Abadi

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11

Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: penerbitlitnus@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah berkenan memberi petunjuk dan kekuatan kepada kami sehingga Buku Ajar pada mata kuliah *PEREKONOMIAN DI INDONESIA* ini dapat diselesaikan.

Buku Ajar ini disusun berdasarkan sumber atau referensi yang ada, dan bertujuan agar dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita dalam membuat Buku Ajar ini. Mudah-mudahan dengan mempelajari Buku Ajar ini kita akan mampu menghadapi masalah-masalah atau kesulitan-kesulitan yang timbul.

Metro 29 november 2019

Muhammad Ryan Fahlevi, S.E., M.M.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR — iii

DAFTAR ISI — v

BAB I

SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA — 1

SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA — 1

BAB II

KARAKTERISTIK PEREKONOMIAN INDONESIA — 35

Masalah Yang Menyertai Pembangunan Ekonomi — 35

Karakteristik Ekonomi Indonesia — 38

Strategi Pembangunan Indonesia — 45

Peran Dan Kebijakan Pemerintah — 50

Dampak Positif Dan Negatif Kebijakan — 55

BAB III

SISTEM EKONOMI INDONESIA — 61

Konsep Sistem Ekonomi — 61

Sistem ekonomi demokrasi — 69

System ekonomi kerakyatan — 70

Pendekatan Melalui Sistem Ekonomi — 73

BAB IV

SEKTOR MONETER, PERBANKAN, PEMBIAYAAN — 77

Sektor ekonomi di indonesia — 77

PERKEMBANGAN TRANSPORTASI — 84

Proses Terbentuknya Barang Tambang — 86

Ekspor Hasil Pertambangan — 87

Pertambangan dan Penggalian Lainnya — 97

Peran Sektor Moneter — 101

Perkembangan Uang Primer dan Uang Yang Beredar — 102

Peran Sektor Perbankan — 104

Peran Pasar Modal dalam Perekonomian Indonesia — 106

BAB V

PEREKONOMIAN DI INDONESIA ERA GLOBALISASI — 111

KEBIJAKAN EKSPOR DAN IMPOR — 111

GLOBALISASI EKONOMI DAN PEREKONOMIAN
INDONESIA — 114

MASYARAKAT EKONOMI EROPA DAN ASIA — 137

KAWASAN BEBAS PERDAGANGAN ASEAN — 147

DAMPAK EEC, NAFTA DAN AFTA — 155

ASIA PACIFIC ECONOMIC COORPERATION (APEC) — 156

KEBIJAKAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI
(INTERNASIONAL) — 169

DAFTAR PUSTAKA — 183



BAB 1

SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA

SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA

Perekonomian Pada Masa Orde Lama

Sejak berdirinya negara republik Indonesia, sudah banyak tokoh-tokoh negara yang saat itu telah merumuskan bentuk perekonomian yang tepat bagi bangsa Indonesia, baik secara individu maupun diskusi kelompok. tetapi pada pemerintah orde lama masih belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi negara republik Indonesia yang memburuk, keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :

1. Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendal Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang de javesche Bank, mata uang pemerintah hindia Belanda, dan mata uang pendudukan jepang.

2. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan november 1445 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.
3. Kas negara kosong.
4. eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :

1. Program Pinjaman nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan juli 1946.
2. upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mengadakan kontak dengan perusahaan swasta amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan malaysia.
3. konverensi ekonomi february 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
4. Pembentukan Planning Board (Badan Perancang ekonomi) 19 januari 1947.
5. rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan Perang (Rera) 1948.

Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (mengikuti mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).

1. Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :

- a. Gunting Syari'uddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) pada tanggal 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
 - b. Program Benteng (kabinet Natsir).
 - c. Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no 24 tahun 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
 - d. Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo.
 - e. Pembatalan sepihak atas hasil-hasil Konferensi Meja Bundar, termasuk pembubaran Uni Indonesia Belanda.
2. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1957)

Sebagai akibat dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik, dan ekonomi. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia.

Perekonomian Indonesia Pada Masa Orde Baru

Inflasi pada tahun 1966 mencapai 650% dan defisit APBN lebih besar dari pada seluruh jumlah penerimaannya. Neraca pembayaran dengan luar negeri mengalami defisit yang besar, nilai tukar rupiah tidak stabil, (Gilarso, 1986:221) merupakan gambaran singkat betapa hancurnya perekonomian kala itu yang harus dibangun lagi oleh masa orde baru atau juga bisa dikatakan sebagai titik balik.

Awal masa orde baru menerima beban berat dari buruknya perekonomian orde lama. Tahun 1966-1968 merupakan tahun untuk rehabilitasi ekonomi. Pemerintah orde baru berusaha keras untuk menurunkan inflasi dan menstabilkan harga. Dengan dikendalikannya

inflasi, stabilitas politik tercapai yang berpengaruh terhadap bantuan luar negeri yang mulai terjamin dengan adanya IGGI. Maka sejak tahun 1969, Indonesia dapat memulai membentuk rancangan pembangunan yang disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). Repelita dilaksanakan mulai tanggal 1 April 1969. Pembangunan ekonomi pada masa orde baru diarahkan pada sektor pertanian. Hal itu dikarenakan kurang lebih 55% dari produksi nasional berasal dari sektor pertanian dan juga 75% penduduk Indonesia memperoleh penghidupan dari sektor pertanian. Bidang sasaran pembangunan dalam Repelita, antara lain bidang pangan, sandang, perbaikan prasarana, rumah rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Jangka waktu pembangunan orde baru dapat dibedakan atas dua macam, yaitu program pembangunan jangka pendek dan program pembangunan jangka panjang. Program pembangunan jangka pendek sering disebut pelita (pembangunan lima tahun), adapun program pembangunan jangka panjang terdiri atas pembangunan jangka pendek yang saling berkesinambungan. Masa pembangunan jangka panjang direncanakan selama 25 tahun. Modernitas memerlukan sarana, salah satunya dengan pengadaan sarana fisik. Pembangunan yang dilaksanakan di realisasikan dalam sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan dengan bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA).

1. REPELITA I

Pada 1 April 1969 dimulailah pelaksanaan Pelita 1 yaitu pada periode 1969- 1974. Pada pelita 1 ini, orde baru menyelesaikan fase stabilitas dan rehabilitasi sehingga dapat menciptakan keadaan yang stabil. Selama beberapa tahun, sebelum orde baru keadaan ekonomi mengalami kemerosotan. Pada 1955-1960 laju inflasi rata-rata 25% per tahun, dalam periode 1960-1965 harga-harga meningkat dengan laju rata-rata 226% per tahun, dan pada 1966 laju inflasi mencapai puncaknya, yaitu 650% setahun.

Kemerosotan ekonomi tersebut terjadi di segala bidang akibat kepentingan ekonomi dikorbankan demi kepentingan politik. Pada masa orde baru, kemerosotan ekonomi dapat dikendalikan. Pada 1976, laju inflasi dapat ditekan menjadi 120%, atau seperlima dari tahun sebelumnya. Pada 1968, inflasi dapat ditekan lagi menjadi 85%.

Berdasarkan hasil-hasil yang telah dicapai, kemudian dimulailah pelaksanaan repelita 1 pada tahun 1969

2. REPELITA II

Repelita 1 berakhir pada 31 Maret 1974, yang telah meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi pelaksanaan pelita I. MPR hasil pemilu 1971 secara aklamasi memilih dan mengangkat kembali Jendral Soeharto sebagai Presiden RI. Selain itu, MPR hasil pemilu 1971 berhasil pula menyusun GBHN melalui Tap MPR RI No IV/MPRS/1973. Di dalam GBHN 1973 terdapat rumusan pelita II, yaitu :

- a. Tersedianya bahan pangan dan sandang yang cukup dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
- b. Tersedianya bahan-bahan bangunan perumahan terutama bagi kepentingan masyarakat.
- c. Perbaikan dan peningkatan prasarana.
- d. Peningkatan kesejahteraan rakyat secara merata.
- e. Memperluas kesempatan kerja.

Untuk melaksanakan repelita II, Presiden Soeharto kemudian membentuk kabinet Pembangunan II. Program kerja kabinet Pembangunan II, disebut Sapta Krida Kabinet Pembangunan II, yang meliputi :

- a. Meningkatkan stabilitas politik
- b. Meningkatkan stabilitas keamanan.
- c. Melanjutkan pelita 1 dan melaksanakan pelita II.
- d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- e. Melaksanakan pemilihan umum.

3. REPELITA III

Pada 31 Maret 1979, Repelita III mulai dilaksanakan. Titik berat pembangunan pada repelita III adalah pembangunan sektor pertanian menuju swasembada pangan yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Sasaran pokok repelita III diarahkan pada Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan.

Trilogi Pembangunan Mencakup :

- a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju tertujuhnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
- c. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Delapan jalur pemerataan mencakup :

- a. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, dan perumahan bagi rakyat banyak.
- b. Pemerataan kesempatan memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan.
- c. Pemerataan pembagian pendapatan.
- d. Pemerataan memperoleh kesempatan kerja.
- e. Pemerataan memperoleh kesempatan berusaha.
- f. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita.
- g. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
- h. Pemerataan memperoleh keadilan.

Terpilih menjadi presiden RI untuk kedua kalinya MPR hasil pemilu membentuk kabinet pembangunan III. Kabinet ini dilantik secara resmi pada 31 Maret 1978. Program Kerja Kabinet Pembangunan III, disebut Sapta Krida Pembangunan III, yang meliputi :

- a. Menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan pemerataan hasil pembangunan.
- b. Melaksanakan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
- c. Memelihara stabilitas keamanan yang mantap.
- d. Menciptakan aparatur Negara yang bersih dan berwibawa.
- e. Membina persatuan dan kesatuan bangsa yang kukuh dan dilandasi oleh penghayatan dan pengamalan Pancasila.
- f. Melaksanakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, dan rahasia.

- g. Mengembangkan politik luar negeri yang bebas aktif untuk diabdikan kepada kepentingan nasional.

4. REPELITA IV

Repelita III berakhir pada 31 Maret 1989 yang dilanjutkan dengan pelaksanaan Repelita IV yang dimulai 1 April 1989. Untuk ketiga kalinya Jenderal Soeharto terpilih dan diangkat kembali oleh MPR hasil pemilu. Untuk melaksanakan Pelita IV, Presiden Soeharto membentuk Kabinet Pembangunan IV. Titik berat Repelita IV adalah pembangunan sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri, baik untuk mesin-mesin industri ringan maupun industri berat. Sasaran pokok Reelita IV yaitu sebagai berikut :

- a. Bidang politik, yaitu berusaha memasyarakatkan P4 (Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila).
- b. Bidang pendidikan, menekankan pada pemerataan kesempatan belajar dan meningkatkan mutu pendidikan.
- c. Bidang keluarga berencana (KB), menekankan pada pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang dapat menimbulkan masalah nasional.

5. REPELITA V

Repelita IV berakhir pada 31 Maret 1994 yang dilanjutkan oleh pelaksanaan Repelita V yang dimulai 1 April 1994. Repelita V ini merupakan pelita terakhir dari keseluruhan Program Pembangunan Jangka Panjang Pertama (PPJP I). Repelita V merupakan masa tinggal landas untuk memasuki Program Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PPJP II), yang akan dimulai pada repelita VI pada April 1999. Titik berat Repelita V adalah meningkatkan sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan prduksi hasil pertanian lainnya serta sektor industri, khususnya industri yang menghasilkan barang untuk ekspor, industry yang banyak tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, dan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri menuju terwujudnya struktur ekonomi yang seimbang antara industri dengan pertanian, baik dari segi nilai tambah maupun dari segi penyerahan tenaga kerja.

6. REPELITA VI

Repelita V berakhir pada 31 Maret 1999 yang dilanjutkan oleh pelaksanaan Repelita VI yang dimulai pada 1 April 1999. Pada akhir Repelita V diharapkan akan mampu menciptakan landasan yang kukuh untuk mengawali pelaksanaan Repelita VI dan memasuki proses tinggal landas menuju pelaksanaan Program Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PPJP II). Titik berat Repelita VI diarahkan pada pembangunan sektor-sektor ekonomi dengan keterkaitan antara industri dan pertanian serta bidang pembangunan lainnya dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sasaran pembangunan industri dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun VI sebagai bagian dari sasaran bidang ekonomi sesuai amanat GBHN 1993 adalah tertata dan mantapnya industri nasional yang mengarah pada penguatan, pendalaman, peningkatan, perluasan, dan penyebaran industri ke seluruh wilayah Indonesia, dan makin kukuhnya struktur industri dengan peningkatan keterkaitan antara industri hulu, industri antara, dan industri hilir serta antara industri besar, industri menengah, industri kecil, dan industri rakyat. Serta keterkaitan antara sektor industri dengan sektor ekonomi lainnya. Pelita VI yang diharapkan menjadi proses lepas landas Indonesia ke arah yang lebih baik lagi, malah menjadi gagal landas, Indonesia dilanda krisis ekonomi yang sulit diatasi pada akhir tahun 1997. Namun, pelaksanaan PPJP II tidak berjalan lancar akibat krisis ekonomi dan moneter melanda Indonesia. Inflasi yang tinggi akibat krisis ekonomi menyebabkan terjadinya gejolak sosial yang mengarah pada pertentangan terhadap pemerintah orde baru. Kenaikan tarif' BBM pada 1997 merupakan awal gerakan pengkoreksian rakyat dan mahasiswa terhadap pemerintahan orde baru. Sejak saat itu terjadilah gelombang demonstrasi, kerusuhan, penjarahan, dan pembakaran di ibu kota Jakarta yang kemudian menyebar ke seluruh wilayah di tanah air.

Perekonomian Pada Masa Era Reformasi

Pada masa krisis ekonomi, ditandai dengan tumbangannya pemerintahan Orde Baru kemudian disusul dengan era Reformasi yang dimulai oleh pemerintahan Presiden Habibie. Pada masa ini tidak hanya hal

ketatanegaraan yang mengalami perubahan, namun juga kebijakan ekonomi. Sehingga apa yang telah stabil dijalankan selama 51 tahun, terpaksa mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan keadaan.

1. Masa Kepemimpinan BJ. Habibie

Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan berekspresi. Di bidang ekonomi, ia berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dollar masih berkisar antara Rp 10.000 – Rp 15.000. Namun pada akhir pemerintahannya, terutama setelah pertanggung jawabannya ditolak MPR, nilai tukar rupiah meroket naik pada level Rp 6500 per dolar AS nilai yang tidak akan pernah dicapai lagi di era pemerintahan selanjutnya. Selain itu, ia juga memulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurus perekonomian. Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, BJ Habibie melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dan unit Pengelola Aset Negara

- a. Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah
- b. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp. 10.000,00
- c. Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri
- d. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF
- e. Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat
- f. Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pemerintahan presiden B.J. Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik.

2. Masa Kepemimpinan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

Dalam hal ekonomi, dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 1999 kondisi perekonomian Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Laju pertumbuhan PDB mulai positif walaupun tidak jauh dari 0% dan pada tahun 2000 proses pemulihan perekonomian Indonesia jauh lebih baik lagi dengan laju pertumbuhan hampir mencapai 5%. Selain pertumbuhan PDB, laju inflasi dan tingkat suku bunga (SBI) juga rendah yang mencerminkan bahwa kondisi moneter di dalam negeri sudah mulai stabil.

Akan tetapi, ketenangan masyarakat setelah terpilihnya Presiden Indonesia keempat tidak berlangsung lama. Presiden mulai menunjukkan sikap dan mengeluarkan ucapan-ucapan kontroversial yang membingungkan pelaku-pelaku bisnis. Presiden cenderung bersikap diktator dan praktek KKN di lingkungannya semakin intensif, bukannya semakin berkurang yang merupakan salah satu tujuan dari gerakan reformasi. Ini berarti bahwa walaupun namanya pemerintahan reformasi, tetapi tetap tidak berbeda dengan rezim orde baru. Sikap presiden tersebut juga menimbulkan perseteruan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang klimaksnya adalah dikelurkannya peringatan resmi kepada Presiden lewat Memorandum I dan II. Dengan dikelurkannya Memorandum II, Presiden terancam akan diturunkan dari jabatannya jika usulan percepatan Sidang Istimewa MPR jadi dilaksanakan pada bulan Agustus 2001.

Selama pemerintahan reformasi, praktis tidak ada satu pun masalah di dalam negeri yang dapat terselesaikan dengan baik. Berbagai kerusuhan sosial yang bernuansa disintegrasi dan sara terus berlanjut, misalnya pemberontakan Aceh, konflik Maluku, dan pertikaian etnis di Kalimantan Tengah. Belum lagi demonstrasi buruh semakin gencar yang mencerminkan semakin tidak puasnya

mereka terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri, juga pertikaian elite politik semakin besar.

Selain itu, hubungan pemerintah Indonesia dibawah pimpinan Abdurrahman Wahid dengan IMF juga tidak baik, terutama karena masalah amandemen UU No. 23 tahun 1999 mengenai Bank Indonesia; penerapan otonomi daerah, terutama menyangkut kebebasan daerah untuk pinjam uang dari luar negeri; dan revisi APBN 2001 yang terus tertunda pelaksanaannya. Tidak tuntasnya revisi tersebut mengakibatkan IMF menunda pencairan bantuannya kepada pemerintah Indonesia, padahal roda perekonomian nasional saat ini sangat tergantung pada bantuan IMF. Selain itu, Indonesia terancam dinyatakan bangkrut oleh Paris Club (negara-negara donor) karena sudah kelihatan jelas bahwa Indonesia dengan kondisi perekonomiannya yang semakin buruk dan defisit keuangan pemerintah yang terus membengkak, tidak mungkin mampu membayar kembali utangnya yang sebagian besar akan jatuh tempo tahun 2002 mendatang. Bahkan, Bank Dunia juga sempat mengancam akan menghentikan pinjaman baru jika kesepakatan IMF dengan pemerintah Indonesia macet.

Ketidakstabilan politik dan sosial yang tidak semakin surut selama pemerintahan Abdurrahman Wahid menaikkan tingkat country risk Indonesia. Ditambah lagi dengan memburuknya hubungan antara pemerintah Indonesia dan IMF. Hal ini membuat pelaku-pelaku bisnis, termasuk investor asing, menjadi enggan melakukan kegiatan bisnis atau menanamkan modalnya di Indonesia. Akibatnya, kondisi perekonomian nasional pada masa pemerintahan reformasi cenderung lebih buruk daripada saat pemerintahan transisi. Bahkan, lembaga pemeringkat internasional Moody's Investor Service mengkonfirmasi bertambah buruknya country risk Indonesia. Meskipun beberapa indikator ekonomi makro mengalami perbaikan, namun karena kekhawatiran kondisi politik dan sosial, lembaga rating lainnya (seperti Standard & Poors) menurunkan prospek jangka panjang Indonesia dari stabil ke negatif.

Jika kondisi seperti ini terus berlangsung, tidak mustahil tahun 2002 ekonomi Indonesia akan mengalami pertumbuhan jauh lebih

kecil dari tahun sebelumnya, bahkan bisa kembali negatif. Pemerintah tidak menunjukkan keinginan yang sungguh-sungguh (political will) untuk menyelesaikan krisis ekonomi hingga tuntas dengan prinsip once and for all. Pemerintah cenderung menyederhanakan krisis ekonomi dewasa ini dengan menganggap persoalannya hanya terbatas pada agenda masalah amandemen UU Bank Indonesia, desentralisasi fiskal, restrukturisasi utang, dan divestasi BCA dan Bank Niaga. Munculnya berbagai kebijakan pemerintah yang kontroversial dan inkonsistens, termasuk pengenaan bea masuk impor mobil mewah untuk kegiatan KTT G-15 yang hanya 5% (nominalnya 75%) dan pembebasan pajak atas pinjaman luar negeri dan hibah, menunjukkan tidak adanya sense of crisis terhadap kondisi riil perekonomian negara saat ini.

Fenomena makin rumitnya persoalan ekonomi ditunjukkan oleh beberapa indikator ekonomi. Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) antara 30 Maret 2000 hingga 8 Maret 2001 menunjukkan growth trend yang negatif. Dalam perkataan lain, selama periode tersebut IHSG merosot hingga lebih dari 300 poin yang disebabkan oleh lebih besarnya kegiatan penjualan daripada kegiatan pembelian dalam perdagangan saham di dalam negeri. Hal ini mencerminkan semakin tidak percayanya pelaku bisnis dan masyarakat terhadap prospek perekonomian Indonesia, paling tidak untuk periode jangka pendek indikator kedua yang menggambarkan rendahnya kepercayaan pelaku bisnis dan masyarakat terhadap pemerintah reformasi adalah pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Pada awal tahun 2000 kurs rupiah sekitar Rp7.000,- per dolar AS dan pada tanggal 9 Maret 2001 tercatat sebagai hari bersejarah sebagai awal kejatuhan rupiah, menembus level Rp10.000,- per dolar AS. Untuk menahan penurunan lebih lanjut, Bank Indonesia secara agresif terus melakukan intervensi pasar dengan melepas puluhan juta dolar AS per hari melalui bank-bank pemerintah. Namun, pada tanggal 12 Maret 2001, ketika Istana Presiden dikepung para demonstran yang menuntut Presiden Gus Dur mundur, nilai tukar rupiah semakin merosot.

Pada bulan April 2001 nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sempat menyentuh Rp12.000,- per dolar AS. Inilah rekor kurs rupiah terendah sejak Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia.

Lemah dan tidak stabilnya nilai tukar rupiah tersebut sangat berdampak negatif terhadap roda perekonomian nasional yang bisa menghambat usaha pemulihan, bahkan bisa membawa Indonesia ke krisis kedua yang dampaknya terhadap ekonomi, sosial, dan politik akan jauh lebih besar dari pada krisis pertama. Dampak negatif ini terutama karena dua hal. Pertama, perekonomian Indonesia masih sangat tergantung pada impor, baik untuk barang-barang modal dan pembantu, komponen dan bahan baku, maupun barang-barang konsumsi. Kedua, utang luar negeri (ULN) Indonesia dalam nilai dolar AS, baik dari sektor swasta maupun pemerintah, sangat besar.

Indikator-indikator lainnya adalah angka inflasi yang diprediksi dapat menembus dua digit dan cadangan devisa yang pada minggu terakhir Maret 2000 menurun dari 29 milyar dolar AS menjadi 28,875 dolar AS.

Rangkuman keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi perekonomian Indonesia mulai mengarah pada perbaikan, di antaranya pertumbuhan PDB yang mulai positif, laju inflasi dan tingkat suku bunga yang rendah, sehingga kondisi moneter dalam negeri juga sudah mulai stabil.
- b. Hubungan pemerintah dibawah pimpinan Abdurrahman Wahid dengan IMF juga kurang baik, yang dikarenakan masalah, seperti Amandemen UU No.23 tahun 1999 mengenai bank Indonesia, penerapan otonomi daerah (kebebasan daerah untuk pinjam uang dari luar negeri) dan revisi APBN 2001 yang terus tertunda.
- c. Politik dan sosial yang tidak stabil semakin parah yang membuat investor asing menjadi enggan untuk menanamkan modal di Indonesia.

- d. Makin rumitnya persoalan ekonomi ditandai lagi dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang cenderung negatif, bahkan merosot hingga 300 poin, dikarenakan lebih banyaknya kegiatan penjualan daripada kegiatan pembelian dalam perdagangan saham di dalam negeri.

Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.

3. Masa Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri

Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri mengalami masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan seperti pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :

- a. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US\$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
- b. Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.

Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat

banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.

Meski ekonomi Indonesia mengalami banyak perbaikan, seperti nilai mata tukar rupiah yang lebih stabil, namun Indonesia pada masa pemerintahannya tetap tidak menunjukkan perubahan yang berarti dalam bidang-bidang lain.

4. Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono

Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat kebijakan kontroversial yaitu mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.

Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salah satunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah. Selain itu, pada periode ini pemerintah melaksanakan beberapa program baru yang dimaksudkan untuk membantu ekonomi masyarakat kecil diantaranya PNPM Mandiri dan Jamkesmas. Pada prakteknya, program-program ini berjalan sesuai

dengan yang ditargetkan meskipun masih banyak kekurangan disana-sini.

Pada pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sektor riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sektor riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negeri masih kurang kondusif.

Namun, selama masa pemerintahan SBY, perekonomian Indonesia memang berada pada masa keemasannya. Indikator yang cukup menyita perhatian adalah inflasi.

Sejak tahun 2005-2009, inflasi berhasil ditekan pada single digit. Dari 17,11% pada tahun 2005 menjadi 6,96% pada tahun 2009. Tagline strategi pembangunan ekonomi SBY yang berbunyi pro-poor, pro-job, dan pro growth (dan kemudian ditambahkan dengan pro environment) benar-benar diwujudkan dengan turunnya angka kemiskinan dari 36,1 juta pada tahun 2005, menjadi 31,02 juta orang pada 2010. Artinya, hampir sebanyak 6 juta orang telah lepas dari jerat kemiskinan dalam kurun waktu 5 tahun. Ini tentu hanya imbas dari strategi SBY yang pro growth yang mendorong pertumbuhan PDB. Imbas dari pertumbuhan PDB yang berkelanjutan adalah peningkatan konsumsi masyarakat yang memberikan efek pada peningkatan kapasitas produksi di sektor riil yang tentu saja banyak membuka lapangan kerja baru.

Memasuki tahun ke dua masa jabatannya, SBY hadir dengan terobosan pembangunannya berupa master plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3 EI). Melalui langkah MP3EI, percepatan pembangunan ekonomi akan dapat menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan perkapita antara Us\$ 14.250-US\$ 15.500, dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara US\$ 4,0-4,5 triliun.

5. Periode Joko Widodo (2014-sekarang)

Dalam Pemilihan Presiden Indonesia 2014, Joko Widodo (Jokowi) terpilih menjadi Presiden ke-7 Indonesia dan mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Kemenangan Jokowi sebagai Presiden menimbulkan optimisme publik, karena Jokowi dipersepsikan sebagai seorang pemimpin yang reformis dan menjalankan program kerja yang konkrit menyelesaikan masalah di lapangan, seperti yang terlihat dari pengalamannya menjadi walikota Solo dan gubernur DKI Jakarta. Jokowi merupakan tipe pemimpin yang taktis yang menekankan langkah/kerja konkrit dan cepat di lapangan, ketimbang tipe pemimpin strategis yang berfokus kepada 9 visi/gambaran besar. Pemerintahan baru Jokowi, yang dijalankan oleh Kabinet Kerja, sangat diharapkan oleh publik untuk dapat melaksanakan beberapa agenda kebijakan reformasi ekonomi, terutama pada percepatan proyek infrastruktur, pengembangan sektor maritim, dan program jaminan sosial.

Jokowi menghadapi sejumlah tantangan eksternal maupun internal dalam mengusahakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus melambat dalam empat tahun terakhir, dari 6,8% pada tahun 2010 menjadi 5,0%, yang menandakan daya beli masyarakat yang melemah. Selain itu, kondisi eksternal juga kurang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang ditandai dengan perlambatan ekonomi global (terutama resesi di Eropa dan Jepang dan perlambatan pertumbuhan Tiongkok dan India), likuiditas global yang mengering, serta jatuhnya harga komoditas ekspor. Dalam situasi demikian, pendekatan Jokowi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi adalah melalui reformasi ekonomi domestik yang terutama lebih

berfokus pada sisi penawaran (supply-side reforms), antara lain melalui pengembangan infrastruktur dan perbaikan iklim investasi.

Salah satu reformasi radikal yang dilakukan Jokowi terjadi kurang dari sebulan setelah pelantikan, yaitu pemotongan signifikan dari subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebagai usaha untuk mengurangi beban fiskal. Pada tanggal 18 November 2014, pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi (Premium) menjadi Rp 8.500 per liter, dan harga solar bersubsidi menjadi Rp 7.500 per liter. Bahkan, mengambil momentum dari jatuhnya harga minyak dunia, Jokowi melakukan reformasi lebih jauh, dengan menghapus subsidi BBM Premium, memberikan subsidi tetap Rp 1.000 per liter untuk solar, dan mengikuti mekanisme pasar dalam penentuan harga. Langkah reformasi yang berani ini berhasil menciptakan ruang fiskal yang sangat dibutuhkan untuk membiayai sejumlah agenda pembangunan lainnya, terutama pembangunan infrastruktur.

Meskipun langkah tersebut sempat menumbuhkan kepercayaan publik akan komitmen pemerintah untuk melakukan reformasi ekonomi yang serius, namun hal ini tidak berlangsung lama. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 terus melambat, hingga mencapai titik terendah 4,7% pada triwulan II. Banyak hal yang mengakibatkan hal tersebut, tetapi setidaknya dua tren utama yang dapat diamati pada setahun pertama pemerintahan Jokowi adalah. Pertama, belum terdapat perbaikan iklim investasi yang signifikan hingga pertengahan 2015. Pembangunan infrastruktur pun berjalan cukup lambat. Nampaknya terdapat ketidaksinambungan antara pernyataan reformis di tingkat Presiden dan Menteri dengan kenyataan pada tingkat pemerintahan yang lebih rendah serta pemerintah daerah. Hal-hal umum seperti perizinan yang berbelit, memakan waktu dan biaya yang tinggi masih terlihat jelas di berbagai sektor.

Kedua, rezim perdagangan yang menjadi semakin restriktif, terutama melalui penggunaan hambatan non-tarif dalam berbagai bentuk regulasi, baik pada sisi impor maupun ekspor. Sebenarnya, tren proteksionis semacam ini mulai terlihat sejak periode kedua pemerintahan SBY sejak 2009 dan terus berlanjut setidaknya hingga

pertengahan 2015. Marks (2015), misalnya, menemukan bahwa pada sisi impor, jumlah hambatan non-tarif naik dari 6.537 pada tahun 2009 menjadi 12.863 pada 2015. Patunru dan Rahardja (2015) menemukan bahwa proteksionisme ini diciptakan melalui kebijakan seperti hambatan non-tarif (kebanyakan berasal dari peraturan Menteri Perdagangan) dalam berbagai bentuk, mulai dari persyaratan perizinan, inspeksi, kebijakan labeling, serta pengetatan regulasi yang sudah ada, serta melalui kebijakan seperti persyaratan konten lokal dan larangan ekspor (salah satu yang terbesar adalah larangan ekspor mineral). Tren ini baru mengalami titik balik setelah dua perubahan besar pada semester kedua 2015, yaitu ketika Thomas Lembong sebagai Menteri Perdagangan pada Agustus 2015 serta ketika Presiden Jokowi menyatakan ketertarikan untuk bergabung dengan Trans-Pacific Partnership (TPP) pada Oktober 2015.

Sebagai respon dari kondisi demikian, Presiden Jokowi memutuskan untuk kembali melakukan langkah reformasi ekonomi melalui peluncuran Paket Kebijakan Ekonomi pada September 2015. Hingga Juni 2016, telah terdapat 12 Paket Kebijakan Ekonomi (PKE), yang masing-masing berusaha menyelesaikan permasalahan kebijakan yang berbeda-beda. Kebanyakan dari reformasi yang dilakukan melalui paket kebijakan tersebut berusaha untuk menghilangkan hambatan regulasi maupun birokrasi yang menghambat sektor swasta untuk melakukan usahanya secara efisien, serta memberikan insentif investasi bagi pelaku usaha swasta di beberapa sektor tertentu.

Paket kebijakan pertama (yang paling komprehensif dengan cakupan terluas) bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri, mempercepat proyek strategis nasional, serta meningkatkan investasi di sektor properti. Dua langkah penting dalam paket ini adalah deregulasi dan debirokratisasi. Deregulasi dilakukan dengan melakukan tinjauan regulasi yang komprehensif, serta menghilangkan regulasi yang berulang, tidak diperlukan, tumpang tindih, atau yang tidak relevan. Deregulasi juga berusaha untuk meningkatkan koherensi serta konsistensi antar regulasi,

terutama yang terkait dengan sektor ekonomi. Sementara itu, debirokratisasi mencakup simplifikasi, delegasi otoritas, serta elektronisasi dari berbagai prosedur untuk mendapatkan perizinan, dalam rangka memfasilitasi pelaku usaha untuk berinvestasi di Indonesia.

Beberapa pencapaian kunci dalam usaha deregulasi mencakup pendirian Layanan Perizinan Investasi 3 Jam, simplifikasi perizinan kehutanan, pendirian sistem pelayanan terpadu kepelabuhanan secara elektronik, serta sejumlah insentif pajak dan kredit bagi beberapa industri dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Institusi yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan paket kebijakan ekonomi ini adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang juga menyelenggarakan sejumlah pertemuan yang melibatkan beberapa kementerian teknis yang terkait isu kebijakan tertentu.

Melalui 12 paket kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan untuk menghasilkan 203 regulasi (terdiri dari 154 Peraturan Menteri dan 49 Peraturan Presiden) yang menggantikan regulasi yang dianggap bermasalah. Hingga Juni 2016, kurang lebih 98% dari regulasi yang ditargetkan sudah diselesaikan. Beberapa sektor strategis yang dicakup deregulasi meliputi pertanian, infrastruktur, properti, maritim, perikanan, kehutanan, pertambangan, dan logistik. Sementara itu, berdasarkan domain kementerian, tiga kementerian yang paling banyak terlibat 11 dalam deregulasi adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi & UMKM, serta Kementerian Keuangan. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memfasilitasi usaha perdagangan dan mengurangi hambatan regulasi yang tidak perlu, sebagai titik balik dari tren kedua yang dijelaskan di atas.

Meskipun demikian, reformasi ekonomi yang dilakukan melalui peluncuran paket kebijakan ini masih memiliki masalah dalam efektivitas implementasi serta dalam usaha pemantauan dan evaluasi. Terkadang, sebuah paket kebijakan yang baru sudah diumumkan, tanpa evaluasi yang menyeluruh pada paket sebelumnya. Baru pada 31 Mei 2016 pemerintah secara resmi membentuk empat gugus

tugas (task forces) yang bertanggung jawab memantau pelaksanaan paket kebijakan ekonomi. Gugus tugas ini bertanggung jawab untuk memantau dan memastikan bahwa paket kebijakan ekonomi ini betul-betul dilaksanakan dengan baik, hingga ke tingkat daerah, serta memformulasikan langkah aksi untuk mengatasi hambatan spesifik dalam pelaksanaan.

Sebagai kesimpulan, dalam periode ini, pemerintah Jokowi tidak lagi bisa mengandalkan ekspor sebagai sumber pertumbuhan karena ekonomi global yang melambat serta harga komoditas yang masih rendah. Belanja pemerintah pun juga kurang bisa diandalkan, mengingat penerimaan pajak yang sangat rendah dalam beberapa tahun terakhir (tax ratio Indonesia hanya sekitar 10-11% dari PDB). Oleh karena itu, upaya Presiden Jokowi untuk menekankan reformasi ekonomi dari sisi penawaran sebenarnya sudah tepat. Namun demikian, dalam kenyataannya, pelaksanaan reformasi ini masih kurang efektif. Beberapa pernyataan reformis dari Presiden dan sejumlah Menteri bahwa Indonesia terbuka terhadap investasi, masih gagal diterjemahkan dalam kebijakan yang ramah investasi (misalnya kecenderungan proteksionis di atas, serta perubahan konkrit pada iklim investasi di lapangan setidaknya hingga pertengahan 2015). Hal ini mengirimkan sinyal bahwa pemerintah nampak setengah hati dalam menggandeng sektor swasta, termasuk PMA, sebagai lokomotif pembangunan ekonomi yang tengah lesu ini. Oleh karena itu, presiden reformis seperti Jokowi pun masih perlu didukung dengan mekanisme koordinasi dan implementasi kebijakan yang baik, serta dukungan politik yang memadai.

Trilogi Pembangunan

Trilogi Pembangunan adalah wacana pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintahan orde baru di Indonesia dalam sebagai landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial dalam melaksanakan pembangunan negara. Isi Trilogi Pembangunan adalah sebagai berikut.

1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Upaya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya tidak mungkin tercapai atau terwujud tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, sedangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tidak mungkin dapat dicapai apabila tanpa adanya stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Hal ini tercermin bahwa unsur-unsur dalam trilogi pembangunan harus dikembangkan secara selaras, serasi, terpadu, dan saling mengait.

Unsur-Unsur dalam trilogi pembangunan :

1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya berarti bahwa pembangunan itu harus dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah tanah air, serta hasil-hasilnya harus dapat dirasakan oleh seluruh rakyat secara adil dan merata. Apa yang dimaksud adil dan merata ? Adil dan merata mengandung arti bahwa setiap warga negara harus menerima hasil-hasil pembangunan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan bagi yang mampu berperan lebih, harus mendrima hasilnya sesuai dengan darma bhaktinya kepada bangsa dan negara.
2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam trilogi pembangunan mengandung makna bahwa :
 - a. Pertumbuhan ekonomi harus lebih tinggi dari angka laju pertumbuhan penduduk.
 - b. Upaya mengejar pertumbuhan ekonomi harus tetap memperhatikan keadilan dan pemerataan.
 - c. Harus tetap dijaga keselarasan, kererasian, dan keseimbangan dengan bidang-bidang dengan bidang-bidang pembangunan lainnya.
3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pembangunan itu :
 - a. Terdapat kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang aman, tentram dan tertib yang tercipta karena berlakunya aturan yang disepakati bersama.

- b. Dalam kondisi stabilitas nasional terdapat iklim yang mendorong berkembangnya kreativitas masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara.

Di dalam pelaksanaan pembangunan selalu diperhatikan asas pemerataan yang menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan melanjutkan, memperluas, dan memberikan kedalaman pada pelaksanaan delapan jalur pemerataan yang selama ini telah ditempuh pemerintah. Adapun yang dimaksud dengan delapan jalur pemerataan itu adalah :

1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang dan papan (perumahan).
2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan keselamatan.
3. Pemerataan pembagian pendapatan
4. Pemerataan kesempatan kerja.
5. Pemerataan kesempatan berusaha.
6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita.
7. Pemerataan penyebaran pembangunan di wilayah tanah air.
8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Sesungguhnya Pancasila dan UUD 1945 merupakan landasan pembangunan yang ideal. Keduanya telah merumuskan dengan bijaksana konsep demokrasi dalam alam pembangunan sesuai lingkungan sosial dan budaya Indonesia. Dalam rangka menyelenggarakan pembangunan nasional maka sejak awal tahun 2000 telah disepakati secara nasional adanya landasan penyelenggaraan pembangunan nasional yang mencakup sebagai berikut:

1. landasan konstitusional pembangunan adalah UUD 1945. UUD 1945 merupakan arahan yang paling dasar dalam menyusun tujuan pokok pembangunan nasional sebagai suatu visi pembangunan nasional guna dijadikan landasan dalam Keputusan/Ketetapan MPR. Khusus dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan empat pokok tujuan pembangunan nasional mencakup: mencerdaskan

- kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan berperanserta dalam membantu ketertiban dunia dan perdamaian abadi.
2. Landasan idiil pembangunan adalah Pancasila. Pancasila merupakan arahan yang paling dasar guna menjiwai seluruh pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka memperkokoh perwujudan visi pembangunan yang termuat dalam UUD 1945 guna dijadikan menjiwai penyusunan Keputusan/Ketetapan MPR.
 3. Landasan operasional pembangunan adalah Keputusan/Ketetapan MPR. Keputusan/Ketetapan MPR terutama Ketetapan tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) merupakan arahan paling dasar sebagai misi pembangunan nasional lima tahunan guna dijadikan landasan dalam penyusunan pembangunan nasional-lima tahunan. GBHN disusun oleh MPR. Dasar penyusunan GBHN adalah UUD 1945.
 4. Landasan perencanaan pembangunan nasional adalah Program Pembangunan Nasional-lima tahun (Propenas). Propenas merupakan arahan paling dasar sebagai strategi pembangunan lima tahunan guna dijadikan landasan dalam penyusunan prioritas kebijakan pembangunan sektoral nasional dan pembangunan sektoral di daerah (pembangunan daerah). Propenas disusun oleh Pemerintah bersama DPR. Dasar penyusunan Propenas adalah GBHN.
 5. Landasan pembangunan nasional tahunan adalah Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta). Repeta merupakan arahan paling dasar sebagai pelaksanaan strategi pembangunan lima tahunan ke dalam sasaran pembangunan satu tahunan guna dijadikan landasan dalam penyusunan pembiayaan pembangunan sektoral nasional dan pembangunan sektoral di daerah (pembangunan daerah). Repeta disusun oleh Pemerintah bersama DPR. Dasar penyusunan Repeta adalah Propenas. Repeta memuat satuan anggaran pembiayaan pembangunan sektoral nasional. Dasar penyusunan Repeta adalah Propenas.

6. Landasan pembiayaan pembangunan nasional tahunan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN merupakan arahan paling dasar sebagai acuan pembiayaan bagi pelaksanaan pembangunan nasional satu tahunan guna dijadikan sumber pembiayaan pembangunan sektoral nasional dan pembangunan sektoral di daerah (pembangunan daerah). APBN disusun oleh Pemerintah bersama DPR. Dasar penyusunan APBN adalah Repeta. APBN memuat nilai-nilai anggaran pembiayaan pembangunan sektoral nasional dan pembangunan sektoral di daerah (pembangunan daerah) yang tertuang dalam APBN.
7. Landasan perencanaan pembangunan sektoral nasional adalah Rencana Strategis (Renstra). Renstra merupakan arahan paling dasar sebagai pelaksanaan kegiatan pembangunan jangka menengah (lima tahunan) ke dalam kegiatan pembangunan jangka pendek (satu tahunan) guna dijadikan landasan dalam penyusunan anggaran pembiayaan pembangunan sektoral nasional dan pembangunan sektoral di daerah (pembangunan daerah) selama satu tahun. Renstra disusun oleh Departemen Teknis, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dan Lembaga-lembaga Pemerintah lainnya, guna dijadikan landasan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dasar penyusunan Renstra adalah Propenas dan Repeta.
8. Landasan perencanaan pembangunan nasional di daerah adalah Pola Dasar Pembangunan Daerah (Poldas). Poldas merupakan arahan paling dasar sebagai strategi pembangunan lima tahunan nasional di daerah guna dijadikan landasan dalam penyusunan prioritas kebijakan pembangunan sektoral di daerah (pembangunan daerah). Poldas disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan, bersama DPRD masing-masing. Dasar penyusunan Poldas adalah GBHN.
9. Landasan perencanaan pembangunan nasional di daerah adalah Program Pembangunan Nasional-lima tahun Daerah (Propeda). Propeda merupakan arahan paling dasar sebagai strategi pembangunan lima tahunan di daerah guna dijadikan landasan dalam penyusunan prioritas kebijakan pembangunan sektoral nasional di daerah (pembangunan daerah). Propeda disusun oleh

Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan, bersama DPRD masing-masing. Dasar penyusunan Propeda adalah Poldas dan Propenas.

10. Landasan pembangunan nasional di daerah adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada). Repetada merupakan arahan paling dasar sebagai pelaksanaan strategi pembangunan lima tahunan di daerah ke dalam sasaran pembangunan satu tahunan guna dijadikan landasan dalam penyusunan pembiayaan pembangunan sektoral di daerah (pembangunan daerah). Repetada disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan, bersama DPRD masing-masing. Dasar penyusunan Repetada adalah Propeda. Repetada memuat satuan anggaran pembiayaan pembangunan sektoral nasional yang tertuang dalam APBD.
11. Landasan pembiayaan pembangunan tahunan di daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan arahan paling dasar sebagai acuan pembiayaan bagi pelaksanaan pembangunan daerah satu tahunan guna dijadikan sumber pembiayaan pembangunan sektoral di daerah (pembangunan daerah). APBD disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan, bersama DPRD masing-masing. Dasar penyusunan APBD adalah Repetada. APBD memuat nilai-nilai anggaran pembiayaan pembangunan sektoral di daerah (pembangunan daerah).
12. Landasan perencanaan pembangunan sektoral nasional di daerah (pembangunan daerah) adalah Rencana Strategis Daerah (Renstrada). Renstrada merupakan arahan paling dasar sebagai pelaksanaan kegiatan pembangunan jangka menengah (lima tahunan) ke dalam kegiatan pembangunan jangka pendek (satu tahunan) guna dijadikan landasan dalam penyusunan anggaran pembiayaan pembangunan sektoral nasional di daerah (pembangunan daerah) selama satu tahun. Renstrada disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan, guna dijadikan landasan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Dasar penyusunan Renstrada adalah Propenas dan Repeta, serta Propeda dan Repetada.

13. Landasan penyerasian pembangunan adalah forum Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional (Rakorbangnas). Rakorbangnas merupakan suatu mekanisme penyerasian penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan nasional di daerah berdasarkan masukan dari daerah (rakyat) sesuai prinsip musyawarah dan wawasan nasional (Pancasila dan Pembukaan UUD 1945). Tujuan utama Rakorbangnas adalah menentukan prioritas pembanguan di setiap wilayah/daerah dan kawasan/regional. Jalur pelaksanaan skema Rakorbangnas dimulai dari forum pertemuan di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan (tingkat pertama), dilanjutkan ke forum pertemuan tingkat Kabupaten/Kota serta forum Lintaskabupaten/Kota (tingkat kedua), diteruskan ke forum pertemuan di tingkat Provinsi (tingkat ketiga), kemdian diteruskan ke forum pertemuan di tingkat kawasan/regional/pulau (tingkat keempat), dan berakhir di forum Rakorbangnas. Skema Rakorbangnas melibatkan semua unsur pelaku pembangunan, mulai unsur Pemerintah (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), unsur perwakilan rakyat (DPR, DPRD), dan unsur publik yang terdiri dari unsur bisnis (seperti Kadin) dan nir-laba (perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat).

Program- Program Yang di Laksanakan

1. Pada Masa Orde Lama

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan ekonomi pada Masa Orde Lama, antara lain :

- a. Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan IR. Surachman pada bulan Juli 1946.
- b. Upaya menembus blockade dengan diplomasi beras ke India (India merupakan Negara yang mengalami nasib yang sama dengan Indonesia yaitu sama-sama pernah dijajah, Indonesia menawarkan bantuan berupa padi sebanyak 500.000 ton dan India menyerahkan sejumlah obat-obatan kepada

Indonesia), mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blockade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.

- c. Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
 - d. Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947 Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948, mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
 - e. Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (mengikuti Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).
2. Pada Masa Orde Baru

Pada Masa Orde Baru dibentuk lah Rencana Pembangunan Lima Tahun yang kita kenal pada saat itu sebagai REPELITA. Berikut penjelasan singkat tentang beberapa REPELITA :

Repelita I (1 April 1969 hingga 31 Maret 1974)

Titik Berat Repelita I : Pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian.

Sasaran Repelita I : Pangan, Sandang, Perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani.

Tujuan Repelita I : Untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya.

Repelita II (1 April 1974 hingga 31 Maret 1979)

Titik Berat Repelita II: Pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.

Sasaran Repelita II: Tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat dan memperluas kesempatan kerja.

Tujuan Repelita II: Meningkatkan pembangunan di pulau-pulau selain Jawa, Bali dan Madura, di antaranya melalui transmigrasi.

Pelaksanaan Repelita II cukup berhasil pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7% per tahun. Pada awal pemerintahan Orde Baru laju inflasi mencapai 60% dan pada akhir Repelita I laju inflasi turun menjadi 47%. Selanjutnya pada tahun keempat Repelita II, inflasi turun menjadi 9,5%.

Repelita III (1 April 1979 hingga 31 Maret 1984)

Titik Berat Repelita III: Pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang selanjutnya. Menekankan bidang industri padat karya untuk meningkatkan ekspor.

Pertumbuhan perekonomian periode ini dihambat oleh resesi dunia yang belum juga berakhir. Sementara itu nampak ada kecenderungan harga minyak yang semakin menurun khususnya pada tahun-tahun terakhir Repelita III. Menghadapi ekonomi dunia yang tidak menentu, usaha pemerintah diarahkan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah, baik dari penggalakan ekspor maupun pajak-pajak dalam negeri.

Repelita IV (1 April 1984 hingga 31 Maret 1989)

Titik Berat Repelita IV: Pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin- mesin industri sendiri, baik industri ringan yang akan terus dikembangkan dalam repelita-

repelita selanjutnya meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.

Tujuan Repelita IV: Menciptakan lapangan kerja baru dan industri.

Terjadi resesi pada awal tahun 1980 yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal sehingga kelangsungan pembangunan ekonomi dapat dipertahankan.

Repelita V (1 April 1989 hingga 31 Maret 1994)

Menekankan bidang transportasi, komunikasi dan pendidikan Pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan dengan menekankan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Ketiga unsur Trilogi Pembangunan tersebut saling mengait dan perlu dikembangkan secara selaras, terpadu, dan saling memperkuat. Tujuan dari Repelita V sesuai dengan GBHN tahun 1988 adalah pertama, meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang makin merata dan adil; kedua, meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pemangunan berikutnya.

Repelita VI (01 April 1999)

Titik berat Repelita VI diarahkan pada pembangunan sektor-sektor ekonomi dengan keterkaitan antara industri dan pertanian serta bidang pembangunan lainnya dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sasaran pembangunan industri dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun VI sebagai bagian dari sasaran bidang ekonomi sesuai amanat GBHN 1993 adalah tertata dan mantapnya industri nasional yang mengarah pada penguatan, pendalaman, peningkatan, perluasan, dan penyebaran industri ke seluruh wilayah Indonesia, dan makin kukuhnya struktur industri dengan peningkatan keterkaitan antara industri hulu, industri antara, dan

industri hilir serta antara industri besar, industri menengah, industri kecil, dan industri rakyat. Serta keterkaitan antara sektor industri dengan sektor ekonomi lainnya.

3. Pada Masa Reformasi

Masa Kepemimpinan B.J. Habibie

Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan berekspresi. Di bidang ekonomi, ia berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dollar masih berkisar antara Rp 10.000 – Rp 15.000, Habibie juga memulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurus perekonomian.

Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, BJ Habibie melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dan unit Pengelola Aset Negara.
- b. Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah
- c. Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri
- d. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF
- e. Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat
- f. Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Masa Kepemimpinan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

Keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi perekonomian Indonesia mulai mengarah pada perbaikan, di antaranya

pertumbuhan PDB yang mulai positif, laju inflasi dan tingkat suku bunga yang rendah, sehingga kondisi moneter dalam negeri juga sudah mulai stabil.

- b. Hubungan pemerintah dibawah pimpinan Abdurrahman Wahid dengan IMF juga kurang baik, yang dikarenakan masalah, seperti Amandemen UU No.23 tahun 1999 mengenai bank Indonesia, penerapan otonomi daerah (kebebasan daerah untuk pinjam uang dari luar negeri) dan revisi APBN 2001 yang terus tertunda.
- c. Politik dan sosial yang tidak stabil semakin parah yang membuat investor asing menjadi enggan untuk menanamkan modal di Indonesia.
- d. Makin rumitnya persoalan ekonomi ditandai lagi dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang cenderung negatif, bahkan merosot hingga 300 poin, dikarenakan lebih banyaknya kegiatan penjualan daripada kegiatan pembelian dalam perdagangan saham di dalam negeri.

Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.

Masa Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri

Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri mengalami masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :

- a. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US\$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.

- b. Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.

Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi.

Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono

Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat kebijakan kontroversial yaitu mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pada periode ini pemerintah melaksanakan beberapa program baru yang dimaksudkan untuk membantu ekonomi masyarakat kecil diantaranya PNPM Mandiri dan Jamkesmas. Pada prakteknya, program-program ini berjalan sesuai dengan yang ditargetkan meskipun masih banyak kekurangan disana-sini.

Pada saat kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono Pada pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS.

Namun, selama masa pemerintahan SBY, perekonomian Indonesia memang berada pada masa keemasannya. Indikator yang cukup menyita perhatian adalah inflasi. Sejak tahun 2005-2009, inflasi berhasil ditekan pada single digit. Dari 17,11% pada tahun 2005 menjadi 6,96% pada tahun 2009. Tagline strategi pembangunan ekonomi SBY yang berbunyi pro-poor, pro-job, dan pro growth (dan kemudian ditambahkan dengan pro environment) benar-benar diwujudkan dengan turunnya angka kemiskinan dari 36,1 juta pada

tahun 2005, menjadi 31,02 juta orang pada 2010. Artinya, hampir sebanyak 6 juta orang telah lepas dari jerat kemiskinan dalam kurun waktu 5 tahun. Ini tentu hanya imbas dari strategi SBY yang pro growth yang mendorong pertumbuhan PDB.

Masa Kepemimpinan Joko Widodo

Pemerintahan baru Jokowi, yang dijalankan oleh Kabinet Kerja, sangat diharapkan oleh publik untuk dapat melaksanakan beberapa agenda kebijakan reformasi ekonomi, terutama pada percepatan proyek infrastruktur, pengembangan sektor maritim, dan program jaminan sosial. . Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus melambat dalam empat tahun terakhir, dari 6,8% pada tahun 2010 menjadi 5,0%, yang menandakan daya beli masyarakat yang melemah. Selain itu, kondisi eksternal juga kurang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang ditandai dengan perlambatan ekonomi global (terutama resesi di Eropa dan Jepang dan perlambatan pertumbuhan Tiongkok dan India), likuiditas global yang mengering, serta jatuhnya harga komoditas ekspor. Dalam situasi demikian, pendekatan Jokowi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi adalah melalui reformasi ekonomi domestik yang terutama lebih berfokus pada sisi penawaran (*supply-side reforms*), antara lain melalui pengembangan infrastruktur dan perbaikan iklim investasi.

Salah satu reformasi radikal yang dilakukan Jokowi terjadi kurang dari sebulan setelah pelantikan, yaitu pemotongan signifikan dari subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebagai usaha untuk mengurangi beban fiskal. Langkah reformasi yang berani ini berhasil menciptakan ruang fiskal yang sangat dibutuhkan untuk membiayai sejumlah agenda pembangunan lainnya, terutama pembangunan infrastruktur.



BAB II

KARAKTERISTIK PEREKONOMIAN INDONESIA

Masalah Yang Menyertai Pembangunan Ekonomi

Tujuan pembangunan bukan hanya menginginkan adanya perubahan dalam arti peningkatan PDB tapi juga adanya perubahan struktura. Perubahann struktur ekonomi berkisar pada segi akumulasi (pengembangan sdp secara kuantitatif dan kualitatif), segi alokasi (pola penggunaan sdp), segi institusional (kelembagaan ekonomi dalam kehidupan masyarakat), segi distribusi (pola pembagian pendapatan nasional) (Soemitro Djojohadikusumo, 1993).

Karakteristik Perekonomian Indonesia :

1. Faktor geografi

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari 13.677 pulau besar – kecil (baru 6.044 pulau memiliki nama, diantaranya 990 pulau yang dihuni manusia); terbentang dari 6^oLU sampai 11^oLS sepanjang 61.146 km., memiliki potensi ekonomi yang berbeda-beda karena perbedaan SDA, SDM, kesuburan tanah, curah hujan (Sutjipto, 1975).

Wilayah Indonesia seluas 5.193.250 km², 70 persennya (\pm 3,635,000 km²) terdiri dari lautan (menjadi negara bahari) letaknya strategis karena : memiliki posisi silang (antara Benua Asia dan Benua Australia), menjadi jalur lalu lintas dunia (antara Laut Atlantik dan Laut Pasifik) dan menjadi paru-paru dunia (memiliki hutan tropis terbesar). Menghadapi kesulitan komunikasi dan transportasi antar pulau (daerah) baik untuk angkutan barang maupun penumpang; arus barang tidak lancar; perbedaan harga barang yang tajam; perbedaan kesempatan pendidikan dan kesempatan (lapangan) kerja; kesemuanya itu merupakan potensi kesenjangan.

2. Faktor Demografi

Indonesia negara nomor 4 di dunia karena berpenduduk lebih dari 310 juta orang. Penyebaran penduduk tidak merata (dua per tiga tinggal di P. Jawa), sebagian besar hidup di pedesaan (pertanian), bermata pencaharian sebagai petani kecil dan buruh tani dengan upah sangat rendah.

- a. Mutu SDM rendah : \pm 80% angkatan kerja berpendidikan SD. Produktivitas rendah karena taraf hidup yang rendah: konsumsi rata-rata penduduk Indonesia RP 82.226 per bulan (1993), namun 82% penduduk berpendapatan di bawah RP 60.000 per bulan per kapita (Sjahrir, 1996).
- b. Indonesia yang berpenduduk lebih dari 210 juta orang membutuhkan berbagai barang, jasa dan fasilitas hidup dalam ukuran serba besar (pangan, sandang, perumahan dan lain-lain). Namun dilain pihak kemampuan kita untuk berproduksi (produktivitasnya) rendah. Hal ini akan menciptakan kondisi munculnya rawan kemiskinan.

3. 3. Faktor sosial, budaya dan politik

Sosial : Bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku (heterogin) dengan beraagam budaya, adat istiadat, tata nilai, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Karena perbedaan latar belakang, pengetahuan dan kemampuan yang tidak sama, maka visi, persepsi, interpretasi dan reaksi (aksi) mereka terhadap isu-isu yang sama bisa berbeda-beda, yang sering kali menimbulkan konflik sosial (SARA).

Bangsa Indonesia memiliki banyak budaya daerah, tapi sebenarnya kita belum memiliki budaya nasional (kecuali bahasa Indonesia). Namun sebagai salah satu bangsa “Timur” (bangsa yang merdeka dan membangun ekonomi sejak akhir Perang Dunia II), mayoritas bangsa Indonesia sampai sekarang masih terpengaruh (menganut) “budaya” Timur, budaya status orientation. Budaya status orientation bercirikan: semangat hidupnya mengejar pangkat, kedudukan, status (dengan simbol-simbol sosial); etos kerjanya lemah; senang bersantai-santai; tingkat disiplinnya rendah, kurang menghargai waktu (jam karet). Lawannya “budaya” barat, budaya achievement orientation dengan ciri-ciri sebaliknya. Budaya status orientationn tidak produktif, konsumtif, suka pamer dan mudah memicu kecemburuan sosial.

Politik : sebelum kolonialis Belanda datang, bangsa Indonesia hidup di bawah kekuasaan raja-raja. Ratusan tahun bangsa Indonesia hidup di bawah pengaruh feodalisme dan kolonialisme. Ciri utama feodalisme antara lain adalah kultus individu (raja selalu diagungkan). Ciri utama kolonialisme antara lain adalah otoriter (laksana tuan terhadap budak).Sisa-sisa pengaruh feodalisme (kultus individu) dan pengaruh kolonialisme (otoriter) sampai sekarang belum terkikis habis. Hal ini sangat terasa pada percaturan dan pergolakan politik di Indonesia. Perilaku yang kurang demokratis dari para elit politik dan perilaku kurang menghargai HAM dari para penguasa, menghambat kelancaran proses demokratisasi politik di Indonesia. Pada gilirannya hal ini menghambat terciptanya demokrasi ekonomi.

Dari uraian pengaruh faktor-faktor di atas dapat disimpulkan bahwa perekonomian Indonesia mengandung tiga potensi kerawanan. Tiga potensi kerawanan yang menjadi karakteristik perekonomian Indonesia adalah:

- a. Potensi rawann kesenjangan, terutama kesenjangan antara daerah (pulau). Hal ini terutama sebagai akibat pengaruh faktor geografi.

- b. Potensi rawan kemiskinan, terutama kemiskinan di daerah pedesaan. Hal ini terutama sebagai akibat pengaruh faktor demografi dan faktor budaya.
- c. Potensi rawan perpecahan, terutama perpecahan antar suku, antar golongan (elit) politik. Hal ini terutama sebagai akibat pengaruh faktor sosial-politik..

Karakteristik Ekonomi Indonesia

1. Indonesia sebagai negara kepulauan

Negara Indonesia adalah negara yang diapit oleh dua benua yaitu dari benua asia dan benua australia dan dua samudra yaitu samudra hindia dan samudra pasifik. Negara Indonesia terbentang sepanjang 6°LU - 11°08'LS dan dari 95°BT - 141°45'BT.

Berdasarkan data yang terdapat dalam wikipedia luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km² dan luas perairannya 3.257.483 km². sehingga tidak heran jika indonesia disebut sebagai negara kepulauan atau maritim dengan panjang garis pantai lebih dari 81.000 km serta lebih dari 17.508 pulau dan luas laut sekitar 3,1 juta km². Maka 'tak mengherankan jika indonesia memiliki potensi keanekaragaman biota laut yang ada. Contohnya wilayah pesisir dan lautan Indonesia dikenal kekayaan dan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) laut terbesar di dunia dengan memiliki ekosistem pesisir seperti mangrove, terumbu karang (*coral reefs*) dan padanglamun (*sea grass beds*) (Dahuri et al. 1996)

2. Menghadapi persoalan penduduk

Persoalan penduduk adalah persoalan yang selalu di hadapi di negara berkembang. Maksudnya adalah laju pertumbuhan yang tinggi dan tingkat kesehatan yang rendah adalah salah satu contoh di negara berkembang.

Indonesia adalah negara berkembang. Hal ini di buktikan, berdasarkan data statistik dari Badan Pusat Statistik, laju pertumbuhan penduduk yang mencapai 1.49% pertahun. Dan saat

ini jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 240.000.000. Dimana setengah dari jumlah tersebut bermukim di pulau Jawa.

Berdasarkan uraian diatas maka 'tak heran masalah penduduk menjadi masalah besar dari negara Indonesia. Pendataan terus dilakukan, dan program – program transmigrasi dan KB serta penundaan usia nikah adalah cara – cara yang gencar yang dilakukan oleh pemerintah.

Tugas berat ini diemban oleh pemerintah. Karena berdasarkan pernyataan dari Statistik Indonesia tentang proyeksi laju pertumbuhan Indonesia “asli proyeksi menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia selama dua puluh lima tahun mendatang terus meningkat yaitu dari 205,1 juta pada tahun 2000 menjadi 273,2 juta pada tahun 2025 (Tabel 3.1). Walaupun demikian, pertumbuhan rata-rata per tahun penduduk Indonesia selama periode 2000-2025 menunjukkan kecenderungan terus menurun. Dalam dekade 1990-2000, penduduk Indonesia bertambah dengan kecepatan 1,49 persen per tahun, kemudian antara periode 2000-2005 dan 2020-2025 turun menjadi 1,34 persen dan 0,92 persen per tahun. Turunnya laju pertumbuhan ini ditentukan oleh turunya tingkat kelahiran dan kematian, namun penurunan karena kelahiran lebih cepat daripada penurunan karena kematian. *Crude Birth Rate* (CBR) turun dari sekitar 21 per 1000 penduduk pada awal proyeksi menjadi 15 per 1000 penduduk pada akhir periode proyeksi, sedangkan *Crude Death Rate* (CDR) tetap sebesar 7 per 1000 penduduk dalam kurun waktu yang sama.

Salah satu ciri penduduk Indonesia adalah persebaran antar pulau dan provinsi yang tidak merata. Sejak tahun 1930, sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, padahal luas pulau itu kurang dari tujuh persen dari luas total wilayah daratan Indonesia. Namun secara perlahan persentase penduduk Indonesia yang tinggal di Pulau Jawa terus menurun dari sekitar 59,1 persen pada tahun 2000 menjadi 55,4 persen pada tahun 2025. Sebaliknya persentase penduduk yang tinggal di pulau-pulau lain meningkat seperti, Pulau Sumatera naik dari 20,7 persen menjadi 22,7 persen, Kalimantan naik dari 5,5 persen menjadi 6,5 persen pada periode

yang sama. Selain pertumbuhan alami di pulau-pulau tersebut memang lebih tinggi dari pertumbuhan alami di Jawa, faktor arus perpindahan yang mulai menyebar ke pulau-pulau tersebut juga menentukan distribusi penduduk.

3. Kaya sumber daya alam

Indonesia sebagai negara kepulauan terkenal dengan negara yang kaya akan sumber daya alam. Menurut data yang bersumber pada wikipedia bahwa Tingginya tingkat biodiversitas Indonesia ditunjukkan dengan adanya 10% dari tanaman berbunga yang dikenal di dunia dapat ditemukan di Indonesia, 12% dari mamalia, 16% dari hewan reptil, 17% dari burung, 18% dari jenis terumbu karang, dan 25% dari hewan laut. Di bidang agrikultur, Indonesia juga terkenal atas kekayaan tanaman perkebunannya, seperti biji coklat, karet, kelapa sawit, cengkeh, dan bahkan kayu yang banyak diantaranya menempati urutan atas dari segi produksinya di dunia.

Sumber daya alam di Indonesia tidak terbatas pada kekayaan hayatinya saja. Berbagai daerah di Indonesia juga dikenal sebagai penghasil berbagai jenis bahan tambang, seperti petroleum, timah, gas alam, nikel, tembaga, bauksit, timah, batu bara, emas, dan perak. Di samping itu, Indonesia juga memiliki tanah yang subur dan baik digunakan untuk berbagai jenis tanaman. Wilayah perairan yang mencapai 7,9 juta km² juga menyediakan potensi alam yang sangat besar.

Tetapi pemanfaatan yang kurang maksimal sehingga kekayaan alam yang luas tadi bisa di dimanfaatkan oleh negara – negara luar yang menanamkan modalnya di indonesia sebagai penanam modal dengan kontrak perjanjian yang tidak menguntungkan seperti freeport dengan kasusnya yang terkenal.

4. Kekurangan kapital

Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang luas dan potensi yang cukup besar untuk modal seperti yang telah dijelaskan diatas, tetapi malah ketergantungan Indonesia terhadap modal dari negara lain dalam bentuk pinjaman sangat tinggi. Hal itu bisa dibuktikan ketika pada era ORBA dimana untuk membangun negara pemerintah

menggunakan dana dari luar negeri dalam bentuk pinjaman dan penanaman modal asing.

5. Struktur ekonomi

Struktur ekonomi dapat diartikan sebagai komposisi peranan masing-masing sektor dalam perekonomian baik menurut lapangan usaha maupun pembagian sektoral ke dalam sektor primer, sekunder dan tersier. Gambaran kondisi struktur ekonomi Indonesia dapat dilihat melalui kontribusi setiap sektor ekonomi terhadap pembentukan PDB. Struktur ekonomi dikatakan berubah apabila kontribusi/pangsa PDB dari sektor ekonomi yang mulanya dominan digantikan oleh sektor ekonomi lain.

Dalam analisis deskriptif ini, kita akan melihat bagaimana kondisi struktur ekonomi Indonesia dari tahun 1983 sampai 2010. Untuk memudahkan analisis, sektor-sektor dalam perekonomian akan dikelompokkan menjadi 3 sektor yaitu sektor primer, sekunder dan tersier. Sektor primer merupakan gabungan dari sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan dan sektor pertambangan dan penggalian. Sektor sekunder merupakan gabungan dari sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air dan sektor konstruksi. Sedangkan sektor tersier merupakan gabungan dari sektor perdagangan, hotel, restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berlangsung secara berkesinambungan pada periode sebelum krisis ekonomi (pertumbuhan tidak pernah berada di bawah 6,40 persen) dan semakin meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat secara agregat, ternyata memberi kemajuan yang cukup berarti terhadap perubahan struktur ekonomi Indonesia. Perubahan struktur ekonomi ini terlihat dari perubahan komposisi sektor ekonomi atas kontribusinya terhadap PDB dalam jangka waktu tahun 1983-2010.

Dilihat dari lapangan usaha utama, kontribusi sektor primer terhadap PDB pada tahun 1983 adalah sebesar 43,64 persen dan pada tahun 2010 tinggal 26,49 persen. Sementara itu, kontribusi sektor

sekunder yang semula hanya sebesar 19,08 persen pada tahun 1983 menjadi sekitar 35,89 persen pada tahun 2010. Sedangkan sektor tersier mengalami perubahan yang relatif konstan, kontribusi sektor ini terhadap PDB pada tahun 1983 sebesar 37,29 persen dan pada tahun 2010 sebesar 37,62 persen, tidak jauh berbeda dengan tahun 1983. Hal ini menunjukkan telah terjadi transformasi perekonomian atau perubahan struktur ekonomi Indonesia yang ditandai dengan semakin menurunnya peran sektor primer dalam sumbangannya terhadap PDB dan semakin meningkatnya peran sektor nonprimer.

Terlihat bahwa telah terjadi perubahan pada struktur ekonomi Indonesia. Hal ini terlihat dari semakin menurunnya pangsa sektor primer dan semakin meningkatnya pangsa sektor nonprimer terhadap PDB dari periode 1983-2010. Perkembangan kontribusi sektor ekonomi terhadap PDB pada periode sebelum krisis ekonomi (1983-1996) menunjukkan bahwa dominasi produk yang dihasilkan perekonomian Indonesia mulai bergeser dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

Pada tahun 1983 pangsa sektor primer masih cukup tinggi dibandingkan sektor lainnya, yaitu sebesar 43,64 persen, sedangkan sektor sekunder sebesar 19,08 persen dan sektor tersier sebesar 37,29 persen. Pangsa sektor primer terhadap PDB kemudian berangsur-angsur turun hingga hanya sebesar 25,33 persen pada tahun 1996, sedangkan sektor sekunder justru terus mengalami peningkatan. Pangsa sektor sekunder terhadap PDB pada tahun 1996 menjadi 34,80 persen, meningkat 15,72 persen dari tahun 1983. Sektor tersier mengalami perkembangan yang relatif konstan selama periode 1983-1996. Selama periode tersebut tercatat pangsa sektor tersier terhadap PDB berkisar pada angka 37,29 persen sampai 42,44 persen.

Pada periode terjadinya krisis ekonomi (tahun 1997-1999) struktur perekonomian Indonesia relatif tidak mengalami perubahan yang berarti, kecuali sektor pertanian. Pada tahun 1997, sektor primer memiliki pangsa sebesar 24,94 persen terhadap PDB dan meningkat cukup besar pada tahun 1998 menjadi 30,67 persen dan kemudian turun kembali menjadi 29,61 persen pada tahun

1999. Pangsa sektor sekunder terhadap PDB pada periode tersebut tidak mengalami perubahan yang berarti, pangsa sektor ini sebesar 35,48 persen pada tahun 1997, 32,64 persen pada tahun 1998 dan meningkat menjadi 33,36 persen pada tahun 1999. Sedangkan sektor tersier memiliki pangsa terhadap PDB berkisar antara 36,69 persen sampai 39,58 persen selama periode krisis ekonomi ini.

Setelah melewati krisis ekonomi, perubahan struktur Indonesia terlihat dari semakin menurunnya pangsa sektor primer dari tahun 2000 sampai 2004. Pangsa sektor primer terus mengalami penurunan dari 27,67 persen pada tahun 2000 menjadi 23,28 persen pada tahun 2004. Pada periode yang sama, pangsa sektor sekunder terhadap PDB justru cenderung mengalami peningkatan dari 33,86 persen pada tahun 2000 menjadi 35,69 persen pada tahun 2004, walaupun pada tahun 2003 sempat mengalami penurunan sebesar 0,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pangsa sektor tersier pada tahun 2000-2004 tidak mengalami perubahan yang cukup berarti, pada tahun 2000-2001 pangsa sektor ini mengalami penurunan, namun pada tahun 2002-2003 mengalami kenaikan. Pada tahun 2003 pangsa sektor tersier adalah sebesar 41,07 persen, meningkat 1,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan turun 0,03 persen pada tahun 2004.

Selama tahun 2005-2010, sektor yang terlihat cenderung meningkat pangasanya terhadap PDB adalah sektor primer. Pangsa sektor primer pada tahun 2010 adalah sebesar 26,49 persen, meningkat jika dibandingkan tahun 2005 yang memiliki pangsa sebesar 24,27 persen saat itu. Pada tahun 2008-2010 sektor sekunder dan tersier terlihat memiliki pangsa yang relatif mirip terhadap PDB yaitu berkisar antara 35,89 persen sampai 37,62 persen. Namun, secara umum pangsa sektor primer masih tetap berada di bawah pangsa sektor sekunder dan tersier.

Jika kita lihat dari hasil analisis deskriptif di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwatelah terjadi perubahan struktur ekonomi di Indonesia selama tahun 1983-2010. Sejak tahun 1985, peran sektor primer telah digeser oleh sektor tersier, kemudian pada tahun 1993 sektor primer kembali digeser oleh sektor

sekunder. Pada tahun 2009 sektor sekunder merupakan sektor yang memiliki peran paling besar terhadap PDB, namun pada tahun 2010 kembali digeser oleh sektor tersier. Sampai tahun 2010 peran sektor primer masih berada di bawah sektor tersier dan sekunder. Hal ini menunjukkan bahwa proses transformasi struktur ekonomi Indonesia telah menuju ke arah industrialisasi, dimana peran sektor primer mulai digantikan oleh peran sektor lainnya, terutama sektor sekunder yang mengalami peningkatan kontribusi cukup besar dan signifikan hampir di tiap tahun dibanding sektor lainnya.

6. Industrialisasi lamban

Salah satu ciri dari negara berkembang adalah industrialisasi yang masih lamban. Kita tahu bahwa Indonesia tergolong ke dalam negara berkembang. Hal ini dibuktikan dengan sistem perekonomian yang masih mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama dari penduduknya.

7. Sistem ekonomi campuran

Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang mengambil kebaikan dari sistem ekonomi liberal dan sosialis. Meski dalam praktiknya tidak 100% melakukannya melainkan cenderung ke arah liberalis atau kapitalis.

8. Adanya dualisme ekonomi

Dualisme ini maksudnya adalah adanya dua kepentingan yang sama kuat. Contohnya adalah dualisme teknologi, dualisme kepentingan dsb.

9. Perekonomian di kuasai oleh unit – unit usaha besar

Perekonomian yang masih dikuasai oleh unit – unit besar maksudnya adalah sektor pendapatan Indonesia masih di kuasai oleh sektor – sektor industri besar, seperti rokok.

Tetapi hal itu akan menjadi ancaman jika sektor besar tadi anjlok karena keberadaan usaha – usaha di Indonesia cenderung lebih besar UKM di bandingkan Industri besar. Indonesia sebagai negara kepulauan (nusantara) memiliki ciri-ciri khusus, yang berbeda dengan negara tetangga ASEAN, bahkan berbeda dengan

negara-negara lain di dunia sehingga perekonomiannya memiliki karakteristik sendiri.

Strategi Pembangunan Indonesia

Strategi pembangunan adalah suatu tindakan pemilihan atas faktor-faktor yang di jadikan faktor utama (penentu) pada jalannya proses pertumbuhan.

Strategi pembangunan di Indonesia tidak mengenal perbedaan strategi yang ekstrim. Sebagai contoh selain strategi pemerataan pembangunan, Indonesia tidak mengesampingkan strategi pertumbuhan dan strategi yang berwawasan ruang (terbukti dengan dibaginya wilayah Indonesia dengan berbagai wilayah pembangunan I, II, III dan seterusnya). Periode ini kemudian disusul dengan periode Repelita dan dalam setiap Repelita, khususnya sejak Repelita II, strategi pembangunan ekonomi yang diberlakukan di Indonesia adalah strategi yang mengacu pada pertumbuhan yang sekaligus berorientasi pada keadilan (pemerataan), menghapus kemiskinan, dan juga keadilan (pemerataan) antar daerah. Pembagian wilayah pembangunan ini tidak didasarkan pada pembagian secara administratif politis .

Repelita I : Meletakkan titik berat pada sektor pertanian pada sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.

Repelita II : Dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.

Repelita III : Meletakkan titik berat pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.

Repelita IV : Meletakkan titik berat pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri ringan yang akan terus dikembangkan dalam

Repelita-Repelita selanjutnya dan meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.

Pada dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan strategi pembangunan ekonomi adalah tujuan yang hendak dicapai. Apabila yang ingin dicapai adalah tingkat pertumbuhan yang tinggi, maka faktor yang mempengaruhi digunakannya strategi tersebut adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah, akumulasi kapital rendah, tingkat pendapatan pada kapital yang rendah, dan struktur ekonomi yang berat ke sektor tradisional yang juga kurang berkembang.

Kunci dari pembangunan adalah kemakmuran bersama. Pemerataan hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Tingkat pertumbuhan yang tinggi tanpa disertai pemerataan pembangunan hanyalah menciptakan perekonomian yang lemah dan eksploitasi sumber daya manusia. Hipotesis Kusnets (1963) yang menyatakan bahwa sejalan dengan waktu ketidak merataan (inequality) akan meningkat akan tetapi kemudian akan menurun karena adanya penetesan ke bawah (trickle down effect), sehingga kurva akan berbentuk seperti huruf U terbalik (Inverted U). Akan tetapi pada kenyataannya penetesan ke bawah (trickle down effect) tidak selalu terjadi, sehingga kesenjangan antara kaya dan miskin semakin besar.

Faktor yang mempengaruhi diberlakukannya strategi Pembangunan yang berorientasi pada penghapusan kemiskinan-kemiskinan pada dasarnya dilandasi keinginan, berdasarkan atas norma tertentu, bahwa kemiskinan harus secepat mungkin dibatasi. Sementara itu strategi-strategi pembangunan yang lain ternyata sangat sulit mempengaruhi atau memberikan manfaat secara langsung kepada golongan miskin ini.

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pembangunan
 - a. Kependudukan dan social budaya
 - b. Wilayah dan lingkungan
 - c. Sumber daya alam serta persebarannya.
 - d. Kualitas sumber daya manusia terhadap penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- e. Manajemen nasional.
 - f. Kemungkinan pengembangan.
2. Manfaat adanya perencanaan pembangunan

Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan. Dengan perencanaan maka dapat dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan, tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan risiko-risiko yang mungkin dihadapi. Perencanaan mengusahakan supaya ketidak pastian dapat dibatasi seminim mungkin. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik. Dengan perencanaan dapat dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya. Dengan adanya rencana maka akan ada suatu alat pengukur untuk mengadakan suatu pengawasan dan evaluasi. Penggunaan dan aloksi sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya secara lebih efisien dan efektif. Diusahakan dihindarinya keborosan-keborosan. Suatu usaha untuk mencapai output/hasil secara maksimal daripada sumber-sumber yang tersedia. Dengan perencanaan, perkembangan ekonomi yang mantap atau pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus dapat ditingkatkan. Dengan perencanaan dapat dicapai stabilitas ekonomi, menghadapi siklus konjungtur.

3. Strategi Pembangunan dengan Pemerataan

Yang menonjol pada pertumbuhan pemerataan ini adalah ditekannya peningkatan pembangunan melalui teknik social engineering, seperti melalui penyusunan rencana induk, paket program terpadu. Dengan kata lain, pembangunan masih diselenggarakan atas dasar persepsi, instrumen yang ditentukan dari dan oleh mereka yang berada “diatas” (Ismid Hadad, 1980). Namun ternyata model pertumbuhan pemerataan ini juga belum mampu memecahkan masalah pokok yang dihadapi negara-negara sedang

berkembang seperti pengangguran masal, kemiskinan struktural dan kepingangan sosial.

Pembangunan itu sendiri harus berarti pembangunan manusia seutuhnya, bukan pembangunan dalam arti fisik saja (seperti: bangunan, jalan, bendungan dan lain sebagainya). Pembangunan harus dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Pemerataan pendidikan dan fasilitas kesehatan dapat menjamin tercapainya pemerataan dalam jangka panjang. Pemerataan hasil pembangunan di samping pertumbuhan ekonomi juga perlu diupayakan supaya pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pemerataan pendidikan dan pemerataan fasilitas kesehatan merupakan salah satu upaya penting yang diharapkan meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dengan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

Alokasi penggunaan dana untuk pendidikan dan kesehatan harus lebih diprioritaskan. Kebijakan pemerintah harus dibuat supaya pendidikan dan kesehatan dapat lebih dirasakan langsung oleh masyarakat. Melalui program pemerataan pendidikan dan pemerataan fasilitas kesehatan diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia yang produktif. Sumber daya manusia yang produktif merupakan modal yang paling menentukan dalam keberhasilan pembangunan dalam jangka panjang.

Efektifitas dan efisiensi penggunaan dana pendidikan dan kesehatan harus dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah harus tegas menindak penyelewengan yang terjadi. Penggunaan dana yang efisien dan efektif akan semakin meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat sehingga mampu menciptakan sumber daya manusia yang produktif. Sumber daya manusia yang produktif menghantarkan negara pada keunggulan komparatif sehingga mampu bersaing di dunia internasional.

Pada dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi pembangunan ekonomi adalah tujuan yang khendak dicapai. Apabila yang ingin dicapai adalah tingkat pertumbuhan yang tinggi, maka faktor yang mempengaruhi digunakannya

strategi tersebut adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah, akumulasi kapital rendah, tingkat pendapatan pada kapital yang rendah, struktur ekonomi yang berat ke sektor tradisional yang juga kurang berkembang.

Melalui peningkatan laju pertumbuhan itu orang percaya bahwa prinsip trickle down effect akan bekerja dengan baik sehingga tujuan pembangunan secara keseluruhan dapat dicapai. Namun seperti yang telah diuraikan ternyata strategi pembangunan itu tidak dapat berperan baik, khususnya dalam mencapai tingkat pemerataan pembangunan, mengatasi pengganguran dan kemiskinan. Sehingga faktor yang mempengaruhi dipilihnya strategi penciptaan lapangan pekerjaan adalah tidak bekerjanya trickle down effect, pemerataan pembangunan yang pincang, pengganguran yang cukup besar khususnya di sektore tradisional yang dipihak lain masih didukung laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi.

Strategi pembangunan, seperti telah diuraikan, ternyata malah menimbulkan ketidak merataan hasil pembangunan. Kemerataan itu tidak hanya antar golongan masyarakat, tetapi juga antar daerah. Sehingga ada daerah maju dan daerah terbelakang. Ketimpangan antar daerah ini pada dasarnya disebabkan oleh kebijaksanaan penanaman modal yang cenderung hanya diarahkan kelokasi tertentu. Biasanya modal yang ditanamkan tersebut bersifat padat modal dan outputnya berorientasi ke pasar Internasional dan atau kelompok menengah ke atas di dalam negeri. dalam kebijaksanaan ini ternyata bekerjanya prinsip spread effect(bandingkan dengan prsip trickle down effect) lebih lemah dibandingkan dengan bekerjanya back-wash effect (Proses mengalirnya dana sumber daya dari daerah terbelakang (desa) ke daerah maju (kota)), sehiongga strategi penanaman modal itu mengakibatkan makin miskinnya daerah terbelakang, khususnya pemiskinan sumber dayanya.

Selain karena kebijaksanaan penanaman modal, ketimpangan antar daerah juga disebabkan karena potensi daerah yang berbeda-beda. Dengan demikian faktor-faktor yang mempengaruhi di berlakukannya strategi pembangunan yang berorientasi pada pemerataan antar daerah adalah potensi antar daerah yang berbeda,

kebijaksanaan penanaman modal yang berat sebelah (urban bias: penanaman modal hanya di sektor yang sangat menguntungkan).

Peran Dan Kebijakan Pemerintah

1. Peran Pemerintah

Tujuan bersama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Untuk mensejahterahkan masyarakat diperlukan aneka barang dan jasa yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan, disamping terjadinya lapangan pekerjaan yang memadai bagi masyarakat sebagai sumber nafkah untuk mendapatkan penghasilan guna membeli barang dan jasa yang dibutuhkannya. Untuk mencapai kedua hal tersebut, diperlukan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Peningkatan aktivitas ekonomi memerlukan investasi baik oleh negara yang dilakukan oleh pemerintah, maupun oleh swasta yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, maka peran penting pemerintah di bidang ekonomi adalah bagaimana mendorong penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat, serta pembukaan lapangan pekerjaan sebagai sumber nafkah bagi masyarakat.

a. Terjaminnya penyediaan barang dan jasa untuk masyarakat

Berbagai kebutuhan masyarakat dapat dikelompokkan pada dua kelompok besar, yaitu kebutuhan berbentuk barang, seperti makanan dan minuman, pakaian, rumah, kendaraan, dan sebagainya, serta kebutuhan berbentuk jasa, seperti penawaran kesehatan, perlindungan keamanan dan sebagainya. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan di atas diperlukan beraneka ragam barang dan jasa, yang pengadaannya memerlukan berbagai tahap dan proses. Tahap awal dari pengadaan barang dan jasa, yang dibutuhkan untuk kelangsungan kehidupan masyarakat di masa mendatang, adalah melakukan melakukan investasi saat ini. Tanpa ada investasi saat ini sulit membayangkan kebutuhan barang dan jasa untuk kelangsungan kehidupan di masa datang dapat terpenuhi. Pada hakikatnya setiap pemerintah berfungsi mewakili negara dalam mencapai tujuannya. Misi utama dari

dibentuknya suatu pemerintahan adalah menjalankan fungsi dan tugas negara. Pemerintahan sebagai penyelenggara negara bertugas melayani kebutuhan dan melindungi kepentingan masyarakat (publik).

- b. Tersedianya lapangan pekerjaan sebagai sumber nafkah bagi masyarakat.

Keberhasilan suatu pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Maka dari itu pemerintahan seyogianya perlu memikirkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, melalui penciptaan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya.

Tugas pemerintahan di bidang ekonomi adalah meningkatkan dan melindungi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, yang diindikasikan oleh peningkatan Pendapatan Asli Masyarakat (PAM) dan Peningkatan Asli Negara melalui pengelolaan sumber daya ekonomi nasional yang tergambar dalam APBN, khususnya pada bagian penerimaan negara yang bukan dari utang. Sedangkan tugas di luar ekonomi adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat, sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Kebijakan Pemerintah

a. Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara. Bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak.

Kebijakan Fiskal yang sering disebut “politik fiskal” atau “fiscal policy” biasa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja Negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Anggaran belanja Negara terdiri dari penerimaan berupa

hasil pungutan pajak dan pengeluaran yang dapat berupa “government expenditure” dan “government transfer”, maka sering pula dikatakan bahwa kebijakan fiskal meliputi semua tindakan pemerintah yang berupa tindakan memperbesar atau memperkecil jumlah pungutan pajak memperbesar atau memperkecil “government expenditure” dan atau memperbesar atau memperkecil “government transfer” yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian.

1). Peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian

Peranan dari tindakan fiskal pemerintah dalam turut menentukan tingkat pendapatan nasional lebih besar. Untuk Negara-negara yang sudah maju perekonomiannya, peranan tindakan fiskal pemerintah semakin besar dalam mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional terutama dimaksudkan agar supaya pemerintah dapat lebih mampu dalam mempengaruhi jalannya perekonomian. Dengan demikian diharapkan bahwa dengan adanya kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengusahakan terhindarnya perekonomian dari keadaan-keadaan yang tidak diinginkan seperti misalnya keadaan dimana banyak pengangguran, inflasi, neraca pembayaran internasional yang terus menerus deficit, dan sebagainya.

2). Tujuan kebijakan fiskal

Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mencegah pengangguran dan menstabilkan harga, implementasinya untuk menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

b. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang digunakan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian pada kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan mengatur jumlah uang yang beredar (JUB) dan tingkat suku bunga. Kebijakan moneter tujuan

utamanya adalah mengendalikan jumlah uang yang beredar (JUB).

Tujuan utama kebijakan ekonomi moneter adalah untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dolar AS. Dengan demikian kebijakan ini juga dapat menjaga keseimbangan neraca pembayaran melalui perubahan nilai kurs rupiah yang terkendali bisa dicapai. Kebijakan ekonomi moneter dilakukan terutama melalui operasi pasar terbuka, penentuan mengenai cadangan wajib minimum dan batas maksimum pemberian kredit bagi sektor perbankan, dan perubahan tingkat suku bunga diskonto. Selain itu ada juga kebijakan moneter yang sering digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengimbangi perubahan likuiditas perekonomian adalah dengan cara memperjual-belikan surat berharga SBI dan SBPU. Efektifitas kebijakan moneter yang kontraksi ini untuk meredam laju pertumbuhan tingkat inflasi melalui pengendalian jumlah uang beredar di dalam ekonomi tergantung pada respon masyarakat dan dunia usaha, baik di sektor riil maupun di sektor keuangan.

c. Kebijakan Segi Penawaran

Kebijakan segi penawaran adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan, sehingga barang dan jasa yang ditawarkan lebih banyak dan lebih murah. Contohnya pemerintah memberikan bantuan subsidi kepada pengusaha kecil menengah.

Kebijakan fiskal dan moneter dapat dipandang sebagai kebijakan yang memengaruhi pengeluaran agregat. Dengan demikian kebijakan fiskal dan moneter merupakan kebijakan dari segi permintaan. Di samping melalui permintaan, kegiatan perekonomian juga dapat dipengaruhi dari segi penawaran. Kebijakan segi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan sehingga dapat menawarkan barang dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik.

Kebijakan segi penawaran lebih menekankan pada peningkatan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja (dengan mengurangi pajak pendapatan rumah tangga) dan peningkatan usaha para pengusaha untuk mempertinggi efisiensi kegiatan produksinya. Cara ini dilakukan pemerintah dengan memberi insentif kepada perusahaan yang melakukan inovasi, menggunakan teknologi yang canggih, dan pengembangan mutu barang yang diproduksi.

d. Kebijakan Energi

Kebijakan energi adalah kebijakan dalam menggunakan energi seefisien dan seoptimal mungkin yang didalamnya terdapat usaha penghematan energi. Misalnya kebijakan konfersi minyak tanah ke gas LPG guna penghematan penggunaan bahan bakar minyak oleh masyarakat.

Sumber daya energi yang terbatas, tetapi sejumlah kegiatan manusia berhubungan erat. Kelangkaan kebutuhan energi sumber daya manusia dan merupakan sepasang tak berujung kontradiksi dasar, kontradiksi yang dihasilkan atas dasar ekonomi, yang menyebabkan segala macam pilihan adalah objek studi ekonomi. British ekonom Harvey dalam “ilmu ekonomi modern” dan ekonomi bawah definisi langsung: “Ekonomi adalah studi tentang bagaimana orang mengalokasikan sumber daya mereka yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ilmu” Amerika ekonom Paul Samuelson Nordhaus dan co-penulis “Ekonomi” (edisi 12) dalam ekspresi ekonomi adalah: “Inti dari ekonomi mengakui realitas kelangkaan ada, dan untuk mempelajari bagaimana masyarakat diatur sehingga penggunaan yang paling efektif sumber daya. Ini adalah kontribusi yang unik untuk ekonomi.”

e. Kebijakan Penetapan Harga

Kebijakan penetapan harga adalah kebijakan dalam menentukan harga-harga pada tingkat tertentu pada komoditas yang menguasai hajat hidup orang banyak. Contohnya penetapan tarif dasar listrik oleh pemerintah.

Harga adalah suatu nilai yang harus di keluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan barang atau jasa yang memiliki nilai guna beserta pelayanannya

Tujuan penetapan harga : Harga bersifat fleksibel, dimana bisa disesuaikan. sebelum penetapan harga perusahaan harus mengetahui tujuan dari penetapan harga itu sendiri apabila tujuannya sudah jelas maka penetapan harga dapat dilakukan dengan mudah.

Dampak Positif Dan Negatif Kebijakan

1. Dampak Positif Pembangunan Ekonomi

Ketika pemerintah menetapkan sebuah kebijakan terutama di bidang pembangunan pasti membawa sebuah konsekuensi yang harus ditanggung.

Konsekuensi tersebut tidak hanya ditanggung oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan saja, namun juga terkadang rakyat harus ikut mengemban akibat yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut.

Berikut dampak positif dan negatif pembangunan ekonomi di Indonesia :

a. Akses Kemudahan Yang Bisa Dirasakan Semua Orang

Dampak positif dilakukannya pembangunan oleh pemerintah yang bisa kita rasakan saat ini salah satunya yaitu akses kemudahan. Dibangunnya sarana infrastruktur berupa tower-tower telekomunikasi dan jaringan provider, membuat semua orang bisa menikmati akses internet dengan bebas.

Selain itu, akses internet juga digunakan untuk mempermudah pelayanan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat. Misalnya saat ini pembayaran bisa dilakukan dengan sistem online. Kemudian dampak positif lain yang ditimbulkan dari pembangunan, saat ini dapat dirasakan bahwa sistem jaminan sosial yang semakin membaik.

Pembangunan di segala bidang turut menjamin jaminan sosial yang diberikan kepada masyarakat. Saat ini hampir semua orang dapat merasakan manfaat jaminan sosial baik jaminan kesehatan, pendidikan, hari tua, bahkan kematian. Hal tersebut bisa ikut dirasakan oleh setiap orang tanpa memandang pekerjaan orang tersebut.

b. Kualitas Lingkungan Yang Semakin Tertata

Dampak positif pembangunan ekonomi di Indonesia yang saat ini bisa dirasakan salah satunya yaitu peningkatan kualitas lingkungan ke arah yang lebih baik. Dampak Pembangunan Lingkungan yang tertata. Dibangunnya pemukiman penduduk bagi warga kurang mampu dinilai cukup mengurangi kawasan pemukiman kumuh, terutama di daerah kota besar seperti Jakarta. Pemukiman baru yang berbentuk rumah susun dinilai menghemat ruang dan kondisi menjadi lebih tertata. Lain dengan daerah perkotaan, di pedesaan pun saat ini dampak positif pembangunan sudah dapat dirasakan. Misalnya saat ini desa-desa diluar Pulau Jawa hampir semuanya telah teraliri listrik.

Hal tersebut jelas sangat bermanfaat bagi masyarakat desa sana. Selain itu, pembangunan jalan beraspal juga sedang gencar dilakukan untuk mempermudah arus transportasi, terutama di daerah-daerah yang lokasinya cukup terpencil dan terisolir.

- c. Karena adanya pertumbuhan ekonomi, pelaksanaan kegiatan perekonomian dalam sebuah negara akan semakin lancar dan terus membaik sehingga akan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat suatu negara. Contohnya seperti, perusahaan semakin banyak, banyaknya infrastruktur, taraf pendidikan semakin tinggi serta semakin meningkatnya teknologi.
- d. Pembangunan ekonomi yang semakin maju akan memperluas lapangan pekerjaan yang diperlukan masyarakat maka akan mengurangi jumlah pengangguran dalam negara tersebut.

- e. Ada dampak baik dari pembangunan ekonomi terhadap kegiatan perekonomian, yang dilakukan oleh suatu negara dan akan lebih dinamis serta seragam seperti perubahan perekonomian suatu negara dari ekonomi agraris berubah menjadi ekonomi industri
 - f. Semakin bertambahnya lapangan pekerjaan karena adanya pembangunan ekonomi secara langsung dan memiliki dampak yang baik pada pendapatan nasional.
 - g. Didalam lingkungan masyarakat, hidup menjadi lebih nyaman dan indah sebab selalu diadakan perbaikan dinegara tersebut.
 - h. Fasilitas umum dalam kehidupan masyarakat akan bertambah dan terpenuhi sebab selalu ditingkatkan.
2. Dampak Negatif Pembangunan Ekonomi

Selain dampak positif ternyata di sisi lain kegiatan pembangunan membawa dampak negatif. Salah satu yang saat ini kita rasakan yaitu semakin berkurangnya lahan pertanian produktif. Di tempat tertentu, lahan pertanian banyak yang dijadikan pabrik-pabrik besar, perumahan, dan gedung kantor. Ketika lahan pertanian semakin berkurang, maka secara otomatis ketersediaan pangan pun ikut berkurang.

a. Ekosistem Menjadi Terganggu

Pembangunan yang gencar dilakukan oleh pemerintah terutama pembangunan yang membuka lahan hutan, otomatis mengakibatkan ekosistem menjadi terganggu. Banyak satwa liar dan tanaman endemik yang mati bahkan saat ini terancam punah. Ditambah dengan kesadaran masyarakat yang kurang memperhatikan lingkungan semakin menambah terganggunya ekosistem.

Dampak Pembangunan Penutupan Lahan

- b. Hasil dari pembangunan ekonomi akan menimbulkan adanya kerusakan lingkungan hidup dalam sebuah masyarakat jika pembangunan ekonomi tersebut tidak terencana secara baik dan benar. Contohnya, dengan bermunculan pabrik-pabrik industri justru menimbulkan pencemaran Air, Udara dan lain-lain.

- c. Banyaknya industrialisasi akan menimbulkan kurangnya lahan pertanian di lingkungan masyarakat. Ada banyak lahan-lahan yang dipakai untuk industri sehingga lahan pertanian akan menjadi berkurang.
- d. Punahnya kehidupan alam baik habitat hewani dan hayati. Sebab semakin berkurangnya lahan pertanian sehingga habitat hayati seperti tumbuh-tumbuhan dan hewani akan berkurang.

Tapi pada dasarnya ada beberapa indikator keberhasilan dan kegagalan pembangunan ekonomi secara umum.

3. Perbedaan Pembangunan Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi

Perbedaan antara pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi dapat kita lihat dari hasilnya, pertumbuhan ekonomi mempunyai hasil yang sifatnya kualitatif yakni bukan hanya pada pertumbuhan produksi.

Akan tetapi bisa perubahan dalam alokasi input serta struktur produksi pada seluruh sektor dalam perekonomian seperti, teknik, sosial, lembaga dan pengetahuan. Sedangkan kalau pembangunan ekonomi tentunya mempunyai hasil yang sifatnya kuantitatif, yakni kenaikan dalam tingkat output produksi yang hasilnya bersumber dari kenaikan standar pendapatan.

4. Perbedaan Pembangunan dan Pertumbuhan

Perbedaan Dampak pembangunan ekonomi tersebut perlu diperhatikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Jangan sampai yang bekerja hanya satu sisi baik hanya pemerintah atau masyarakat saja.

Namun keduanya harus bersinergi untuk mencapai Indonesia menjadi yang lebih baik. Sebenarnya pembangunan ekonomi ini merupakan sebuah tindakan yang baik, ada banyak sekali dampak positifnya dari pada dampak negatifnya.

Sebab pembangunan ekonomi ini sangatlah penting sekali dalam suatu negara. Dengan adanya pembangunan ekonomi ini, diharapkan dapat terus meningkat sepanjang tahun untuk bisa menjadi negara yang maju. Dan poin pentingnya dalam pembangunan

ekonomi yang semakin terus lancar dan membaik dari tahun ketahun. Perekonomian dalam suatu negara bisa dinyatakan sudah berkembang jika pendapatan perkapita negara tersebut akan meningkat dari tahun ketahun.

Pembangunan ekonomi adalah suatu kegiatan aktif yang wajib dijalankan setiap negara. Terjadinya pembangunan ekonomi karena adanya beberapa faktor tertentu, akan tetapi pada hakikatny faktor-faktor tersebut dikelompokkan menjadi dua yakni faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Yang salah satu diantaranya faktor ekonomi yang begitu mempengaruhi pembangunan ekonomi yakni sumber daya manusia (SDM). Sumber daya alamnya antara lain, tanah, cuaca, tambang, iklim, hasil laut yang begitu mempengaruhi kegiatan industri dalam suatu negara, terutama sekali dalam hasil kegiatan produksi industri tersebut.

Namun sementara itu, kewirausahaan dan keahlian dipakai dalam mengelola bahan yang masih mentah dari alam menjadi suatu produk atau barang yang mempunyai nilai jual yang sangat tinggi.



BAB III

SISTEM EKONOMI INDONESIA

Konsep Sistem Ekonomi

Pengertian Sistem Ekonomi

Ekonomi Islam, menurut para pembangun dan penduduknya dibangun di atas atau setidaknya diwarnai oleh prinsip-prinsip religius, berorientasi dunia dan akhirat. Dalam tataran paradigma seperti ini, para ekonom muslim masih berada di dalam satu kata, atau setidaknya tidak ada perbedaan yang berarti.¹ Mayoritas ekonom muslim sepakat mengenai dasar pilar atau fondasi filosofi sistem ekonomi dalam *tauhid, khilafah, ibadah* dan *Takaful*,² kurshid Ahmad menambahkan *Rububiyyah* dan *tazkiyah*, Serta *masuliyyah (accountability)*. Akan tetapi, ketika dipertanyakan lebih lanjut: ada yang membagi mazhab ekonomi Islam menjadi tiga, yaitu mazhab baqirAs- Sadr, mazhab mainstream, dan mazhab alternatif-kritis. Akan tetapi, pengembangan pemikiran ketiga mazhab ini belum begitu gencar, kecuali masa mainstream, dan

¹ M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonomis, 2003, hal. 89-93

² Mohamed Aslem Hanef, *Contemporary Islamic Economic Thought: a Selected Comparative Analysis*, Kuala Lumpur: Ikrq, 1995, halm.2

masih menunggu pemikiran cerdas dan kreatif dari para pendukungnya untuk mengembangkan.

Sekalipun demikian, ekonomi Islam tidak lepas dari terapan kritik yang dilakukan oleh sejumlah ekonom. Pada umumnya, kritikan tersebut dikelompokkan oleh Arif, seperti yang dikutip oleh M. Hussein Sawit, menjadi tiga kelompok besar. *Pertama*, aliran yang mengatakan ekonomi Islam merupakan penyesuaian sistem kapitalis atau disebut *the adjusted capitalism school*. *Kedua*, kelompok konvensional atau *the conventional school*. *Ketiga*, kelompok perbedaan paham atau *the sectarian diversity school*.

ada juga pernyataan kritis yang sepintas tampak sederhana, tetapi cukup mendasar: Apakah ekonomi Islam merupakan kapitalisme minus riba atau sosialisme plus Islam? Kemudian, ada lagi kritik yang cukup tajam terhadap para ekonom Islam yang selama ini selalu mengkritik sistem ekonomi lain. Pernyataan kritis tersebut:

Secara keseluruhan, ekonomi Islam lebih berhasil menjelaskan apa yang bukan ekonomi Islam, daripada menentukan apa yang membuat ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi lain. Ekonomi Islam juga lebih banyak mengungkap kelemahan sistem lain daripada menunjukkan (bahwa ekonomi Islam) secara substansial memang lebih baik.

semua kritik yang diajukan pada ekonomi Islam menuntut para pendukungnya ditunjukkan untuk memberikan jawaban serius. Ada tiga penafsiran tentang istilah “ekonomi Islam”. *Pertama*, “ilmu ekonomi” yang berdasarkan nilai-nilai atau ajaran Islam. Kalau ini yang dimaksud, timbul kesan bahwa ajaran Islam mempunyai pengertian tersendiri mengenai “ekonomi”. Hal ini tentu akan diikuti dengan pertanyaan, Apakah yang dimaksud dengan ekonomi menurut ajaran Islam? Tepatnya, Apakah yang dimaksud dengan “ilmu ekonomi Islam”? di sini,⁷ dapat diajukan Beberapa definisi menurut ekonom muslim.

1. menurut Muhammad Abdul Mannan, “Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam”.

2. Menurut M.M. Metwally, “Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al Quran, Hadis, ijma’ dan qiyas.”
3. Menurut Hasanuzzaman, “Ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari anjuran dan aturan syari’aha Yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber sumber daya material sehingga tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka menjalankan perintah Allah dan masyarakat.”
4. menurut Akram Khan, “Ilmu Ekonomi Islam bertujuan melakukan studi terhadap kesejahteraan (falah) manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber sumber daya di bumi berdasarkan kerjasama dan partisipasi.”
5. Menurut Umar Chapra, “Ekonomi Islam sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber daya langka yang seirama dengan maqashid (tujuan-tujuan Syariah), tanpa mengekang kebebasan individu, menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkepanjangan, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial, serta jaringan moral masyarakat.”
6. Dewan Rahardjo berkesimpulan bahwa ilmu ekonomi Islam sebenarnya sama dengan ilmu ekonomi umumnya, yaitu perilaku manusia dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang menyangkut pilihan terhadap sumber daya yang sifatnya langka dan alokasi sumber daya tersebut ditunjukkan memenuhi kebutuhan manusia. Dalam Islam, tujuan kegiatan ekonomi hanya merupakan target untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kebahagiaan hidup didunia dan diakhirat, dengan melakukan ibadah kepada Allah SWT. Ilmu Ekonomi Islam memperhatikan dan menerapkan Syariah dalam perilaku ekonomi dan dalam pembentukan sistem ekonomi.

Kedua, yaitu ekonomi Islam dalam arti “sistem ekonomi”(Islam). sistem menyangkut pengaturan, Yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara berdasarkan metode tertentu. Misalnya, Bank Islam dapat disebut sebagai unit (terbatas) dari beroperasinya sistem ekonomi Islam, bisa dalam ruang lingkup makro

atau mikro. Bank Islam disebut unit sistem ekonomi Islam, khususnya doktrin larangan riba.

Ketiga, ekonomi Islam berarti perekonomian umat Islam atau perekonomian di dunia Islam. Disini, kita akan mendapat sedikit penjelasan dan gambaran dalam sejarah umat Islam, baik pada masa Nabi sampai sekarang. Misalnya, keadaan perekonomian umat Islam di Arab Saudi, Mesir, Irak, Iran, Indonesia, dan sebagainya, atau juga perekonomian umat Islam di negara non Islam, seperti Amerika, China, Perancis, dan sebagainya.

Kosakata “ekonomi” merupakan kosakata baru, dalam arti tidak dikenal pada masa awal Islam. Masa ini hanya mengenal istilah muamalah dalam arti luas, hubungan antar manusia secara umum: ekonomi, rumah tangga, dan lain-lain. istilah *Iqtishad* (bahasa Arab) yang diartikan atau disepadankan dengan “ekonomi” merupakan kosakata yang baru. Itulah sebabnya, kita tidak menemukan istilah tersebut pada literatur keislaman klasik, fiqh. Kalau kita telusuri, istilah *Iqtishad* muncul dari perkembangan pemikiran Muhammad Iqbal 1876-1938), salah seorang tokoh pembaruan Islam dari India. Pada tahun 1902, menerbitkan buku yang berjudul ilmu *Al iqtishad* (ilmu ekonomi).

Pemikiran tentang ekonomi Islam sebagai kajian teoritis mulai ramai dibicarakan pada awal dasawarsa 1970-an, walaupun pembahasan yang bersifat fiqh sudah tampak sebelumnya sebagai bagian dari pemikiran hukum Islam. pembahasan tentang bunga bank yang dikaitkan dengan konsep riba merupakan bagian yang penting dan selalu disebutkan. Oleh karena itu, gagasan mengenai Bank Islam berkembang terlebih dahulu dalam upaya menerapkan prinsip ekonomi Islam (*Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jilid 6, 2007, hlm.399). Tampaknya, pemikiran ekonomi Islam, di Indonesia khususnya, belum bergerak jauh dari tema perbankan (lembaga keuangan lainnya). Dengan demikian, pemikiran ekonomi Islam masih menunggu karya kreatif, ijtihad, para pendukungnya untuk mengembangkannya.³

Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah *sistem ekonomi* pancasila yang disebut juga demokrasi ekonomi. Landasan pokoknya

³ Ai Siti Farida, *system ekonomi Indonesia*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA 2011, hal. 53-56

pasal 33 ayat 1-4 UUD 1945 (hasil amandemen). Adapun hal-hal yang harus dihindari dalam sistem demokrasi ekonomi, yaitu sistem free fight liberalism, sistem etatisme, dan monopoli.

Beberapa pendapat para ahli yang terkait dengan sistem ekonomi antara lain :

1. Chester A Bemand mengatakan bahwa :

”Sistem ekonomi adalah suatu kesatuan yang terpadu yang secara kolektif yang di dalamnya ada bagian-bagian dan masing-masing bagian itu memiliki ciri dan batas tersendiri”.

2. Dumatry (1996) mengatakan bahwa :

*”**Sistem ekonomi** adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu ketahanan”.*

3. Gregory Grossman and M. Manu mengatakan bahwa :

”Sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari atas unit-unit dan agen-agen ekonomi, serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi melainkan juga sampai tingkat tertentu yang saling menopang dan mempengaruhi.”

4. Menurut M. Hatta :

*”**Sistem ekonomi** yang baik untuk diterapkan di Indonesia harus berdasarkan atas asas kekeluargaan”.*⁴

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas dapat penulis simpulkan bahwa sistem ekonomi bukan hanya sebagai sekumpulan komponen atau unit perekonomian tetapi merupakan sebuah penerapan yang dikembangkan oleh seperangkat masyarakat yang masing-masing memiliki ciri dan batas-batas tersendiri.

Sistem perekonomian adalah sistem yang dipakai oleh sebuah negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dikuasainya baik untuk perorangan ataupun instansi di negara itu. Perbedaan utama antara satu

⁴<http://www.sarjanaku.com/2011/03/sistem-ekonomi.html>

sistem ekonomi dengan sistem ekonomi yang lain yaitu bagaimana cara sistem itu mengelola faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu diizinkan memiliki seluruh faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut dikuasai oleh pemerintah.

Sistem perekonomian yang diterapkan oleh negara Indonesia adalah Sistem perekonomian Pancasila. Ini artinya sistem perekonomian yang dijalankan di Indonesia harus berpedoman pada Pancasila. Sehingga secara normatif Pancasila dan UUD 1945 adalah landasan idiil sistem perekonomian di Indonesia.

Sistem ekonomi adalah suatu aturan dan tata cara untuk mengatur perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk menraih suatu tujuan. Sistem perekonomian di setiap negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ideologi bangsa, sifat dan jati diri bangsa, dan struktur ekonomi.

System perekonomian pasar

Sistem ekonomi Pasar/Liberal/Kapitalis adalah sistem ekonomi dimana ekonomi diatur oleh kekuatan pasar (permintaan dan penawaran). Sistem ekonomi liberal merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan seutuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada setiap orang untuk memperoleh keuntungan yang seperti dia inginkan. Sistem ekonomi liberal banyak dianut negara-negara Eropa dan Amerika Serikat.

1. Ciri-ciri:
 - a. Menerapkan sistem persaingan bebas
 - b. Kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi
 - c. Peranan pemerintah dibatasi
 - d. Peranan modal sangat penting
2. Kelebihan:
 - a. Setiap individu bebas memiliki alat produksi sendiri
 - b. Kegiatan ekonomi lebih cepat maju karena adanya persaingan
 - c. Produksi didasarkan kebutuhan masyarakat
 - d. Kualitas barang lebih terjamin

3. Kelemahan:
 - a. Sulit terjadi pemerataan pendapatan.
 - b. Rentan terhadap krisis ekonomi
 - c. Menimbulkan monopoli
 - d. Adanya eksploitasi

Sistem Perekonomian Perencanaan (Etatisme / Sosialis)

Sistem ekonomi etatisme/sosialis merupakan sistem ekonomi dimana ekonomi diatur negara. Dalam sistem ini, jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah pusat. Dalam perekonomian ini yang menjadi dasar adalah Karl Marx, dia berpendapat bahwa apabila kepemilikan pribadi dihapuskan maka tidak akan memunculkan masyarakat yang berkelas-kelas sehingga akan menguntungkan semua pihak. Negara yang menganut sistem ini seperti Rusia, Kuba, Korea Utara, dan negara komunis lainnya.

1. Ciri-ciri:
 - a. Hak milik individu tidak diakui.
 - b. Seluruh sumber daya dikuasai negara.
 - c. Semua masyarakat adalah karyawan bagi negara.
 - d. Kebijakan perekonomian disusun dan dilaksanakan pemerintah.
2. Kelebihan:
 - a. Pemerintah lebih mudah ikut campur dalam pembentukan harga.
 - b. Kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata.
 - c. Pelaksanaan pembangunan lebih cepat.
 - d. Pemerintah bebas menentukan produksi sesuai kebutuhan masyarakat.
3. Kelemahan:
 - a. Individu tidak mempunyai kebebasan dalam berusaha
 - b. Tidak ada kebebasan untuk memiliki sumber daya.

Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran merupakan campuran atau perpaduan antara sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi sosialis. Pada sistem ekonomi campuran pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam perekonomian, namun pihak swasta (masyarakat) masih diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan.

1. Ciri-ciri:
 - a. Jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar.
 - b. Hak milik swasta atas alat produksi diakui, asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum.
 - c. Pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapatan.
 - d. Ada persaingan, tetapi masih ada kontrol pemerintah
2. Kelebihan:
 - a. Kestabilan ekonomi terjamin
 - b. Pemerintah dapat memfokuskan perhatian untuk memajukan sektor usaha menengah dan kecil
 - c. Adanya kebebasan berusaha dapat mendorong kreativitas individu
3. Kelemahan:
 - a. Sulit menentukan batas antara kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah dan swasta
 - b. Sulit menentukan batas antara sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta.

System perekonomian di Indonesia

Setiap negara menganut sistem ekonomi yang berbeda-beda terutama Indonesia dan Amerika Serikat, dua negara ini pun menganut sistem ekonomi yang berbeda. Awalnya Indonesia menganut sistem ekonomi liberal, yang mana seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Akan tetapi karena ada pengaruh komunisme yang

disebarkan oleh Partai Komunis Indonesia, maka sistem ekonomi di Indonesia berubah dari sistem ekonomi liberal menjadi sistem ekonomi sosialis.

Pada masa Orde Baru, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia diubah kembali menjadi sistem demokrasi ekonomi. Namun sistem ekonomi ini hanya bertahan hingga masa Reformasi. Setelah masa Reformasi, pemerintah melaksanakan sistem ekonomi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan. Sistem inilah yang masih berlaku di Indonesia. Berikut sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia dari masa Orde Baru hingga sekarang :

Sistem ekonomi demokrasi

Sistem ekonomi demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Pada sistem demokrasi ekonomi, pemerintah dan seluruh rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dengan demikian terdapat kerja sama dan saling membantu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

1. Ciri-ciri positif pada system ekonomi demokrasi:
 - a. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
 - b. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
 - c. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
 - d. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

- e. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
 - f. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
 - g. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
2. Ciri-ciri negatif pada sistem ekonomi demokrasi :
- a. Sistem free fight liberalism, yaitu sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan dan dapat menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain sehingga dapat menimbulkan kelemahan struktural ekonomi nasional.
 - b. Sistem etatisme, di mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
 - c. Persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

System ekonomi kerakyatan

Pemerintah bertekad melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi ini berlaku sejak tahun 1998. Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakatlah yang memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah yang menciptakan iklim yang bagus bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Ciri-ciri sistem ekonomi ini adalah :

1. Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat.
2. Memerhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup.
3. Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

4. Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja.
5. Adanya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.

Sistem Ekonomi Indonesia dalam UUD 1945

Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 **setelah amandemen:**

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.****)
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)⁵

Unsur unsur sistem ekonomi

Elemen-elemen Sistem Ekonomi

1. Unit-unit ekonomi seperti rumah tangga, perusahaan, serikat buruh, instansi pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi.
2. Pelaku-pelaku ekonomi seperti konsumen, produsen, buruh, investor dan pejabat-pejabat yang terkait.
3. Lingkungan Sumber Daya Alam (SDA) Dan Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Kapital (SDK), Sumber Daya Teknologi (SDT).

⁵ <https://sistempemerintahanindonesia.blogspot.com/2014/02/sistem-ekonomi-di-indonesia.html?m=1>

Fungsi Elemen Sistem Ekonomi

1. Masing-masing elemen (unit-unit ekonomi, pelaku-pelaku ekonomi) mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang harus dijalankan selama berlangsungnya proses kegiatan ekonomi, seperti fungsi-fungsi produksi, konsumsi, distribusi, investasi, regulasi.
2. Bagaimana hasil dari kegiatan ekonomi sangat tergantung bagaimana elemen-elemen sistem ekonomi tersebut menjalankan fungsinya. Dalam perjalanan fungsinya, setiap elemen bisa fungsional, bisa non fungsional atau disfungsional.

Hubungan antar Elemen Sistem Ekonomi

1. Unit-unit ekonomi, pelaku-pelaku ekonomi, SDA dan SDM saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola hubungan tertentu, sehingga menimbulkan proses kegiatan ekonomi.
2. Pola-pola hubungan tergantung dari sifat hubungan antar elemen, sebab hubungan-hubungan itu ada yang bersifat interelasi, interaksi dan interdependensi serta hubungan fungsional, kausal.
3. Dengan demikian proses kegiatan ekonomi bisa berlangsung secara efisien, tidak efisien atau produktif, kurang produktif, karena perbedaan dalam menjalankan fungsi elemen dan pola hubungan elemen.

Pranata (Institusi) Ekonomi

1. Karena adanya hubungan antar elemen maka timbul produk kegiatan ekonomi, yang berlangsung secara berulang-ulang dan teratur menurut pola tertentu, sebab ada mekanisme (prosedur) yang mengaturnya.
2. Mekanisme atau prosedur (aturan main) yang mengendalikan proses kegiatan ekonomi itu disebut institusi ekonomi yang terdiri dari :
 - a. Norma hidup, seperti norma agama, adat-istiadat, tradisi, etika profesi.
 - b. Peraturan hidup, seperti konstitusi (UUD), undang-undang, peraturan pemerintah (PP), Peraturan Daerah (Perda), Keputusan Presiden (Keppres), Surat Keputusan/ Surat Edaran Pejabat

Resmi, Perjanjian-perjanjian Bilateral/ Internasional.

- c. Pahami Hidup, seperti pandangan hidup, cara hidup, ideologi. (Grossman, Gregory, 1967).⁶

Tujuan Sistem Ekonomi

Tujuan sistem ekonomi suatu bangsa atau suatu negara pada umumnya meliputi empat tugas pokok:

1. Menentukan apa, berapa banyak dan bagaimana produk-produk dan jasa-jasa yang dibutuhkan akan dihasilkan.
2. Mengalokasikan produk nasional bruto (PNB) untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat, penggantian stok modal, investasi.
3. Mendistribusikan pendapatan nasional (PN), diantara anggota masyarakat : sebagai upah/ gaji, keuntungan perusahaan, bunga dan sewa.
4. Memelihara dan meningkatkan hubungan ekonomi dengan luar negeri. (Grossman, Gregory, 1967).⁷

Pendekatan Melalui Sistem Ekonomi

Beberapa pendekatan dalam ilmu ekonomi

Istilah sistem dalam dapat digunakan dalam pengertian bermacam – macam sesuai dengan lingkup masalahnya, diantaranya:

1. Sistem yang digunakan dalam arti metode atau tata cara untuk memahami suatu persoalan. Contoh: sistem mengetik sepuluh jari
2. Sistem yang menunjukkan adanya sekumpulan ide yang mengandung prinsip-prinsip, doktrin- doktrin, hukum- hukum yang tersusun dalam kesatuan logis. Contoh: sistem demokrasi liberal.
3. Kelebihan pendekatan sistem ekonomi

Pendekatan ekonomi melihat persoalan ekonomi secara utuh,

⁶ <https://contohdanfungsi.blogspot.com/2013/03/unsur-unsur-sistem-ekonomi.html?m=1>

⁷ https://sarjanaekonomi.co.id/sistem-ekonomi-pengertian-fungsi-macam-ciri-tujuan-terlengkap/#Tujuan_Sistem_Ekonomi

sehingga seluruh persoalan ekonomi yang dapat dilihat menyeluruh, sehingga fakta-fakta yang terkait terungkap secara lengkap.

4. Perbandingan sistem sistem ekonomi

Sistem ekonomi yang dikenal

Kapitalisme

a. Ciri ciri kapitalisme

- 1). Pengakuan yang luas atas hak hak pribadi
 - a). Pemilikan alat alat produksi ditangan individu
 - b). Individu bebas memilih pekerjaan yang di pandang baik bagi dirinya.
- 2). Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar
- 3). Motif yang menggerakkan perekonomian mencari laba

b. Kebaikan dari kapitalisme

- 1). Lebih efisien dalam memanfaatkan sumber daya
- 2). Kreativitas masyarakat menjadi tinggi
- 3). Pengawasan politik dan sosial minimal

c. Kelemahan dari kapitalisme

- 1). Tidak ada persaingan sempurna
- 2). Sistem harga gagal mengalokasikan sumber sumber secara efisien

d. Kecenderungan bisnis dan kapitalisme

- 1). Adanya spesialisasi
- 2). Adanya produksi masa
- 3). Adanya perusahaan berskala besar
- 4). Adanya perkembangan penelitian

Sosialisme

a. Ciri ciri sosialisme

- 1). Mengutamakan kebersamaan
- 2). Pemerintah sangat kuat
- 3). Sifat manusia ditentukan oleh pola produksi

- b. Kelemahan dari sosialisme
 - 1). Teori pertentangan tidak berlaku untuk umum
 - 2). Tidak ada kebebasan memilih pekerjaan
 - 3). Tidak ada insentive untuk bekerja keras
 - 4). Tidak menjelaskan bagaimana mekanisme ekonomi

Sistem ekonomi Indonesia

Sistem adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan satu sama lain, yang memiliki batas yang menseleksi baik macamnya ataupun banyaknya input yang masuk maupun output yang keluar.⁸

kelebihan pendekatan sistem ekonomi

Beberapa dengan pendekatan teori ekonomi yang melihat persoalan-persoalan ekonomi secara “terkotak-kotak” maka pendekatan sistem ekonomi melihat persoalan ekonomi secara utuh, sistem ekonomi dipandang sebagai suatu totalitas. Dengan demikian setiap persoalan ekonomi yang kita hadapi, kita lihat secara menyeluruh – dilihat dari kelima unsur sistem ekonomi – sehingga seluruh fakta yang berkaitan dengan persoalan tersebut bisa terungkap secara lengkap.

Salah satu konsep pokok dalam teori sistem adalah : “Keseluruhan bukan hanya jumlah dari pada bagian-bagian”, (jadi keseluruhan bisa melebihi jumlah dari bagian-bagian). Karena itu penerapan cara pendekatan sistem bisa membantu kita mencapai suatu efek sinergistik (synergistic effect), dimana tindakan-tindakannya berbagai bagian yang berbeda dalam sistem itu yang dipersatukan, menghasilkan efek yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah dari pada bagian-bagian yang beraneka ragam itu.

Istilah “sistem” dapat dipergunakan dalam pengertian bermacam-macam sesuai dengan lingkup persoalan yang dihadapi, diantaranya adalah : Istilah “sistem” yang dipergunakan dalam arti metode atau tata cara untuk memahami sesuatu persoalan atau sesuatu pekerjaan. Contohnya sistem mengetik sepuluh jari, sistem Buku Ajar dalam

⁸ <https://www.slideshare.net/mobile/erlia83/pendekatan-melalui-sistem-ekonomi>

pengajaran.

Istilah “sistem” yang menunjukkan adanya sekumpulan (himpunan) gagasan-gagasan (ide); yang mengandung prinsip-prinsip, doktrin-doktrin, hukum-hukum, yang tersusun terorganisasikan dalam satu kesatuan yang logik. Contohnya seperti sistem demokrasi liberal, sistem ekonomi kapitalis.

Istilah sistem (sistem ekonomi) di sini dipergunakan dalam pengertian yang pertama. Istilah sistem ekonomi yang tersusun dari lima unsur sebagaimana diuraikan di atas digunakan sebagai konsep pendekatan, sebagai salah satu alat analisis dalam memahami persoalan ekonomi, khususnya memahami persoalan ekonomi Indonesia.

Selama ini kita telah terbiasa memahami persoalan-persoalan ekonomi dengan pendekatan Teori Ekonomi Mikro, Teori Ekonomi Makro, Teori Keuangan dan lain-lain. Umumnya kita belum biasa menggunakan pendekatan sistem (system approach) untuk memahami dan memecahkan persoalan-persoalan ekonomi.

Tujuan dari pengajaran teori pada umumnya dan teori ekonomi mikro, teori ekonomi makro pada khususnya, yaitu inter alia, menunjukkan cara-cara untuk menangkap dan menyederhanakan serta memecahkan permasalahan yang dihadapi secara sistematis. Untuk maksud ini disamping perlu uraian tentang konsep-konsep guna mencari hubungan sebab-akibat (causal) atau interdependensi antara semua unsur-unsur yang terkandung dalam konsep itu secara verbal, dipergunakan pula alat-alat analisa grafis dan matematis (Sudarsono, 1983).



BAB IV

SEKTOR MONETER, PERBANKAN, PEMBIAYAAN

Sektor ekonomi di Indonesia

Perkembangan Sektor Pertanian

Sektor pertanian hingga kini masih menjadi sumber mata pencaharian utama sebagian besar penduduk program pembangunan sektor pertanian meliputi program peningkatan produksi di kelima subsektornya serta peningkatan pendapatan petani pekebun peternak dan nelayan program pembangunan tersebut ditunjang dengan program pembangunan sarana dan prasarana seperti pengadaan dan kelancaran faktor produksi pengembangan jaringan irigasi dan Jalan kebijaksanaan Tata niaga dan harga serta penelitian kemajuan paling menonjol sektor ini selama ppgi adalah dalam bidang produksi pangan yakni keberhasilan mencapai beras pada tahun 1984 sebelumnya bahan makanan pokok ini masih harus selalu diimpor bahkan pada tahun 1970 Indonesia merupakan negara pengimpor beras terbesar di dunia ini berdampak penting pada meningkatnya kualitas gizi pendapat masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.

Sampai dengan tahun 1990 sektor pertanian masih merupakan penyumbang utama dalam membentuk produk domestik bruto namun sesudah itu posisi tersebut diambil alih oleh sektor industri pengolahan hal ini sesungguhnya memprihatinkan bukan karena sektor pertanian tidak berkembang melainkan mengingat masih demikian besarnya proporsi tenaga kerja yang bekerja di sektor tersebut sampai dengan tahun 1992 saja tercatat lebih dari Separuh tenaga kerja kita bekerja di sektor ini tambahan pula kualitas sumber daya manusia yang bekerja di sektor pertanian dan umumnya relatif rendah sehingga produktivitas rendah pada gilirannya pendapat mereka juga rendah dalam skala makro rendahnya produktivitas tenaga kerja suatu sektor dapat diukur dengan membandingkan proporsi sektor itu dalam menyerap Tenaga Kerja dan dalam menyumbang produksi atau pendapat nasional pada gilirannya pendapat mereka juga rendah dalam skala makro rendahnya produktivitas tenaga kerja satu sektor dapat diukur dengan produksi atau pendapat nasional pada tahun 1992 sektor pertanian menyerap 53% tenaga kerja sementara sumbangannya dalam membentuk PDB menurut harga yang berlaku sebesar 19,52% hal itu berarti setiap satu persen tenaga kerja pertanian Indonesia hanya menyumbang sekitar 0,36% PDB

Sejarah Dan Klasifikasi Di Indonesia

Pada sekitar tahun 1920 Industri Modern ini hampir semuanya dimiliki oleh orang asing meskipun jumlahnya relatif sedikit industri kecil yang ada pada masa itu hanya berupa industri rumah tangga seperti penggilingan padi tekstil dan sebagainya yang tidak terkoordinasi dan tenaga kerja terpusat di sektor pertanian dan perkebunan untuk memenuhi kebutuhan ekspor pemerintah kolonial perusahaan besar yang modern hanya ada 2 buah itupun milik asing yaitu pabrik rokok milik British dan perkaitan kendaraan bermotor milik generall motorcar depresi besar yang melanda sekitar tahun 1930 telah meruntuhkan perekonomian penerimaan ekspor turun dari 1,448 juta tahun 1929 menjadi 505 juta sehingga mengakibatkan pengangguran situasi ini tersebut memaksa pemerintah kolonial Mengubah sistem dan pola kebijaksanaan ekonomi dari menitikberatkan pada sektor perkebunan ke sektor industri dengan

memberikan kemudahan dalam pemberian izin dan fasilitas bagi pendirian industri baru.

Menurut sensus industri kolonial pertama 1939 industri yang ada ketika itu telah memperkerjakan tenaga kerja sebanyak 173 ribu orang yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan tekstil serta barang-barang logam semuanya milik asing meskipun sumber dan struktur investasi pada masa itu tidak terkoordinasi dengan baik tetapi menurut sebuah taksiran stok investasi total di Indonesia pada tahun 1937 lebih kurang sebesar 2264 juta lebih dari separuhnya 411 juta dimiliki oleh sektor swasta pada masa perang dunia kedua kondisi industrialisasi cukup baik namun keadaan yang berbalik semasa pendudukan Jepang hal itu disebabkan adanya larangan impor bahan mentah diangkutnya barang-barang kapital ke Jepang dan pemaksaan tenaga kerja Romusha sehingga investasi asing pada masa itu praktis nihil 15 tahun kemudian setelah merdeka Indonesia menjadi pengimpor besar barang kapital dan teknologi serta mulai memprioritaskan pengembangan sektor industri dan menawarkan investasi asing berat kebijaksanaan itu penanaman modal asing mulai berdatangan meskipun masih dalam taraf coba-coba.

Pada tahun 1951 pemerintah meluncurkan kebijaksanaan RUP program utamanya menumbuhkan dan mendorong industri kecil bagi pribumi sembari memberlakukan pembatasan pembatasan untuk industri industri besar atau Industri Modern yang banyak dimiliki oleh orang Eropa dan China kebijaksanaan ternyata menyebabkan investasi asing berkurang apalagi dengan adanya situasi politik yang sedang bergelolak Pada masa itu namun di lain pihak telah memicu tumbuhan suburnya sektor bisnis oleh kalangan pribumi Kendati masih relatif kecil menyadari situasi demikian pemerintah kemudian beralih ke pola kebijaksanaan yang menitikberatkan pengembangan industri yang dijalankan atau dimiliki oleh pemerintah.

Sesudah tahun 1957 sektor industri mengalami stagnasi dan perekonomian mengalami masa Teduh sepanjang tahun 1960 sektor industri praktis tidak berkembang selain akibat situasi politik yang selalu bergolak juga disebabkan karena kelangkaan modal dan akibat situasi politik yang selalu bergolak juga disebabkan karena kelangkaan modal

dan tenaga ahli serta tampil aliran modal yang masuk mayoritas dari negara-negara sesali dalam bentuk pinjaman hampir setengah dari rusia pada masa itu perekonomian benar-bener dalam keadaan sulit akibat inflasi yang parah dan berkepanjangan menurutnya produk domestik bruto kecilnya peran sektor industri hanya sekitar 10% dan tingginya angka pengangguran sektor industri didominasi oleh industri industri berat seperti pabrik baja di Cilegon dan pabrik superfosfat di Cilacap keadaan ini terwariskan ke pemerintahan orde baru yang kemudian berusaha mengubah pola kebijaksanaan ekonomi yang demikian kompleks dengan antara lain mengundang investor asing untuk menanam modal.

Sektor Transportasi

Pengertian transportasi berasal dari kata latin yaitu *transportare*, dimana *trans* berarti seberang atau sebelah lain dan *portare* berarti mengangkut atau membawa. Jadi, transportasi berarti mengangkut atau membawa (sesuatu) kesebelah lain atau dari suatu tempat ketempat lainnya. Ini berarti transportasi merupakan suatu jasa yang diberikan guna menolong orang dan barang untuk dibawa dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dengan demikian, transportasi dapat diberi definisi sebagai usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan atau penumpang dari suatau tempat ke tempat lainnya. Dalam transportasi terdapat dua kategori yaitu: Pertama : pemindahan bahan-bahan dan hasil-hasil produksi dengan menggunakan alat angkut, Kedua : mengangkut penumpang dari suatu tempat ketempat lain

Fungsi Transportasi

Alat transportasi memiliki beberapa fungsi utama bagi manusia. Adapun beberapa fungsi transportasi adalah sebagai berikut:

1. Sebagai alat untuk memudahkan kegiatan manusia sehari-hari.
2. Sebagai alat untuk melancarkan proses perpindahan manusia dan atau barang keperluan manusia.
3. Sebagai media yang dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di daerah tertentu.

4. Sebagai media yang dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional melalui bisnis jasa transportasi.

Jenis-jenis Transportasi

1. Transportasi Darat

Transportasi darat terdiri dari dua kelompok, yaitu:

- a. Transportasi Jalan Raya

Ini merupakan kendaraan yang beroperasi dengan menggunakan jalan aspal/ beton. Beberapa prasarana yang dibutuhkan adalah jalan raya, jembatan, halte, rambu lalu lintas, dan lainnya. Alat transportasi jalan raya diantaranya:

- 1). Mobil, baik mobil penumpang maupun mobil angkutan.
- 2). Sepeda motor, kendaraan roda dua dengan motor penggerak yang sangat banyak digunakan masyarakat Indonesia.
- 3). Sepeda, kendaraan roda dua yang digerakkan oleh manusia.

- b. Kereta Api/ Listrik

Ini adalah kendaraan yang bergerak dengan menggunakan bahan bakar batu bara atau daya listrik, dimana arah lajunya sesuai dengan rel. Alat transportasi ini sangat populer digunakan karena selain karena lebih ekonomis, kereta api juga cukup cepat dan bebas macet. Beberapa prasarana yang dibutuhkan adalah rel kereta api, stasiun kereta, rambu kereta, rangkaian listrik, dan lainnya.

2. Transportasi Udara

Transportasi udara adalah kendaraan yang melakukan operasinya di udara, baik mengangkut manusia, hewan, maupun barang. Prasarana yang dibutuhkan transportasi udara adalah bandara udara, operator penerbangan, dan lainnya.

3. Transportasi Air

Transportasi air adalah semua kendaraan yang dapat melakukan operasinya di atas permukaan air, seperti perahu, kapal laut, feri,

dan lainnya. Prasarana angkutan air yang paling dibutuhkan adalah pelabuhan sebagai tempat untuk mengangkut penumpang atau barang.

Alasan Kenapa sektor Transportasi Sangat Penting Bagi Perekonomian Indonesia

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat dan perkembangan wilayah baik itu daerah perdesaan maupun daerah yang lainnya. Sistem transportasi yang ada dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi di daerah ini menyebabkan pengurangan konsentrasi tenaga kerja yang mempunyai keahlian dan ketrampilan pada wilayah tertentu, selain itu transportasi juga untuk membuka peluang kegiatan perdagangan antar wilayah dan mengurangi perbedaan antar wilayah sehingga mendorong terjadinya pembangunan antar wilayah. Dengan adanya transportasi harapannya dapat menghilangkan isolasi dan memberi stimulan ke arah perkembangan di semua bidang kehidupan, baik perdagangan, industri maupun sektor lainnya merata di semua daerah.

Transportasi sangat penting peranannya bagi daerah baik itu perdesaan atau daerah semi urban atau urban di negara-negara yang sedang berkembang, karena menyediakan akses bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa sehari-hari, serta meningkatkan kehidupan sosial ekonomi. Akses terhadap informasi, pasar, dan jasa masyarakat dan lokasi tertentu, serta peluang-peluang baru kesemuanya merupakan kebutuhan yang penting dalam proses pembangunan.

Dengan dibangunnya sarana transportasi, kegiatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pembangunan pada kawasan yang mempunyai potensi ekonomi tinggi akan lebih mudah dikembangkan. Kegiatan ekonomi masyarakat ini akan berkembang apabila mempunyai prasarana dan sarana transportasi yang baik untuk aksesibilitas. Aksesibilitas ini dapat memacu proses interaksi

antar wilayah sampai ke daerah yang paling terpencil sehingga tercipta pemerataan pembangunan.

Data pendapatan sektor Transportasi

Analisis Supply Chain Indonesia (SCI) menunjukkan sektor transportasi Indonesia pada tahun 2018 didominasi oleh sub sektor angkutan darat (jalan) dengan kontribusi sebesar 53,15% dan diikuti angkutan udara (36,10%). Angkutan-angkutan lainnya memberikan kontribusi rendah, yaitu angkutan laut (6,77%), angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (2,41%), dan angkutan rel (1,57%). Kontribusi kelima sub sektor transportasi tersebut terhadap PDB tahun 2018 sebesar Rp 666,2 triliun atau meningkat sebesar Rp 50,7 triliun (8,23%) dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 615,5 triliun. Dari kelima sub sektor transportasi itu, angkutan rel (kereta api) menunjukkan perubahan kontribusi tertinggi, yaitu sebesar 14,16% dari 9,17 triliun pada 2017 menjadi 10,46 triliun pada 2018.

SCI memprediksi sektor transportasi Indonesia pada tahun 2019 akan tumbuh sebesar 11,15% menjadi Rp 740,4 triliun. Kontributor tertinggi masih dari angkutan darat sebesar Rp 380,8 triliun (51,43%) dan angkutan udara sebesar Rp 282,2 triliun (38,12%). Angkutan laut berkontribusi sebesar 6,50% angkutan darat (jalan), angkutan sungai, danau, dan penyeberangan sebesar 2,30% dan angkutan rel sebesar 1,66%.

Walaupun angkutan darat berkontribusi tertinggi, namun tingkat pertumbuhan tertinggi pada tahun 2019 diprediksi pada angkutan udara (17,37%) dan angkutan rel (17,11%). Pertumbuhan angkutan-angkutan lainnya diprediksi di bawah 10%, yaitu angkutan darat (jalan) 7,55%, angkutan laut sebesar 6,65%, serta angkutan sungai, danau, dan penyeberangan sebesar 6,24%.

Kontribusi setiap angkutan atau moda transportasi yang tidak berimbang tersebut menunjukkan ketidakseimbangan penggunaan moda-moda transportasi di Indonesia. Hal ini berpotensi terhadap inefisiensi proses dan biaya transportasi dan logistik yang berdampak terhadap harga produk dan komoditas. Selain mempengaruhi daya saing nasional, untuk beberapa wilayah tertentu, hal ini berdampak terhadap

ketersediaan produk dan komoditas, serta disparitas harga antar wilayah.

Pemerintah dan para pihak terkait perlu mendorong peningkatan peranan moda-moda transportasi secara berimbang untuk mewujudkan sistem transportasi multimoda secara terintegrasi dengan transportasi laut sebagai *backbone*. Sistem transportasi yang sesuai dengan karakteristik geografis Indonesia ini akan mendorong efisiensi sistem logistik nasional.

PERKEMBANGAN TRANSPORTASI

Perkembangan transportasi sekarang membawa dampak kehidupan yang lebih baik. Menjamurnya kendaraan Mini Bus Trayek Manyaran – Wonogiri memudahkan orang untuk bepergian ke mana saja. Berbisnis ke pasar, kerja kantor, ke sekolah dan tempat tujuan lainnya. Sekarang penumpang tidak perlu berjubel atau bergelantungan di pintu. Bahkan anak-anak sekolah malah mempunyai langganan sendiri. Biasanya anak sekolah memilih minibus yang ada fasilitas musiknya yang njepler.

Tapi semakin banyaknya armada minibus Manyaran – Wonogiri akhir-akhir ini, menjadi satu fenomena tersendiri. Mungkin minibus itu akan terus bertambah jumlahnya. Tapi ironisnya penumpang yang menggunakan alat transportasi ini sepertinya semakin merosot jumlahnya. Kita lihat saja berapa kali min-bus itu berseliweran setiap harinya dengan menyisakan banyak bangku jog yang masih kosong. Kemudian kernet dan sopir sudah kompak akan berlama-lama ngetem menunggu para pengguna jasa atau penumpang.

Mana yang benar melihat realitas ini? Para pengguna jasa transportasi yang berkurang atau terlalu banyaknya armada yang terus bermunculan? Yang namanya para penumpang menurut hemat saya masih tetap ada. Apalagi jam-jam tertentu terutama jam anak sekolah pulang pergi. Mungkin terasa berkurang penghasilan yang diporelah para bala roda. Dan minimnya setoran pada pemilik atau pengusaha transportasi menjadi beban para sopir untuk kejar setoran.

Masalah berkurangnya para pengguna jasa ini mungkin salah satunya disebabkan semakin banyaknya orang menggunakan kendaraan

pribadi. Sekarang ini betapa mudahnya mendapatkan kredit motor, dengan begini orang cenderung lebih mudah untuk memiliki kendaraan pribadi. Dan sekarang para perantau Manyaran kalau pulang kampung sudah banyak yang memakai kendaraan pribadi. Lihat saja kalo saat lebaran, berapa kendaraan bernomer polisi Jakarta.

Sektor pertambangan Indonesia

Barang tambang adalah suatu sumber daya alam yang berasal dari dalam perut bumi yang sifatnya tidak dapat diperbaharui karena pembentukannya membutuhkan waktu yang lama bahkan sampai berjuta juta tahun. Pertambangan dilkuksn manusia dengan menggali, mengambil, dan mengolah sumber daya alam yang terdapat di perut bumi untuk memenuhi sebagian kebutuhan manusia. Kegiatan pertambangan tidak terbatas pada upaya penggalian dan pengambilan saja, tapi juga meliputi upaya-upaya pengolahan sumber daya tersebut untuk dijadikan barang setengah jadi sebagai bahan dasar industri.

Macam-Macam Barang Tambang

Secara garis besar barang tambang bisa dikelompokkan menjadi dua yaitu sebagai berikut.

1. Berdasarkan Manfaat atau Kegunaannya

Berdasarkan manfaat atau kegunaannya, barang tambang bisa dibedakan ke dalam tiga golongan. Yaitu sebagai berikut :

- a. Golongan A, yakni barang tambang strategis dan penting untuk perekonomian negara. Contoh : minyak bumi, batu bara, gas alam, bijih besi, tembaga, dan nikel.
- b. Golongan B, yakni jenis barang tambang yang vital dan penting bagi kehidupan orang banyak. Contoh : emas, perak, belerang, fosfat dan mangan.
- c. Golongan C, yakni jenis barang tambang yang secara langsung dipakai untuk bahan keperluan industri. Contoh : batu gamping, kaloin, marmer, gips, dan batu apung.

2. Berdasarkan Bentuknya

Berdasarkan bentuknya barang tambang dikelompokkan menjadi tiga yaitu sebagai berikut :

- a. Barang tambang berbentuk energi, yakni jenis barang tambang yang bisa menghasilkan tenaga atau energi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya : minyak bumi, batu bara, gas alam, dan uranium.
- b. Barang tambang berbentuk mineral logam. Contohnya : timah, tembaga, bijih besi, emas, perak, dan nikel.
- c. Barang tambang berbentuk mineral bukan logam. Contohnya : intan, belerang, gamping, marmer, pasir kwarsa, dan fosfat.

Selain dari pengelompokan di atas, barang tambang bisa dikelompokkan berdasarkan bahan asal pembentukannya yaitu mineral organik dan mineral anorganik.

1. Mineral organik yaitu mineral yang berasal dari sisa makhluk hidup misalnya gas alam, minyak bumi, dan batu bara.
2. Mineral anorganik yaitu mineral yang berasal dari sisa-sisa bahan anorganik misalnya kaloin, batu, pasir kwarsa, dan yodium.

Proses Terbentuknya Barang Tambang

1. Melalui proses Konsentrasi Magma.
2. Proses Sublimasi yaitu suatu proses yang terjadi melalui penguapan langsung kemudian diikuti dengan pengendapan biji dari uap tersebut pada temperatur dan uap yang rendah.
3. Proses Hydrothermal yaitu suatu proses diferensiasi magma yang menyusup keatas menjauhi dapur magma. Perubahan temperature menyebabkan gas magma tersebut berubah menjadi air panas.
4. Proses Endapan Sedimen yaitu suatu endapan yang terbentuk dari proses pengendapan berbagai macam mineral yang sudah mengalami pelapukan dari batuan asalnya.

5. Proses Metamorfosis atau Metamorfosa yaitu suatu proses yang terjadi diakibatkan oleh adanya suatu perubahan pada unsur-unsur kimia yang terjadi pada batuan.

Ekspor Hasil Pertambangan

Perkembangan ekspor hasil pertambangan mengalami peningkatan berat yang sangat signifikan terutama pada tahun 2013 sebesar 581.521,9 ribu ton dan sedikit mengalami penurunan di tahun 2014 hingga 2015, yang kemudian naik kembali di tahun 2016 hingga tahun 2018 yang masing-masing mencapai 387.496,1 ribu ton, 409.551,7 ribu ton dan 469.921,2 ribu ton. Hal ini disinyalir terkait Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, yang mewajibkan pemegang IUP melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri (pasal 103 ayat 1). Kewajiban ini dilakukan paling lambat 5 tahun sejak undang-undang ini diterbitkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Sementara pemegang kontrak karya yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian selambat-lambatnya lima tahun sejak undang-undang ini diundangkan (pasal 170). Artinya 5 tahun setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terbit, ekspor bijih (*ore*) tidak boleh dilakukan lagi. Bagi pemerintah Indonesia, waktu lima tahun hingga 2014 lebih dari cukup untuk merealisasikan seratus persen kebijakan hilirisasi tersebut. Kenyataannya setelah tiga tahun UU Minerba dicanangkan sejak 2012, kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri belum juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Sebaliknya, volume ekspor mineral justru naik.

Tabel Berat Bersih dan Nilai Ekspor Hasil Pertambangan Tahun 2012-2018

Tahun	Berat Bersih (ribu ton)	Nilai (juta US\$)	% Perubahan Nilai
2012	483.700,4	31.322,9	-9,57
2013	5821.521,9	31.154,3	-0,54
2014	428.882,9	22.827,7	-26,73
2015	381.931,0	19.456,0	-14,77
2016	387.496,1	18.164,8	-6,64
2017	409.551,7	24.303,8	-33,80
2018	469.921,2	29.286,0	20,50

Sebanyak 81,84 persen ekspor hasil pertambangan Indonesia pada tahun 2018 adalah batu bara dan lignit, dan 17,87 persen adalah pertambangan bijih logam. Ekspor pertambangan minyak bumi dan gas alam dan panas bumi serta pertambangan dan penggalian lainnya masing-masing nilai ekspornya kurang dari 1 persen dari total ekspor hasil pertambangan.



Gambar Negara Tujuan Utama Ekspor Hasil Pertambangan 2017-2018

Indonesia memiliki letak geografis yang strategis untuk pasar negara-negara seperti Tiongkok dan India. Permintaan untuk batu bara kualitas rendah dari kedua negara ini telah naik tajam karena banyak

pembangkit listrik bertenaga batu bara baru yang telah dibangun untuk mensuplai kebutuhan listrik penduduknya yang besar.

Batu bara

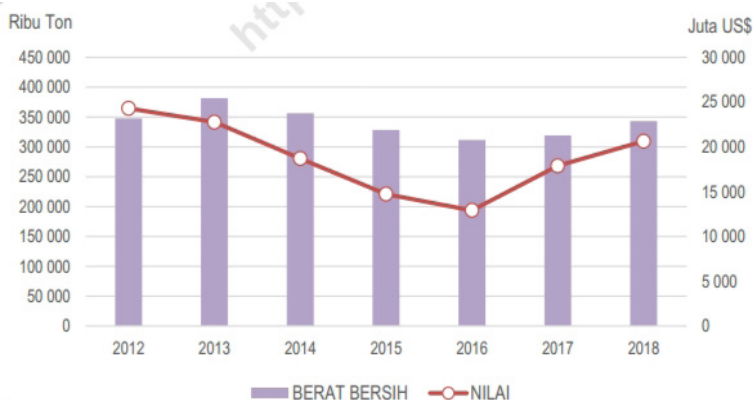
Batu bara merupakan bahan bakar fosil. Batu bara dapat terbakar, terbentuk dari endapan, batuan organik yang terutama terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Batu bara terbentuk dari tumbuhan yang terkonsolidasi antara strata batuan lainnya dan diubah oleh kombinasi pengaruh tekanan dan panas selama jutaan tahun sehingga membentuk lapisan batu bara.

Indonesia adalah salah satu produsen dan eksportir batu bara terbesar di dunia. Sejak tahun 2005, Indonesia sudah menjadi eksportir terdepan batu bara thermal. Porsi signifikan dari batu bara thermal yang diekspor terdiri dari jenis kualitas menengah (antara 5100 dan 6100 cal/gram) dan jenis kualitas rendah (di bawah 5100 cal/gram) yang sebagian besar permintaannya dari Tiongkok dan India. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, cadangan batu bara Indonesia diperkirakan habis kira-kira dalam 83 Tahun mendatang apabila tingkat produksi saat ini diteruskan. Berdasarkan *BP Statistical Review of World Energy*, cadangan batu bara global Indonesia saat ini menempati peringkat ke-10 dengan sekitar 3,1 persen dari total cadangan batu bara global. Sekitar 60 persen dari cadangan batu bara total Indonesia terdiri dari batu bara kualitas rendah yang lebih murah (sub bituminous) yang memiliki kandungan dari 6100 cal/gram.

Tabel Perkembangan Ekspor Batu Bara Tahun 2012-2018

Tahun	Berat Bersih (ribu ton)	Nilai (juta US\$)	% Perubahan Nilai
2012	347.504,5	24.288,2	-4,79
2013	381.384,2	22.759,7	-6,29
2014	356.302,8	18.697,7	-17,85
2015	328.387,4	14.717,3	-21,29
2016	311.329,8	12.914,6	-12,25
2017	319.098,4	17.877,0	38,42
2018	343.124,2	20.631,4	15,41

Sejak tahun 2012 sampai 2014 terlihat tren berat bersih ekspor batu bara meningkat. Hal ini terjadi selain disebabkan faktor internal yaitu UU Minerba juga disebabkan oleh peningkatan produksi dan ekspor batu bara di Indonesia karena batu bara adalah kekuatan dominan di dalam pembangkit listrik. Paling sedikit 27 persen dari total output energi dunia dan lebih dari 39 persen dari seluruh listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik bertenaga batu bara, karena kelimpahan jumlah batu bara, proses ekstrasinya yang relatif mudah dan murah dan persyaratan-persyaratan infrastruktur yang lebih murah dibandingkan dengan sumber daya energi lainnya.



Gambar Nilai dan Berat Bersih Ekspor Batu Bara Tahun 2012-2018

Tahun 2015 dan 2016 berat ekspor batu bara terlihat menurun. Penurunan ini terjadi selain karena lambatnya pertumbuhan ekonomi

global (penurunan besar-besaran perekonomian Tiongkok), penurunan permintaan komoditas, mungkin ada juga faktor lain yang berperan. Pada era boom komoditas 2000-an, banyak perusahaan pertambangan baru didirikan di Indonesia, sementara perusahaan-perusahaan tambang yang sudah ada meningkatkan investasi untuk memperluas kapasitas produksi mereka. Hal ini menyebabkan kelebihan suplai yang sangat besar selanjutnya diperburuk oleh antusiasme para penambang batu bara di tahun 2010-2013 untuk memproduksi dan menjual batu bara sebanyak mungkin karena rendahnya harga batu bara global dalam rangka menghasilkan pendapatan dan keuntungan.

Perkembangan nilai ekspor batu bara dalam kurun waktu 2012-2018, memperlihatkan adanya fluktuasi. Peningkatan nilai ekspor tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 38,42 persen dan pada tahun 2018 sebesar 15,41 persen. Jika dilihat dari beratnya, berat ekspor batu bara mengalami peningkatan pada tahun 2012-2013. Pada tahun 2013 beratnya mencapai 381.384,2 ribu ton, namun di tahun 2014 hingga tahun 2016 mengalami penurunan sehingga secara berturut-turut pada ketiga tahun tersebut beratnya mencapai 356.302,8 ribu ton, 328.387,4 ribu ton, dan 311.329,8 ribu ton. Pada tahun 2018 berat ekspor batu bara naik kembali hingga mencapai US\$343.124,2 ribu ton atau mengalami peningkatan sebesar 7,53 persen.

Pada tahun 2012, nilai ekspor batu bara mengalami penurunan sebesar 4,79 persen menjadi US\$24.288,2 juta. Tahun 2013 dan tahun 2014 ekspor batu bara juga mengalami penurunan masing-masing sebesar 6,29 persen dan 17,85 persen. Kondisi ini terus berlanjut hingga tahun 2016 dengan penurunan di tahun tersebut sebesar 12,25 persen. Tahun 2017 nilai ekspor batu bara mengalami peningkatan sebesar 38,42 persen dengan nilai sebesar US\$17.877,0 juta. Selanjutnya pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan sebesar 15,41 persen dengan nilai mencapai US\$20.631,4 juta.

Pada tahun 2017 negara tujuan ekspor komoditas batu bara adalah India sebesar US\$4.714,3 juta, Jepang US\$2.505,9 juta, Tiongkok US\$2.714,6 juta, Korea Selatan US\$2.045,1 juta dan Malaysia US\$1.626,0 juta. Nilai ekspor India, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan dan Malaysia pada tahun 2018 masing-masing mengalami peningkatan sebesar 13,91

persen, 11,21 persen, 1,68 persen, 11,65 persen dan 22,98 persen jika dibandingkan dengan tahun 2017.

Lignit

Lignit atau juga dikenal dengan sebutan batu bara coklat, adalah jenis batu bara yang paling rendah kualitasnya. Pada tahun 2012 ekspor lignit nilainya mencapai US\$1.878,1 juta. Namun pada tahun 2013 ekspor lignit mengalami penurunan 7,27 persen dengan nilai US\$1.741,6 juta.

Tabel Perkembangan Ekspor Lignit Tahun 2012-2018

Tahun	Berat Bersih (ribu ton)	Nilai (juta US\$)	% Perubahan Nilai
2012	36.802,7	1.878,1	10,16
2013	42.941,0	1.741,6	-7,27
2014	51.935,6	2.121,5	21,81
2015	38.583,0	1.281,7	-39,59
2016	58.247,0	1.613,0	25,85
2017	70.431,8	2.596,3	60,69
2018	85.937,4	3.336,7	28,52

Ekspor lignit kembali mengalami penurunan di tahun 2015 sebesar 39,59 persen dibandingkan pada tahun 2014. Pada tahun 2016 sampai tahun 2018 nilai ekspor komoditas ini mengalami peningkatan masing-masing sebesar 25,85 persen, 60,96 persen dan 28,52 persen.

Negara Tujuan (1)	Juta US\$					Peranan thd Total %				
	2014 (2)	2015 (3)	2016 (4)	2017 (5)	2018 (6)	2014 (7)	2015 (8)	2016 (9)	2017 (10)	2018 (11)
Tiongkok	2 028.1	1 180.8	1 534.3	2 397.9	3 105.2	95,60	92,13	95,12	92,36	93,06
Spanyol	0,0	0,0	1,1	20,4	106,5	0,00	0,00	0,07	0,79	3,19
Korea Selatan	2,9	38,6	43,8	122,1	61,2	0,14	3,01	2,71	4,70	1,83
India	68,6	19,3	8,9	16,3	21,3	3,23	1,51	0,55	0,63	0,64
Singapura	0,0	0,0	0,0	12,3	15,4	0,00	0,00	0,00	0,47	0,46
Total Lignit	2 121.5	1 281.7	1 613.0	2 596.3	3 336.7	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Gambar Ekspor Lignit Menurut Negara Tujuan Utama dan Peranannya 2014-2018

Tiongkok merupakan negara tujuan ekspor lignit Indonesia. Lebih dari 90 persen komoditas ini diserap oleh Tiongkok. Tahun 2015 ekspor lignit ke Tiongkok mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya,

sehingga nilainya mencapai US\$1.180,8 juta dan kembali meningkat di tahun 2017 menjadi US\$2.397,9 juta. Tahun 2018 nilai ekspor ke Tiongkok mencapai US\$3.105,2 juta yang merupakan perolehan tertinggi dari ekspor lignit sepanjang tahun 2014–2018. Di posisi kedua, ekspor ke Spanyol menyumbang devisa yang cukup baik dalam dua tahun terakhir, tahun 2017 tercatat sebesar US\$20,4 juta dan meningkat di tahun 2018 menjadi US\$106,5 juta.

Bijih Logam

Sumber logam adalah bijih-bijih logam yang diperoleh dari penambangan biasanya masih bercampur dengan bahan-bahan ikutan lainnya, persentase berat dari unsur-unsur yang terkandung didalam bijih-bijih ini bergantung pada kedalaman lapisan tanah dari mana bijih tersebut diperoleh.

Bijih Tembaga

Salah satu komoditas utama bijih logam dari sektor pertambangan adalah bijih tembaga. Komoditas ini tiap tahunnya memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap total nilai ekspor sektor pertambangan. Nilai ekspor bijih tembaga tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 44,80 persen dengan nilai US\$2.594,7 juta. Namun di tahun 2013 nilai ekspor bijih tembaga mengalami peningkatan sebesar 15,88 persen dengan nilai sebesar US\$3.006,8 juta.

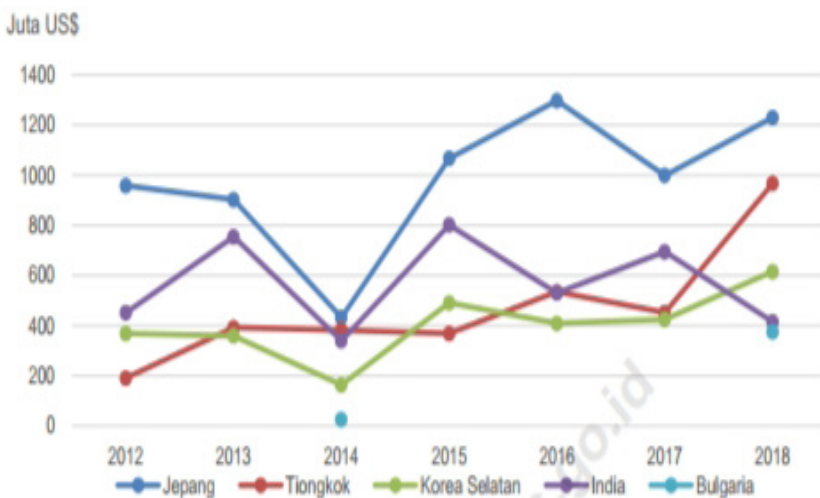
Tabel Perkembangan Ekspor Bijih Tembaga Tahun 2012-2018

Tahun	Berat Bersih (ribu ton)	Nilai (juta US\$)	% Perubahan Nilai
2012	1.123,5	2.594,7	-44,80
2013	1.453,7	3.006,8	15,88
2014	715,0	1.683,6	-44,01
2015	1.711,4	3.277,2	94,65
2016	1.912,9	3.481,6	6,24
2017	1.539,8	3.439,6	-1,21
2018	1.597,8	4.186,7	21,72

Tahun 2014 nilai ekspor komoditas ini kembali menurun baik nilai maupun beratnya. Nilai dan berat ekspor bijih tembaga pada

tahun tersebut masing-masing sebesar US\$1.683,6 juta dan 715,0 ribu ton, kemudian nilainya meningkat di tahun 2015 sebesar 94,65 persen sehingga mencapai US\$3.277,2 juta. Ekspor bijih tembaga kembali mengalami peningkatan baik nilai dan berat di tahun 2016, nilai dan berat ekspor bijih tembaga pada tahun 2016 masing-masing sebesar US\$3.481,6 juta dan 1.912,9 ribu ton.

Di tahun 2017 ekspor bijih tembaga mengalami penurunan sebesar 1,21 persen dengan nilai US\$3.439,6 juta, dan tahun 2018 ekspornya naik sebesar 21,72 persen sehingga nilainya mencapai US\$4.186,7 juta.



Gambar Negara Tujuan Utama Ekspor Bijih Tembaga Tahun 2012-2018

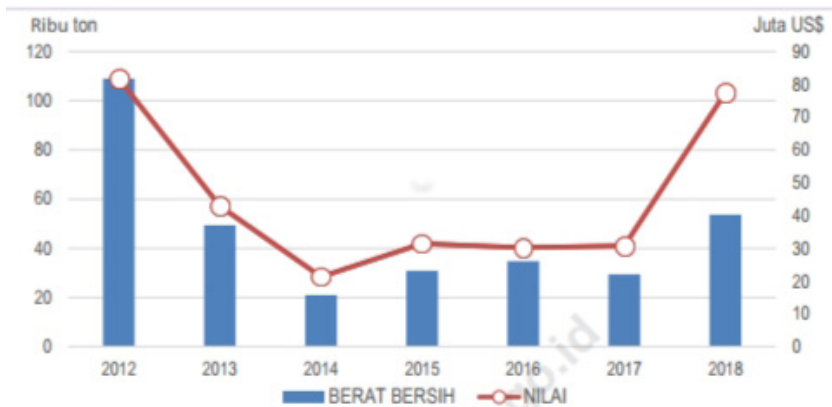
Beberapa negara tujuan utama untuk komoditas ini di tahun 2018 adalah Jepang; Tiongkok; Korea Selatan; India; dan Bulgaria dengan nilai ekspor masing-masing US\$1.229,7 juta; US\$966,5 juta; US\$615,0 juta; US\$415,0 juta dan US\$375,0 juta. Pada Gambar 6.3 terlihat bahwa pada tahun 2018 ekspor ke Jepang, Tiongkok dan Korea Selatan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017. Sedangkan ekspor ke India mengalami penurunan.

Bijih Zirconium, Nobium dan Tantalum

Perkembangan ekspor bijih zirconium, nobium dan tantalum dari tahun 2012 sampai tahun 2018 cukup berfluktuatif baik dari segi nilai maupun

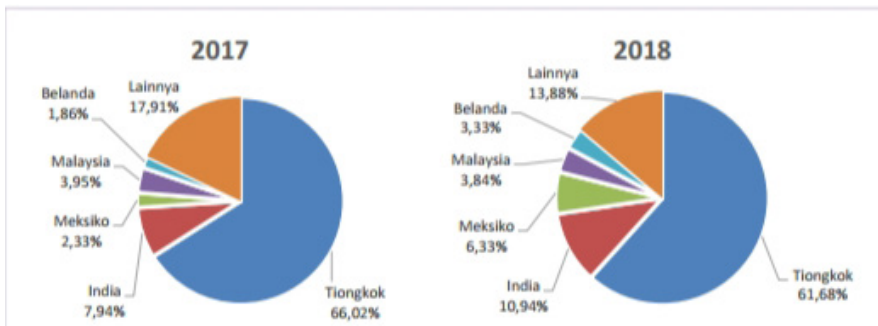
beratnya. Di tahun 2012 nilainya meningkat 43,83 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2014 nilai ekspor menurun 50,25 persen dari tahun sebelumnya dan nilainya mencapai US\$21,3 juta. Tahun 2015 ekspor komoditas ini kembali meningkat sebesar 47,59 persen sehingga nilainya menjadi US\$31,4 juta.

Pada tahun 2016 terdapat tekanan harga komoditas yang menyebabkan penurunan nilai ekspor dari komoditas ini sebesar 3,93 persen dan nilainya mencapai US\$30,2 juta. Tahun 2017 nilai ekspor komoditas ini mengalami peningkatan sebesar 1,86 persen dengan nilai US\$30,8 juta walaupun secara berat turun menjadi 29,5 ribu tondibandingkan pada tahun 2016 sebesar 34,8 ribu ton. Peningkatan yg cukup signifikan terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 151,57 persen dan nilainya mencapai US\$77,4 juta.



Gambar Nilai dan Berat Bersih Ekspor Bijih Zirconium, Nobium dan Tantalum Tahun 2012-2018

Pada tahun 2017 Tiongkok menyerap ekspor komoditas bijih zirconium, niobium dan tantalum sebesar 66,02 persen dengan nilai mencapai US\$20,3 juta, disusul India sebesar 7,94 persen dengan nilai US\$2,4 juta, sementara Meksiko hanya sebesar 2,33 persen saja. Tahun 2018 ekspor bijih zirconium, niobium dan tantalum Indonesia ke Tiongkok nilainya mencapai US\$47,7 juta atau meningkat sebesar 135,03 persen. Namun demikian share-nya mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017, yaitu menjadi 61,68 persen.



Gambar Ekspor Bijih Zirconium, Nobium dan Tantalum Menurut Negara Tujuan Utama Tahun 2017-2018

Selain Tiongkok, pasar ke India, Meksiko dan Malaysia tahun 2018 tumbuh positif. Pada tahun 2018, ekspor Indonesia ke India sebesar US\$8,5 juta, Meksiko sebesar US\$4,9 juta dan ekspor ke Malaysia US\$3,0 juta.

Bijih Seng

Pada tahun 2012 ekspor komoditas bijih seng mengalami penurunan sebesar 36,47 persen dengan nilai mencapai US\$0,7 juta. Pada tahun 2013 ekspor bijih seng mengalami kenaikan sebesar 108,09 persen dengan nilai mencapai US\$1,4 juta. Pada tahun 2014 nilai ekspor bijih seng kembali mengalami penurunan sebesar 25,13 persen.

Pada tahun 2015 ekspor bijih seng mengalami peningkatan yang cukup tajam yaitu sebesar 1.790,76 persen, dengan nilai mencapai US\$19,7 juta. Namun pada tahun 2016 nilai ekspornya kembali mengalami penurunan sebesar 64,09 persen. Pada tahun 2017 dan 2018 nilai ekspor komoditas ini mengalami peningkatan baik dari segi berat maupun nilai. Berat ekspor komoditas ini pada tahun 2017 sebesar 27,7 ribu ton dengan nilai US\$19,5 juta, dan pada tahun 2018 beratnya mencapai 40,1 ribu ton dengan nilai US\$30,0 juta. Sepanjang tahun 2012 hingga 2018, negara utama dan satu-satunya yang menjadi tujuan ekspor bijih seng adalah negara Tiongkok.

Pertambangan dan Penggalian Lainnya

Penggalian adalah suatu kegiatan yang meliputi pengambilan segala jenis barang galian. Barang galian adalah unsur kimia, mineral dan segala macam batuan yang merupakan endapan alam (tidak termasuk logam, batubara, minyak bumi dan bahan radio aktif). Bahan galian ini biasanya digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong sektor industri maupun konstruksi. Hasil kegiatan penggalian antara lain, batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu marmer, pasir, pasir silika, pasir kuarsa, kaolin, tanah liat, dan lain-lain.

Batu Kerikil

Pada tahun 2012 ekspor komoditas batu kerikil meningkat tajam sebesar 158,70 persen dan nilainya mencapai US\$45,2 juta. Selanjutnya tahun 2013 nilai ekspornya kembali meningkat 89,93 persen. Namun pada tahun 2014 nilai ekspor komoditas batu kerikil mengalami penurunan 14,89 persen sehingga nilainya menjadi US\$73,1 juta.



Pada tahun 2015 nilai ekspor batu kerikil mengalami penurunan 8,01 persen dari tahun sebelumnya sehingga nilainya menjadi US\$67,2 juta. Kondisi ini terus berlanjut hingga tahun 2018. Ekspor komoditas ini terus mengalami penurunan dari sisi nilai. Tahun 2016, 2017 dan 2018 nilai ekspor komoditas ini mencapai US\$57,3 juta, US\$54,8 juta dan US\$54,6 juta.

Tabel Perkembangan Ekspor Batu Kerikil Tahun 2012-2018

Tahun	Berat Bersih (juta ton)	Nilai (juta US\$)	% Perubahan Nilai
2012	5.363,1	45,2	158,70
2013	10.395,3	85,8	89,93
2014	10.011,5	73,1	-14,89
2015	9.806,4	67,2	-8,01
2016	11.868,7	57,3	-14,73
2017	9.608,7	54,8	-4,34
2018	9.478,2	54,6	-0,36

Pangsa pasar utama komoditas batu kerikil pada tahun 2018 adalah Singapura. Pada tahun 2018 sebanyak 95,06 persen ekspor batu kerikil Indonesia dikirim ke Singapura. Nilai ekspor ke Singapura tertinggi terjadi pada tahun 2013 yang mencapai US\$85,7 juta, selanjutnya nilai ekspor ke Singapura terus menurun hingga tahun 2018 nilainya hanya mencapai US\$51,9 juta.

Tabel Ekspor Batu Kerikil Menurut Negara Tujuan Utama 2012-2018

Negara	Nilai (ribu US\$)						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Singapura	44.354,6	85.625,7	71.927,1	64.855,9	55.351,0	51.951,2	51.932,2
Taiwan	0,0	0,0	215,9	1.228,1	827,5	790,2	820,4
Brunei Darussalam	0,0	0,0	516,4	0,0	143,6	396,1	447,4
Australia	0,0	183,1	229,1	297,6	283,5	343,7	404,1
Lainnya	839,2	0,0	169,0	824,2	704,1	1.344,1	1.026,4

Batu Hias dan Batu Bangunan

Perkembangan ekspor batu hias dan batu bangunan mulai tahun 2012 sampai tahun 2018 hampir selalu mengalami penurunan baik dari segi nilai maupun beratnya, kecuali di tahun 2017 yang sempat mengalami kenaikan. Pada tahun 2012 nilai ekspor batu hias dan batu bangunan

menurun sebesar 32,03 persen sehingga nilainya menjadi US\$35,7 juta. Penurunan ini juga diikuti tahun 2013, 2014 dan 2015 yang masing-masing turun sebesar 40,99 persen; 28,79 persen dan 34,25 persen.

Tahun 2016 nilai ekspornya kembali menurun sebesar 32,72 persen, sehingga nilai ekspor komoditas ini hanya mencapai US\$6,6 juta. Pada tahun 2017 nilai ekspor batu hias dan batu bangunan meningkat 31,10 persen dengan nilai US\$8,7 juta. Namun nilai ekspornya mengalami penurunan kembali di tahun 2018 sebesar 14,35 persen dengan nilai mencapai US\$7,4 juta.

Tabel Perkembangan Ekspor Batu Hias dan Batu Bangunan Tahun 2012-2018

Tahun	Berat Bersih (ribu ton)	Nilai (juta US\$)	% Perubahan Nilai
2012	2.464,8	35,7	-32,03
2013	836,3	21,0	-40,99
2014	157,1	15,0	-28,79
2015	70,6	9,9	-34,25
2016	48,5	6,6	-32,72
2017	58,6	8,7	31,10
2018	50,1	7,4	-14,35

Negara tujuan ekspor batu hias dan batu bangunan pada tahun 2015 sampai tahun 2018 urutannya adalah Tiongkok, Taiwan, Vietnam, Jepang dan Malaysia. Selama periode 2015–2018 Tiongkok menduduki urutan pertama ekspor batu hias dan batu bangunan, walaupun nilainya fluktuatif dari tahun ke tahun. Nilai ekspor ke Tiongkok pada tahun 2015 sebesar US\$8.663,0 ribu; tahun 2016 sebesar US\$5.973,7 ribu; tahun 2017 sebesar US\$7.918,5 ribu dan tahun 2018 sebesar US\$6.710,2 ribu. Berada di urutan kedua adalah nilai ekspor ke Taiwan. Pada tahun 2015 dengan nilainya sebesar US\$881,1 ribu, tahun 2016 sebesar US\$479,2 ribu, tahun 2017 sebesar US\$514,0 ribu dan tahun 2018 sebesar US\$306,4 ribu.

Tabel Ekspor Batu Hias dan Batu Bangunan Menurut Negara Tujuan Utama 2015-2018

Negara	Nilai (ribu US\$)			
	2015	2016	2017	2018
Tiongkok	8.663,0	5.973,7	7.918,5	6.710,2
Taiwan	881,1	479,2	514,0	306,4
Vietnam	26,9	0,0	12,2	138,6
Jepang	32,4	38,9	72,8	84,0
Malaysia	66,9	9,1	33,7	62,7

Zirconium Silikat

Keberadaan zircon di Indonesia telah dikenal sejak lama di perairan Bangka-Belitung sebagai endapan alluvial bersama pasir timah dan mineral ikutan lainnya. Di samping itu, zircon juga terdapat di sepanjang aliran sungai pedalaman Kalimantan Tengah bersama endapan alluvial emas. Zircon dari daerah Bangka-Belitung hingga awal tahun 2000 masih dianggap sebagai sisa pengolahan bijih timah yang tidak diperhatikan namun secara rutin dapat memberikan hasil yang memadai. Sementara itu potensi yang signifikan zircon di Kalimantan Tengah baru dilakukan eksplorasi pada tahun 2007, sehingga dapat diharapkan sebagai sumber bahan baku jangka panjang.

Tabel Perkembangan Ekspor Zirconium Silikat Tahun 2012-2018

Tahun	Berat Bersih (ton)	Nilai (ribu US\$)	% Perubahan Nilai
2012	0,1	0,0	-100,00
2013	240,0	346,9	8.672.275,00
2014	3.184,5	4.131,6	1.091,03
2015	3.576,0	4.687,7	13,46
2016	3.931,3	4.806,2	2,53

2017	2.836,3	3.519,6	-26,77
2018	3.263,8	5.404,8	53,56

Tahun 2013 menjadi titik terang ekspor komoditas ini, ekspor zirconium silikat mengalami peningkatan sehingga nilai ekspornya mencapai US\$346,9 ribu dan terus meningkat hingga tahun 2016 mencapai US\$4.806,2 ribu. Namun pada tahun 2017 ekspor komoditas ini menurun sebesar 26,77 persen dengan nilai mencapai US\$3.519,6 ribu. Nilai ekspor zirconium silikat mengalami peningkatan kembali pada tahun 2018 sebesar 53,56 persen dan nilainya mencapai US\$5.404,8 ribu.

Peningkatan ekspor zirconium silikat ditopang oleh peningkatan ekspor komoditas ini ke India. Nilai ekspor ke India pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang signifikan, dari tahun sebelumnya sebesar US\$70,7 ribu menjadi US\$1.100,7 ribu. Seperti halnya India, ekspor zirconium silikat ke Korea Selatan pun mengalami peningkatan di tahun 2018. Pada tahun 2018 nilai ekspornya tercatat US\$991,0 ribu dari tahun, padahal tahun sebelumnya hanya mencapai US\$56,2 ribu.

Peningkatan nilai ekspor zirconium silikat juga terjadi ke Taiwan yaitu sebesar 7,18 persen dan nilainya mencapai US\$653,9 ribu pada tahun 2018. Ekspor ke Tiongkok juga cenderung terus mengalami peningkatan, kecuali ditahun 2016 mengalami penurunan sebesar US\$119,5 ribu.

Peran Sektor Moneter

Peran sektor moneter di Indonesia dapat dilihat dari sejarah perkembangan inflasi di Indonesia dimana pada tahun 1997 Indonesia mengalami laju inflasi yang tinggi, yang menyebabkan kehidupan masyarakat di Indonesia menjadi terpuruk.

Namun akhirnya masa yang suram dapat terlewati. Perekonomian semakin membaik seiring dengan kondisi politik yang stabil pada masa reformasi. Sejalan dengan itu, tahun 1999 merupakan tonggak bersejarah bagi bank Indonesia dengan dikeluarkannya undang-undang no. 23

tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 3 tahun 2004. Dalam undang-undang ini, Bank Indonesia ditetapkan sebagai lembaga tinggi negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenang.

Sesuai undang-undang tersebut, Bank Indonesia diwajibkan untuk menetapkan target inflansi yang akan dicapai sebagai landasan bagi perencanaan dan pengadiln moneter. Berikut kebijakan / tindakan yang diambil untuk mengendalikan inflansi diindonesia .

Bank indonesia telah menempuh berbagai upaya untuk mencapai sasaran inflansi yaitu:

1. Menyerap kelebihan likuiitas untuk meredam melemahnya nilai tukar rupiah terhadap inflansi BI berupa menyerap kelebihan likuiitas melalui instrumen operasi pasar terbuka.
2. Melakukan sterilisasi valuta asing BI melakukan kebijakan pembatasan transaksi rupiah oleh yang bukan penduduk Indonesia.
3. Mengurangi ekspektasi inflansi yang tinggi BI menetapkan sasaran inflansi yang rendah pada awal tahun.⁹

Perkembangan Uang Primer dan Uang Yang Beredar

1. Pengertian Uang Primer

Uang primer disebut sebagai uang inti atau uang bibit, reserve money, base money, fresh money, atau high power money. Istilah-istilah itu memiliki pengertian yang sama. Uang Primer adalah uang kertal ditambah persediaan atau reserve masyarakat yang disimpan pada bank sentral.

Uang primer merupakan inti atau bibit dari proses penciptaan uang. Baikuang kertal maupun uang giral. Uang primer ini merupakan kewajiban otoritas moneter dalam hal ini adalah Bank Indonesia

2. Pengertian Uang Yang Beredar

⁹ <http://yuliarahma24.blogspot.com/2014/04/perekonomian-indonesia-sektor-moneter.html?m=1>

a. Uang Beredar Dalam Arti Sempit (M1),

(Natsir,2014:31)M1 didefinisikan sebagai kewajiban sistem moneter terhadap sektor swasta domestik yang terdiri dari uang kartal dan uang giral. Uang kartal terdiri dari uang kertas dan uang logam yang beredar dan berlaku dimasyarakat.

Sementara itu uang giral adalah merupakan simpanan milik sektor swasta domestik di Bank Pencipta Uang Giral (BPUG) yang setiap saat dapat ditarik untuk ditukarkan dengan uang kartal. Uang giral terdiri dari: rekening giro, kiriman uang(transfer) yang belum diambil, deposito berjangka yang sudah jatuh tempo dalam rupiah yang semuanya dimiliki oleh penduduk serta disimpan dalam sistem moneter.

$$M1 = \text{uang kartal} + \text{uang giral}$$

b. Uang Beredar Dalam Arti Luas (M2)

M2 didefinisikan sebagai kewajiban moneter terhadap sektor swasta domestik yang terdiri dari uang kartal (C), uang giral (D) dan uang kuasi (T). Dengan kata lain :

$$M2 = M1 + \text{uang kuasi (T)}$$

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa jumlah uang yang beredar mencakup semua mata uang kertas dan uang logam yang beredar dimasyarakat diluar peti simpanan (kas) lembaga-lembaga keuangan dan pemerintah dan rekening giro pada lembaga deposit (bank umum) yang dimiliki perorangan dan perusahaan. Secara teoritis dan empiris asda beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuai jumlah uang yang beredar ,antara lian adalah peran yang dimainkan oleh bnag sentral karena lembaga ini yang bertanggung jawab atas perilaku jumlah uang beredar dalam jangka panjang. Faktor yang lainnya dalah yang primer dan penggandaan Uang.

Peran Sektor Perbankan

Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan (perbankan dan sistem pembayaran). Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan, tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas moneter dan stabilitas keuangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kebijakan moneter memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan begitu pula sebaliknya, stabilitas keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan moneter. Sistem keuangan merupakan salah satu alur transmisi kebijakan moneter, sehingga bila terjadi ketidakstabilan sistem keuangan maka transmisi kebijakan moneter tidak dapat berjalan secara normal. Sebaliknya, ketidakstabilan moneter secara fundamental akan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan akibat tidak efektifnya fungsi sistem keuangan. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa stabilitas sistem keuangan juga masih merupakan tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia.

Pertanyaannya, bagaimana peran Bank Indonesia dalam memelihara stabilitas sistem keuangan?. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki lima peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan yaitu: Pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat, akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut inflation targeting framework.

Kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme

pengawasan dan regulasi. Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh sebab itu, kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian. Untuk mencegah terjadinya kegagalan tersebut, sistem pengawasan dan kebijakan perbankan yang efektif haruslah ditegakkan. Selain itu, disiplin pasar melalui kewenangan dalam pengawasan dan pembuat kebijakan serta penegakan hukum (law enforcement) harus dijalankan. Bukti yang ada menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan disiplin pasar, memiliki stabilitas sistem keuangan yang kokoh. Sementara itu, upaya penegakan hukum (law enforcement) dimaksudkan untuk melindungi perbankan dan stakeholder serta sekaligus mendorong kepercayaan terhadap sistem keuangan. Untuk menciptakan stabilitas di sektor perbankan secara berkelanjutan, Bank Indonesia telah menyusun Arsitektur Perbankan Indonesia dan rencana implementasi Basel II.

Ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (*failure to settle*) pada salah satu peserta dalam sistem sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan risiko yang bersifat menular (*contagion risk*) sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik. Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi risiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat. Antara lain dengan menerapkan sistem pembayaran yang bersifat real time atau dikenal dengan nama sistem RTGS (*Real Time Gross Settlement*) yang dapat lebih meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran. Sebagai otoritas dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki informasi dan keahlian untuk mengidentifikasi risiko potensial dalam sistem pembayaran.

Keempat, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara macroprudential, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (*potential shock*) yang berdampak pada stabilitas

sistem keuangan. Melalui riset, Bank Indonesia dapat mengembangkan instrumen dan indikator macroprudential untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan. Hasil riset dan pemantauan tersebut, selanjutnya akan menjadi rekomendasi bagi otoritas terkait dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk merendam gangguan dalam sektor keuangan.

Kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort (LoLR). Fungsi LoLR merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai LoLR mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik. Pada kondisi normal, fungsi LoLR dapat diterapkan pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas temporer namun masih memiliki kemampuan untuk membayar kembali.

Peran bank itu sendiri sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hampir semua sektor usaha sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam melakukan transaksi keuangan.¹⁰

Dalam menjalankan fungsinya sebagai LoLR, Bank Indonesia harus menghindari terjadinya moral hazard. Oleh karena itu, pertimbangan risiko sistemik dan persyaratan yang ketat harus diterapkan dalam penyediaan likuiditas tersebut.

Peran Pasar Modal dalam Perekonomian Indonesia

Pasar modal merupakan salah satu sumber alternative pendanaan baik bagi pemerintah maupun swasta. Pemerintah yang membutuhkan dana dapat menerbitkan obligasi atau surat utang dan menjualnya ke masyarakat melalui pasar modal. Demikian juga swasta yang dalam hal ini adalah perusahaan yang membutuhkan dana dapat menerbitkan efek, baik dalam bentuk saham maupun obligasi dan menjualnya ke masyarakat melalui pasar modal.

¹⁰ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari teori menuju aplikasi*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), hlm. 2.

Pasar modal sebagaimana pasar pada umumnya adalah suatu tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli. Yang membedakannya dengan pasar lainnya adalah pada objek yang diperjualbelikan. Pasar modal/*Capital Market/ Stock Exchange/Stock Market* dalam pengertian klasik diartikan sebagai suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi atau efek-ehkpada umumnya. Sementara out, Pasar modal menurut Kamus Hukum Ekonomi diartikan sebagai pasar atau tempat bertemunya penjual dan pembeli yang memperdagangkan surat-surat berharga jangka panjang, misalnya saham dan obligasi.

Istilah pasar modal (*capital Market*) berarti suatu tempat atau sistem bagaimana cara dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dana untuk capital suatu perusahaan, merupakan pasar tempat orang membeli atau menjual surat efek yang baru dikeluarkan.

Adapun dalam undang-undang Pasar Modal (UUPM), yaitu Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Angka 13 menjelaskan, Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Pasar Modal dapat didefinisikan sebagai pasar yang memperjual belikan berbagai instrument keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk utang mauun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta. Dengan demikian pasar modal adalah sebuah tempat memperdagangkan efek yang diterbitkan lembaga dan profesi yang terkait dengan efek. Pasar modal syariah merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

Secara umum, fungsi pasar modal adalah sebagai berikut :

1. Sebagai sarana penambah modal bagiusaha.

Perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham ini akan dibeli oleh masyarakat umum,

perusahaan- perusahaan lain, lembaga, atau oleh pemerintah.

2. Sebagai sarana pemerataan pendapatan
Setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibeli akan memberikan deviden (bagian dari keuntungan perusahaan) kepada para pembelinya (pemiliknya). Oleh karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan.
3. Sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi
Dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan meningkat.
4. Sebagai sarana penciptaan tenaga kerja
Keberadaan pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru.
5. Sebagai sarana peningkatan pendapatan negara
Setiap deviden yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Adanya tambahan pemasukan melalui pajak ini akan meningkatkan pendapatan negara.
6. Sebagai indikator perekonomian negara
Aktivitas dan volume penjualan/pembelian di pasar modal yang semakin meningkat (padat) memberi indikasi bahwa aktivitas bisnis berbagai perusahaan berjalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya.

Menurut Metwally (1995) fungsi dari keberadaan pasar modal syariah:

1. Memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya.
2. Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas
3. Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya
4. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional.

5. Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham.

Dan tujuan utama dari pasar modal adalah untuk memfasilitasi perdagangan atas klaim terhadap bisnis perusahaan, sehingga pasar modal dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap investasi. Dapat diketahui bahwa pasar modal sangat berperan dalam perekonomian Negara, sebelum Negara kita merdeka tepatnya pada masa pemerintahan kolonial mereka juga menggunakan pasar modal untuk mendapatkan dana yang diperlukan dalam pemerintahannya.¹¹

¹¹ Yenni Samri Juliati Nasution, *Human Falah : Peranan Pasar Modal dalam Perekonomian Negara*, 2015, Vol.2



BAB V

PEREKONOMIAN DI INDONESIA ERA GLOBALISASI

KEBIJAKAN EKSPOR DAN IMPOR

Diskriminasi Harga

Diskriminasi harga adalah penetapan harga barang yang berbeda untuk masing-masing negara. Oleh karena itu, harga barang yang sama di negara A akan berbeda dengan harga barang di negara B.

Oleh karena itu, mungkin saja lho, harga barang di negara B lebih murah dibanding harga barang di negara A. Padahal barangnya sama persis. Kebijakan ini dilakukan berdasarkan perjanjian untuk memenangkan persaingan serta untuk memperoleh keuntungan yang besar.

Pemberian Premi

Kebijakan selanjutnya adalah kebijakan premi. Kebijakan premi merupakan salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk memajukan ekspor. Bagaimana caranya, ya? Caranya adalah dengan memberikan premi kepada badan usaha atau industri yang melakukan ekspor. Pemberian premi banyak bentuknya nih. Bentuknya antara lain

berupa bantuan biaya produksi serta pemberian pajak dan fasilitas lain, dengan tujuan agar barang ekspor memiliki daya saing di luar negeri.

Dumping

Dumping adalah penetapan harga barang ekspor lebih murah dibandingkan harga barang tersebut di dalam negeri. Ada kondisi tertentu yang harus kamu perhatikan jika ingin menerapkan kebijakan dumping. Kamu dapat melakukannya jika pasar dalam negeri berada di dalam kendali pemerintah. Tapi kamu tahu nggak sih, kebijakan dumping ini sudah dilarang, lho. Wah, kenapa dilarang? Kebijakan ini dilarang karena bisa mematikan persaingan penjual lain. Jadi, harap diingat ya Squad, kebijakan ini *nggak* dipakai lagi.

Politik Dagang Bebas

Politik dagang bebas merupakan suatu kondisi ketika masing-masing Pemerintah memberi kebebasan dalam ekspor dan impor. Kebebasan dalam perdagangan ini akan membawa beberapa keuntungan seperti mutu barang yang tinggi dan harga yang relatif murah.

Larangan Ekspor

Sesuai dengan namanya, larangan ekspor adalah kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu keluar negeri. Ada beberapa alasan yang melatarbelakanginya, antara lain karena ada alasan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kok banyak ya alasannya? Contohnya apa saja, sih?

Contoh alasan ekonomi antara lain adalah larangan ekspor karena ingin mendorong perkembangan industri lokal. Jadi, supaya industri lokalnya terus berkembang dan tidak “manja” dengan kebiasaan mengekspor barang ini. Lalu, kalau alasan politik, seperti apa ya? Contoh alasan politik adalah dilarangnya ekspor minyak bumi di negara Timur Tengah, misalnya Irak. Hal ini dikarenakan ada campur tangan politis dari PBB dan Amerika Serikat dalam bentuk embargo ekonomi. Kalau alasan sosial budaya, seperti apa dong? Contoh alasan sosial dan budaya adalah larangan ekspor benda-benda bersejarah dan ekspor hewan-hewan yang dilindungi.

Kuota

Kalian sudah pernah mendengar istilah kuota, kan? Pasti istilah kuota yang paling sering kalian dengar kuota internet habis, ya? Hahaha. Kalau kuota dalam impor itu, apa ya? Dalam konteks impor, kuota yang dimaksud adalah jumlah total suatu barang yang bisa diimpor dalam satu periode tertentu. Kuota impor ini sudah diprediksikan sebelumnya, sehingga seharusnya tidak mengganggu industri dalam negeri. Meskipun demikian, jika suatu negara sedang memberlakukan perdagangan bebas, maka kebijakan kuota tidak bisa dipakai lagi karena bisa menghambat proses perdagangan internasionalnya.

Tarif

Sesuai dengan namanya, kebijakan tarif ini berarti ada penerapan tarif yang tinggi untuk impor barang-barang tertentu. Kebijakan tarif ini diharapkan bisa membantu barang produksi dalam negeri meningkatkan daya saingnya di pasar.

Ada sedikit perbedaan antara negara dengan sistem perdagangan bebas dan sistem perdagangan proteksi mengenai kebijakan tarif ini. Penganut perdagangan bebas akan mengenakan tarif yang rendah atas barang-barang impor. Sebaliknya, negara dengan sistem perdagangan proteksionis akan menetapkan tarif yang tinggi untuk barang impor.

Secara singkat kebijakan tarif ini, bisa dipahami sebagai sejenis pajak yang dikenakan atas barang-barang yang diimpor. Tarif spesifik (*Specific Tariffs*) dikenakan sebagai beban tetap atas unit barang yang diimpor. Misalnya \$6 untuk setiap barel minyak). *Tarifold Valorem* (*od Valorem Tariffs*) adalah pajak yang dikenakan berdasarkan persentase tertentu dari nilai barang-barang yang diimpor (Misalnya, tariff 25 persen atas mobil yang diimpor). Dalam kedua kasus dampak tarif akan meningkatkan biaya pengiriman barang ke suatu negara.

Subsidi

Subsidi ekspor adalah pembayaran sejumlah tertentu kepada perusahaan atau perseorangan yang menjual barang ke luar negeri, seperti tarif, subsidi ekspor dapat berbentuk spesifik (nilai tertentu per unit barang) atau *Od Valorem* (persentase dari nilai yang diekspor).

Jika pemerintah memberikan subsidi ekspor, pengirim akan mengekspor barang sampai batas dimana selisih harga domestic dan harga luar negeri sama dengan nilai subsidi. Dampak dari subsidi ekspor adalah meningkatkan harga dinegara pengekspor sedangkan di negara pengimpor harganya turun.

Kebijakan subsidi ini bertujuan untuk menekan harga barang produksi lokal. Jadinya produk lokal bisa lebih murah deh dibanding produk impor.

Larangan Impor

Kebijakan larangan impor dilakukan jika suatu negara diharuskan untuk menghemat devisanya. Selain itu, barang-barang yang dianggap berbahaya juga akan dikenakan kebijakan larangan impor.

GLOBALISASI EKONOMI DAN PEREKONOMIAN INDONESIA

Perekonomian dunia mengalami perubahan sejak dasarwarsa tujuh puluh hingga tahun 2000 an yang bersifat mendasar atau struktural serta mempunyai kecenderungan jangka panjang dan konjungtural. Perubahan dan perkembangan ini dikenal orang dengan istilah globalisasi.

Gejala globalisasi terjadi pada kegiatan finansial, produksi, investasi perdagangan yang kelak berpengaruh pada hubungan antar bangsa dan hubungan antar individu dalam segala aspek kehidupan. Hubungan antar bangsa menjadi lebih saling tergantung yang bahkan menjadikan ekonomi dunia menjadi satu sehingga seolah-olah batas antar negara dalam kegiatan perdagangan, bisnis tidak ada lagi. (*borderless world*)

Pada umumnya negara di dunia menghadapi perkembangan tersebut dengan melakukan langkah penyesuaian baik dalam wilayah regional maupun masing individu negara yang kecenderungannya mengarah kepada proteksionisme. Hal terlihat jelas dengan munculnya blok blok perdagangan yang pada intinya justru melanggar kesepakatan yang dituangkan dalam WTO.

Globalisasi ekonomi ditandai dengan makin menipisnya batas-batas investasi atau pasar secara nasional, regional ataupun internasional. Hal ini disebabkan oleh : (Halwani, 2005 : 194)

1. Komunikasi dan transportasi yang semakin canggih,
2. Lalu lintas devisa yang makin bebas,
3. Ekonomie negara yang makin terbuka,
4. Penggunaan secara keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif tiap-tiap negara,
5. Metode produksi dan perakitan dengan organisasi yang makin efisien,
6. Semakin pesatnya perkembangan perusahaan multinasional (MNC) di hampir segala penjuru dunia.

Steiner (1997) menjelaskan bahwa ada tiga faktor yang mendorong terjadinya perubahan global. Pertama, produk nasional kotor (GNP) tumbuh dan meningkat dengan cepat, terutama di negara-negara maju. Kedua, revolusi dalam teknologi komunikasi. Ketiga, kekuatan-kekuatan yang mempermudah munculnya perusahaan besar berskala global.

KEBIJAKAN PERDAGANGAN, PELUANG TANTANGAN DUNIA BISNIS DAN PERAN PEMERINTAH DALAM ERA GLOBALISASI EKONOMI

1. Kebijakan Perdagangan.

Kebijakan perdagangan dalam periode memasuki era lepas landas diarahkan pada penciptaan dan pemantapan kerangka landasan perdagangan yaitu dengan meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri dengan tujuan untuk memperlancar arus barang dan jasa, mendorong pembentukan harga yang layak dalam iklim persaingan yang sehat, menunjang usaha peningkatan efisiensi produksi, mengembangkan ekspor, memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja, meningkatkan dan pemeratakan pendapatan rakyat serta memantapkan stabilitas ekonomi.

Kerangka landasan yang ingin dicapai tersebut meliputi unsur sebagai berikut :

- a. Penciptaan struktur ekspor non migas yang kuat dan tangguh dengan cara melakukan diversifikasi produk maupun pasar serta pelakunya,
 - b. Penciptaan sistem distribusi nasional yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan daya saing produk ekspor, mempertahankan tingkat harga yang stabil dalam negeri,
 - c. Peningkatan daya saing usaha pelaku dalam kegiatan ekonomi perdagangan baik dalam negeri maupun ekspor dengan memupuk kebersamaan yang kokoh dalam menghadapi pasar dunia yang makin ketat,
 - d. Tranparansi pasar dan pengelolaan kegiatan perdagangan dengan membangun sistem jaringan perdagangan.
 - e. Meningkatkan peran lembaga penunjang perdagangan seperti badan pelaksana bursa komoditi, pasar lelang, BPEN , dll,
2. Peluang Dan Tantangan bagi Dunia Bisnis

Terbukanya pasar dunia akibat globalisasi ekonomi membuka peluang bisnis antara lain :

- a. Tersebar nya pasar yang lebih luas skalanya dan terdiversifikasinya barang manufaktur dan produk yang mempunyai nilai tambah tinggi (*value added products*).
- b. Terjadi relokasi industri manufaktur dari negara industri maju ke negara-negara sedang berkembang dengan upah buruh yang lebih murah. Sebagai konsekuensi logis dari relokasi industri tersebut, siklus proses bahan baku menjadi produk akhir menjadi lebih pendek. Hal ini akan menurunkan harga per unit serta meningkatkan volume perdagangan.
- c. Tersedianya sumber pendanaan yang dapat diperoleh dengan biaya yang lebih murah (bunga) karena makin beragamnya portofolio pendanaan terutama bagi negara yang sedang tumbuh perekonomiannya.

Selain memberikan peluang yang terbuka lebar bagi dunia bisnis , globalisasi ekonomi juga memberikan dampak negatif bagi dunia bisnis, antara lain :

- a. Terjadinya *transfer pricing* untuk memarkir dana maupun keuntungan di negara yang menganut *tax shelter* (memberikan perlindungan terhadap pesembunyian kewajiban membayar pajak).
 - b. Relokasi industri karena *footlose industry* membawa pula teknologi kadaluwarsa ke negara sedang berkembang (*host country*), hal ini terjadi di negara asalnya (*home country*) teknologi yang dipakai industri tersebut ketinggalan jaman.
 - c. Masuknya FDI (*foreign direct investment*) dengan teknologi canggih, seringkali tidak diimbangi dengan tersedianya sumberdaya manusia yang siap mengoperasikannya sehingga membuat ketergantungan pada negara asal investasi tersebut.
 - d. Masuknya FDI juga seringkali menimbulkan *trade off* politis, yang merugikan masyarakat dan pelaku bisnis di dalam negeri.
3. Peran Negara Bangsa Dalam Era Global

Robert Gilpin, salah satu tokoh realis menyatakan, peran negara bangsa (*nation state*) dalam era globalisasi sekarang ini masih sangat diperlukan (signifikan). Gilpin pada awalnya menggugat beberapa keyakinan yang dianut pendukung globalisasi dan pasar bebas. Menurut Gilpin banyak peneliti mempunyai keyakinan bahwa tengah terjadi pergeseran besar dari ekonomi *state dominated* ke arah ekonomi *market dominated*. Hancurnya Uni Soviet, kegagalan strategi substitusi impor negara dunia ketiga, dan suksesnya AS pada era 1990 an telah mendorong penerimaan *unrestricted market* sebagai solusi bagi penyakit ekonomi modern. Karena peran negara menjadi berkurang sebagai gantinya pasar akan menjadi mekanisme penting baik untuk perekonomian domestik maupun perekonomian internasional. Menurutnya peran negara bangsa diyakini akan menjadi pembuka kearah ekonomi global yang sesungguhnya, yang dicirikan oleh tiadanya hambatan dalam perdagangan, aliran uang dalam skala global dan kegiatan internasional perusahaan multinasional (Gilpin, dalam Winarno, 2005).

Namun fakta regionalisme ekonomi diberbagai belahan dunia membuktikan bahwa peran negara bangsa masih relevan. Regionalisme ini menunjukkan respon penting dari negara

bangsa dalam menyelesaikan secara bersama-sama masalah politik dan interdependensi yang tinggi dari ekonomi global yang *hypercompetitive*. Dibanding regionalisme pada tahun 1950 an dan 1960 an , bentuk regionalisme baru ini lebih signifikan dalam ekonomi global. Kadangkala regionalisme ekonomi ini mewakili kepentingan individual negara bangsa baik untuk kepentingan mereka di level nasional maupun kolektif.

Karena ekonomi global semakin terintegrasi, pengelompokan regional negara bangsa telah meningkatkan kerjasama dalam rangka memperkuat otonomi, memperbaiki posisi tawar, dan memperjuangkan kepentingan ekonomi politik lainnya. Dimasa sekarang ini peran negara bangsa justru dibutuhkan demi berlakunya perdagangan bebas seperti harapan neoliberal . Hambatan-hambatan perdagangan tidak mungkin dihilangkan tanpa adanya dukungan kebijakan yang pada gilirannya makin menunjukkan peran negara bangsa makin diperlukan dalam perekonomian global.

LEMBAGA YANG BERPERAN DALAM GLOBALISASI EKONOMI

Terdapat tiga lembaga utama yang mengatur globalisasi yaitu IMF, World Bank dan WTO.

1. International Monetary Fund (IMF)

Salah satu lembaga yang sangat berpengaruh terhadap penciptaan sistem ekonomi pasar bebas dunia sesuai agenda Neoliberalisme, yaitu IMF. Cikal bakal munculnya lembaga super tersebut sewaktu diadakan pertemuan di Bretton Woods , New Hampshire AS Juli 1944. Di bidang moneter dibentuklah *International Monetary Fund* (IMF) dengan tugas utama mengatur system keuangan dan sistem nilai tukar internasional.

Ide terbentuknya IMF terdiri atas ;

- a. Untuk meningkatkan jumlah cadangan negara yang memungkinkan negara tersebut mengatasi depresi tanpa melakukan kebijakan deflasi, devaluasi, dan pembatasan import. Baik devaluasi maupun pembatasan impor akan menimbulkan lingkaran setan yang akan membantu suatu negara yang bersifat

sementara namun memperburuk perekonomian dalam jangka panjang.

- b. Untuk memperbaiki posisi ketidakseimbangan neraca pembayaran. Ide Keynes adalah untuk menciptakan mekanisme internasional dengan memberikan cara yang baik untuk memperbaiki ketidakseimbangan neraca pembayaran.
- c. Hasil penelitian menunjukkan upaya negara dalam menanggulangi ketidakseimbangan neraca pembayaran adalah melakukan devaluasi.
- d. Keynes melemparkan ide untuk mendirikan bank sentral yang memberikan kredit skala dunia.

Maka sebagai realisasi ide tersebut IMF didirikan tahun 1944 pada konferensi internasional yang berlangsung di Bretton Wood Amerika Serikat dan mulai beroperasi 1 Maret 1947. IMF didirikan sebagai pemberi pinjaman terakhir (*Lender of Last Resort*) untuk pemerintah di berbagai penjuru dunia. IMF beroperasi atas dasar kontribusi 182 negara anggota. AS merupakan kontributor terbesar sekitar 18 % dari keseluruhan.

Peran IMF sebagai lembaga yang mengatur ekonomi global ditentukan oleh tiga asumsi sebagai berikut :

- e. IMF merupakan alat intervensi Departemen Keuangan AS terhadap negara berkembang.
- f. Banyak lembaga keuangan dunia yang ingin berhubungan dengan IMF yang menjanjikan dana darurat sebagai imbalan menjalankan kebijakan ekonomi yang dinilai baik.
- g. Citra yang diciptakan seputar kekuatan institusional IMF yang seolah tidak pernah salah. Negara pengutang yang berbeda pandangan dengan IMF akan dinilai dunia internasional sebagai pembangkang.

IMF dituntut untuk dapat mencegah depresi global lainnya. Yang dapat dilakukan dengan melakukan tekanan internasional pada negara yang tidak melakukan peran mereka untuk memelihara permintaan agregat secara global, dengan membiarkan perekonomian mereka sendiri jatuh. IMF didirikan dengan

keyakinan bahwa perlu ada tindakan kolektif pada tingkat global agar tercipta stabilitas ekonomi.

Perubahan peran yang dramatis dalam IMF terjadi ketika tahun 1980-an, di era ketika Ronald Reagan dan Margareth Thatcher menyuarkan ideologi pasar bebas di AS dan Inggris. IMF dan Bank Dunia menjadi lembaga – lembaga misionaris baru, yang dengannya ide-ide tersebut dipaksakan pada negara-negara miskin yang sering membutuhkan pinjaman dan bantuan mereka.

Setengah abad setelah pendiriannya, terbukti bahwa IMF gagal dalam menjalankan misinya. IMF belum melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Diperkirakan hampir seratus negara mengalami krisis, lebih buruk lagi kebanyakan kebijakan yang didorong oleh IMF, khususnya leberalisasi pasar modal yang premature memberikan andil dalam memunculkan ketidakstabilan global. (Stiglitz, 2002:19)

2. World Bank

Lembaga lain yang sangat berpengaruh terhadap penciptaan sistem ekonomi pasar bebas dunia sesuai agenda Neoliberalisme, yaitu World Bank. Cikal bakal munculnya lembaga super tersebut sewaktu diadakan pertemuan di Bretton Woods, New Hampshire AS Juli 1944. Dari pertemuan tersebut dibentuklah sebuah lembaga yang khusus menangani masalah dalam pembangunan ekonomi, yakni IBRD (*International Bank for Reconstruction and Development*) yang kemudian lebih dikenal sebagai *World Bank*.

Mulanya tujuan didirikan IBRD adalah untuk membiayai pembangunan kembali ekonomi Eropa setelah Perang Dunia II, fungsi tersebut kemudian berkembang menjadi lebih luas, tidak lagi terbatas pada upaya rekonstruksi akibat perang, tetapi juga pembiayaan rehabilitasi akibat bencana alam, pendidikan, kesehatan, infrastruktur serta rehabilitasi ekonomi setelah masa konflik antar negara. Saat ini upaya Bank Dunia ini fokus pada pengentasan kemiskinan global, terutama dalam rangka mencapai tujuan *Millenium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2015.

3. General Agreement on Tariff and Trade (GATT) dan World Trade Organization (WTO)

GATT merupakan salah satu instrumen dimana sistem ekonomi dunia yang bersandar pada pasar bebas hendak dilakukan. Melalui GATT yang kemudian menjadi WTO, secara sistematis dan intensif agenda negara-negara maju yang didominasi gagasan neoliberal mendesakkan agenda leberalisasi dan perdagangan bebas.

GATT ini bertolak dari pemikiran keunggulan komparatifnya David Ricardo, yang beranggapan bahwa dengan perdagangan internasional yang bebas akan memberikan kemakmuran pada negara yang melakukan spesialisasi diri pada produk tertentu dengan biaya yang lebih murah dan kualitas lebih kompetitif.

Berdasar pemikiran di atas maka GATT dibentuk pada tahun 1948 dengan tiga prinsip utama. Prinsip pertama ialah *most favoured nation* (MFN), yang berisi ketentuan bahwa suatu negara memberikan perlakuan yang istimewa kepada negara partner dagangnya dan hendaknya juga memperlakukan hal yang sama istimewanya kepada negara lain yang melakukan transaksi perdagangan dengan negara yang bersangkutan. Perlakuan ini harus tercermin pada tarif impor, pajak ekspor, dan pungutan lainnya. Prinsip MFN bertujuan agar negara yang melakukan transaksi perdagangan internasional lebih mengutamakan sistem multilateral yang kooperatif dari pada pembentukan aliansi bilateral dalam perdagangan internasional.

Pinsip kedua adalah *reciprocity*. Penurunan tarif atau penghapusan tarif hendaknya dilakukan melalui perundingan dengan negara patner dagangnya. Sedang Prinsip ketiga adalah *non-discrimination*, bahwa setiap impor telah masuk ke pasar domestik suatu negara hendaklah diperlakukan sama dengan barang domestik.

Pada kenyataannya, prinsip prinsip GATT di atas justru banyak dilanggar sendiri oleh negara-negara maju dan yang menjadi korbannya adalah negara-negara sedang berkembang. Dalam prakteknya terlihat jelas bahwa GATT dibuat tidak lebih dari untuk kepentingan negara-negara maju, sehingga tidak salah kalau GATT

diberi julukan sebagai “*The Richman’s Club*” Maka untuk mengatasi persoalan yang timbul akibat praktek GATT tersebut, dilakukanlah Putaran Uruguay (*Uruguay Round*) yang menghasilkan lembaga baru yang bernama *World Trade Organization* (WTO). Lembaga ini sebenarnya prinsip kerjanya tidak berbeda jauh dengan GATT namun memiliki kewenangan yang lebih besar dan keputusannya bersifat mengikat negara anggota

TINGKATAN GLOBALISASI DAN SUDUT PANDANG TERHADAP GLOBALISASI

1. Tingkatan Globalisasi

Menurut Susan dan Strange (Halwani, 2005:197) globalisasi terjadi pada berbagai tingkatan.

Pertama, dengan mengacu pada gagasan sejarawan Perancis, Fernand Braudel, globalisasi terjadi pada tingkat *material life*, yang dimaksud adalah terciptanya struktur produksi global yang menentukan barang dan jasa apa yang dihasilkan oleh negara untuk kelangsungan dan kenikmatan hidup. Produksi barang dan jasa itu berorientasi ke pasar global dan tidak hanya terbatas pasar nasional saja.

Kedua, globalisasi juga terjadi pada struktur keuangan, pembiayaan proses produksi lewat kegiatan investasi kian membutuhkan ruang yang bersifat global sehingga ada kecenderungan *teritorial state* tidak lagi menjadi *space* yang relevan dan memadai bagi strategi investasi. Selain itu ada ledakan pertumbuhan transaksi keuangan internasional. Salah satu indikator dari globalisasi keuangan ini adalah tingkat pertumbuhan yang jauh lebih cepat dari perdagangan uang asing setiap harinya dibanding dengan total ekspor dunia. Lairson dan Skidmore (2000) menunjukkan pada tahun 1986 rasionya adalah 25:1, tahun 1995 rasionya 81:1 maka pada tahun telah menjadi 107 :1.

Ketiga, globalisasi terjadi pada tingkatan persepsi, keyakinan, gagasan dan selera. Nilai-nilai seperti demokratisasi, perlindungan HAM, pelestarian lingkungan hidup telah menjadi isu-isu global. Salah satu contoh yang merepotkan negara sedang berkembang dari

segi penanganan HAM adalah prinsip *humanitarian intervention* yang dilakukan PBB atas nama dunia internasional, dimana saja ada pelanggaran HAM berskala besar yang selalu dikaitkan dengan embargo ekonomi. Sedangkan keputusan ini banyak dilakukan oleh negara-negara besar di Dewan Keamanan PBB.

2. Sudut Pandang Terhadap Globalisasi

David Held at.al,(1999) membagi pendapat para pakar dalam memandang dan menyikapi globalisasi dalam tiga kelompok, yakni kelompok hiperglobalis, kelompok skeptis dan kelompok transformationalis. Bagi kelompok hiperglobalis pengertian globalisasi adalah sejarah baru kehidupan manusia dimana negara tradisional telah menjadi tidak relevan lagi, lebih-lebih menjadi tidak mungkin dalam unit-unit bisnis dalam sebuah ekonomi global. Kelompok ini percaya globalisasi ekonomi membawa serta gejala “denasionalisasi” ekonomi melalui pendirian jaringan jaringan produksi transnasional (*transnasional networks*), perdagangan, dan keuangan. Dalam dunia yang “borderless” peran pemerintah tidak lebih seperti *transmission belts* bagi kapital global. Lebih lanjut kelompok ini percaya globalisasi ekonomi tengah membangun bentuk baru organisasi social yang tengah menggantikan atau akhirnya akan menggantikan negara bangsa (*nation states*) sebagai lembaga ekonomi utama dan unit politik dari masyarakat dunia.

Kenichi Ohmae sebagai pendukung hiperglobalis dalam buku *The End of nation State* (1995) yang sering dijadikan manifesto hiperglobalis, berargumen bahwa setidaknya ada empat faktor yang membuat peran negara bangsa di era “dunia tanpa batas negara” (*a world without borders*) makin menipis. Negara bangsa tidak lagi memiliki sumber-sumber tanpa batas yang dapat dimanfaatkan secara bebas untuk mewujudkan ambisi mereka. Empat faktor tersebut oleh Ohmae disebut sebagai empat I (*investment, industry, information technology* dan *individual*). Investasi sebagai I yang pertama adalah pasar modal di negara maju yang dibanjiri uang tunai untuk invesasi, karena peluang investasi tidak selalu ada maka pasar modal mengembangkan berbagai mekanisme untuk mentranfer dana keuangan itu melintasi batas-batas nasional. Dengan kemajuan

teknologi komunikasi memungkinkan aliran dana ini menyebar dengan cepat keseluruh penjuru dunia. Namun investasi ini juga menimbulkan dampak buruk bagi negara bangsa yang struktur ekonomi dan keuangannya rapuh. Kasus Asia Timur, dan Asia Tenggara adalah contoh yang jelas akibat globalisasi keuangan ini.

Industri yang merupakan I ke dua, adalah industri yang mempunyai orientasi global dibanding sepuluh tahun lalu. Strategi perusahaan TNC dan MNC tidak lagi dikendalikan oleh alasan negara namun lebih pada keinginan dan kebutuhan melayani dan mencari sumber-sumber ekonomi di seluruh dunia.

Pergerakan investasi dan industri keseluruh dunia tidak lepas berkat kemajuan I yang ketiga yaitu *information technology*. Juga ditambah dengan makin murahanya transportasi menyebabkan perusahaan transnasional dan aliran modal global makin gampang bergerak ke seluruh dunia. Teknologi informasi pulalah yang menyebabkan integrasi, interdependensi dan interlink semua aspek kehidupan baik itu budaya, ekonomi dan politik sehingga terciptalah globalisasi budaya, globalisasi ekonomi dan globalisasi politik.

Individual sebagai I keempat, menunjukkan individu di seluruh dunia makin berorientasi global. Teknologi informasi memungkinkan individu melihat, membeli dan berperilaku seperti dilakukan dibelahan dunia lain. Hal ini terutama terlihat pada gaya hidup yang banyak meniru perilaku individu di negara maju. Konsumen makin menginginkan produk berkualitas, murah tanpa menghiraukan darimana produk tersebut berasal. Fenomena ini dikenal sebagai *international demonstration effect*.

Berlawanan dengan kelompok pertama, kelompok kedua ini disebut sebagai kelompok skeptis terhadap globalisasi. Hirst dan Thompson sebagai pendukung kelompok skeptis, menyerang tesis hiperglobalis yang menganggap remeh peran kekuasaan pemerintahan nasional dalam mengatur kegiatan ekonomi internasional. Bahkan Hirst dan Thompson menganggap globalisasi adalah mitos belaka. Kelompok skeptis ini berpendapat bahwa kekuatan global itu sendiri sangat tergantung pada kekuasaan

mengatur pemerintahan nasional untuk menjamin liberalisasi ekonomi terus berlanjut. Lebih lanjut mereka mengatakan bahwa sebenarnya proses globalisasi hanya berlangsung di Jepang, Amerika Serikat dan Eropa. Sedangkan kekuatan regionalisme menjadi satu ciri yang menunjukkan peran negara bangsa.

Kelompok ketiga ini terletak diantara pandangan ekstrim hiperglobalis dan skeptis, kelompok ini dikenal dengan nama transformasionalis. Kelompok ini berkeyakinan bahwa pada permulaan milineum baru, globalisasi adalah kekuatan utama dibalik perubahan sosial, ekonomi dan politik yang tengah menentukan kembali masyarakat modern dan tantangan dunia (*world order*). Penganut kelompok ini meyakini proses globalisasi yang tengah berlangsung saat ini secara historis belum pernah terjadi sebelumnya dimana tak lama lagi perbedaan antara internasional dan domestik, hubungan internal dan eksternal tidak lagi menjadi jelas. Meskipun mereka juga mengakui bahwa proses globalisasi mempunyai akar sejarah yang panjang.

Mengenai peran negara bangsa, kelompok transformasionalis berpendapat bahwa globalisasi yang tengah berlangsung saat ini sedang mengatur kembali kekuasaan, fungsi dan otoritas pemerintahan nasional. Peran negara harus disejajarkan dalam berbagai tingkat dengan perluasan yurisdiksi lembaga pengaturan internasional sebagai mana kewajiban yang berasal dari hukum internasional. Artinya peran negara bangsa sejajar dengan lembaga internasional dan perusahaan transnasional.

David Held dalam buku *Global Transformation* (2000) sebagai kelompok transformatif ini menyatakan bahwa globalisasi masa lampau dengan sekarang berbeda jauh karena tiga hal yaitu ; *velocity, intensity dan extensity*. Karena tiga hal tersebut globalisasi sekarang menimbulkan dampak dahsyat dibanding globalisasi sebelumnya. Namun bukan berarti telah melabrak segala sesuatunya hingga hilang, budaya lokal dan negara bangsa (*nation state*) tetap ada.

3. MODEL-MODEL DALAM SISTEM EKONOMI GLOBAL

Terlepas dari suka atau tidak suka, proses globalisasi meskipun belum jelas tipe idealnya terus berlanjut karena kekuatan-keuatan internal (pasar, informasi, teknologi dan kontrol) Namun untuk kepentingan ilmu ekonomi dan ilmu pengetahuan pada umumnya bentuk masa depan sistem ekonomi internasional atau system ekonomi global tetap penting untuk dipetakan. Hirst dan Thompson (1996) mengajukan dua model ideal, yaitu : 1) ekonomi internasional yang terbuka (*an open international economy*) dan 2) ekonomi global purna (*a fully globalized economy*)

Model I: Ekonomi internasional

Model pertama ini merupakan system ekonomi yang masih bercirikan ekonomi nasional masing-masing negara. Hubungan perdagangan dan investasi antar bangsa tidak serta merta menghilangkan identitas sistem ekonomi nasional, tapi lebih merupakan dinamika hubungan keluar (*outward looking*) dari masing-masing pelaku. Meskipun demikian, hubungan intensif dalam uda bidang tersebut terus membawa pelaku-pelaku ekonomi nasional berintegrasi ke pasar internasional. Pemisahan identitas dan kebijakan pada dua level (nasional dan internasional) masih tetap terlihat dengan jelas.

Model ekonomi internasional seperti ini mencirikan saling ketergantungan antar bangsa, tetapi tetap terpisah antara entitas ekonomi nasional dengan aspek internasionalnya. Kejadian kejadian pada tingkat internasional tidak otomatis mempengaruhi ekonomi domestik, tetapi justru diserap dengan berbagai proses khas dari ekonomi nasional itu sendiri. Dengan demikian kebijakan pada tingkat nasional masih mempunyai kekuatan terhadap sisi dan elemen kehidupan masyarakat.

Tipe seperti ini mirip seperti ekonomi Inggris dan Eropa abad pertengahan sampai 1914. Ekonomi Inggris menjadi pusat hegemoni dan penjamin berlangsungnya sistem itu. Tetapi setelah PD II, kekuatan hegemoni Inggris mulai surut karena melemahnya sistem industri negara itu – inilah yang kemudian menghasilkan kebangkitan proteksionisme, terutama setelah 1930 an, sekaligus

menandakan datangnya hegemoni baru, yakni Amerika Serikat dengan berlakunya Bretton Wood.

Sistem ekonomi internasional juga ditandai oleh bangkitnya perusahaan multinasional (MNC, *Multi National Corporation*). Meskipun demikian MNC masih bias diidentifikasi basis negaranya dan tetap mengikuti tata aturan dan kebijakan nasional masing-masing. Ekonomi internasional sekarang memang diarahkan lebih terbuka, diikuti oleh kebangkitan lembaga-lembaga seperti WTO/GATT, APEC dan lain sebagainya. Lembaga ini dibuat untuk menjaga keterbukaan ekonomi negara anggotanya meskipun pada kenyataannya negara maju lebih banyak diuntungkan. Sistem ekonomi internasional semakin intensif berinteraksi satu sama lain pada akhir abad ke-20 ketika revolusi teknologi komunikasi dan informasi muncul.

Model II : Ekonomi Global (*globalized economy*)

Model kedua ini pada dasarnya merupakan kebalikan dari model pertama dimana ekonomi internasional hanya merupakan bagian integral dari segenap proses, transaksi dan perkembangan global. Ekonomi global tercipta dan saling berinteraksinya ekonomi nasional mengarah ke bentuk kekuatan baru. Dengan demikian kebijakan pada tingkat nasional maupun kebijakan bisnis pada tingkat perusahaan tidak lain sebagai perwujudan dan penyatuan kekuatan-kekuatan pasar global. Kebijakan, kegiatan dan interaksi pada tingkat nasional diintegrasikan ke tingkat global.

Meskipun demikian kegiatan dan sistem ekonomi yang mengglobal membawa persoalan : “Bagaimana dengan institusi pemerintah pada tingkat yang sama (internasional), yang menyertai institusi pasar global ?” Masalah ini merupakan isu krusial karena tanpa mekanisme pemerintahan, institusi pasar akan berkembang pada tatanan yang amat riskan, tidak adil, mendekati hukum rimba dan tidak akan mampu mengakomodasikan nilai moral dan etika.

Institusi pasar pada tingkat nasional terlepas apakah terinteraksi dengan negara lain atau tidak) senantiasa berkembang berdampingan dengan institusi negara atau pemerintahan (*state*

institution governance). Dalam kenyataannya, tidak mungkin institusi pasar berkembang tanpa pengaturan yang dikeluarkan oleh negara. Institusi pasar tidak bias dibiarkan berjalan sendiri tanpa basis institusi negara.

Institusi negara, sistem, praktek dan para pelaku di dalamnya, berperan menjaga keseimbangan mekanisme pasar sehingga berperan positif bagi pelaku-pelakunya, bersifat adil, dan berfungsi sebagai penyangga bagi berlangsungnya sistem ekonomi yang sehat. Secara teoritis, mekanisme pasar berjalan sinambung, sehat dan adil dalam panduan institusi negara. Jika terdapat kecenderungan penguasaan pasar, blokade, integrasi vertikal-horizontal, monopoli, kartel dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya maka tugas institusi negaralah yang meluruskannya agar tercipta pemerataan kekayaan dan partisipasi pelakunya, redistribusi, stabilisasi ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun dalam model ekonomi global, institusi negara dalam bentuk *governance* pada tingkat internasional tidak bisa hadir dengan sendirinya tanpa konsensus kolektif negara anggotanya. Institusi pada tingkat inilah yang tidak berkembang dengan baik, terbukti dengan krisis yang terjadi sejak tahun 1930an (depresi), tahun 1970-an (krisis minyak), sampai akhir 1990-an (krisis mata uang di Asia), menunjukkan berperannya institusi *governance* pada tingkat internasional.

DAMPAK EKONOMI GLOBAL.

William Greider dalam bukunya *One World, Ready or Not, The Maniac Global Capitalism* (1998) melontarkan tesisnya bahwa motor dibalik globalisme adalah " kapitalisme global ". Sesuai dengan watak dari kapitalisme yang rakus dan tidak pernah puas, mereka beramai-ramai menguras kekayaan dunia, masuk ke kantong mereka dengan memanfaatkan teknologi komputer, mengabaikan kesantunan hidup bersama. Memang kapitalisme global telah memberikan kenyamanan dan kemudahan namun hanya dinikmati 10 % penduduk dunia. Sementara jurang antara kaya dan miskin (istilah baru, digital divide) menjadi kian menganga. Kapitalis global ini terdiri atas spekulasi uang

yang jumlahnya tidak lebih dari 200.000 orang (termasuk George Soros yang paling terkenal) dan 53.000 MNC yang hanya memperkerjakan 6.000.000 orang di seluruh dunia. Juga institusi seperti IMF, World Bank, WTO. Lembaga-tersebut telah secara langsung maupun tidak langsung membantu liberalisasi ekonomi keseluruhan dunia, dimana tahun 1970 an pasar dunia masih merupakan pasar tertutup. (Halwani,2005:201)

Dampak utama yang muncul akibat globalisasi ekonomi adalah bagaimana mengatur ekonomi global itu. Pasar global yang terlepas dari konteks sosialnya sulit sekali diatur sekalipun taruhlah ada kerja sama yang efektif antara pihak yang berwenang mengatur ekonomi dan kepentingan mereka sejalan. Kesulitan utama adalah bagaimana menyusun pola kebijakan nasional dan internasional yang efektif dan terintegrasi guna menghadapi kekuatan-kekuatan pasar global. Ketergantungan sistematis antara negara dan pasar sama sekali tidak harus berarti akan tercipta secara otomatis integrasi harmonis yang memberikan manfaat pada konsumen dunia, karena pasar global benar-benar bebas dan efisien dalam membagikan sumber dan daya produksinya.

Dampak utama kedua adalah pelaku ekonomi yang banyak berperan dalam model ekonomi global ini adalah perusahaan besar MNC (*multi national corporation*) dan akan berubah menjadi TNC (*trans national corporation*). TNC bercirikan murni modal yang bebas mengalir kemana saja (*footloose investment*) juga industri yang gampang pindah lokasi (*footloose industry*) tanpa kedudukan nasional, dengan pengelolaan manajemen internasional, dan bersedia beroperasi dimana saja untuk mencari laba sebesar-besarnya. Di sektor keuangan hal ini dapat dicapai dengan mudah, cukup dengan menekan tombol komputer maka lalu lintas modal akan berpindah ke belahan dunia manapun tanpa terpengaruh campur tangan kebijakan moneter nasional sedikitpun.

Dalam perusahaan yang bergerak di sektor industri primer, TNC akan mencari sumber daya alam, memproduksi dan memasarkan barang di tingkat dunia sejauh strategi dan peluang menguntungkannya. TNC tidak lagi berbasis di satu negara saja (seperti halnya MNC) akan tetapi melayani seluruh penjuru dunia. TNC juga tidak dapat dihambat dan dikendalikan oleh kebijakan negara manapun kecuali oleh

kepentingannya sendiri (maksimalisasi laba). TNC memang merupakan wujud ekonomi global murni.

Namun demikian, bila kita melihat fenomena perilaku perusahaan Jepang yang enggan menempatkan fungsi penelitian dan pengembangan atau proses produksi suku cadang bernilai tinggi di pabrik cabang di negara asing, maka kecenderungan dalam masa depan yang tidak terlalu jauh, yang terlihat adalah perusahaan nasional dengan operasi internasional (MNC) ketimbang TNC.

Dampak ketiga adalah melemahnya posisi tawar politik dan ekonomi serikat buruh. Pasar global dan TNC cenderung disertai pasar tenaga kerja dunia yang terbuka pula. Namun operasi pasar tenaga kerja dunia bukan dalam bentuk lalu lintas tenaga kerjadari satu negara ke negara lain, tetapi dalam bentuk arus modal yang bergerak memilih lokasi-lokasi yang terbaik dari sisi upah buruh dan pasokan tenaga kerja.

Kecenderungan modal bergerak dengan bebas dari satu negara ke negara lain (*footloose investment*), sementara angkatan kerja tetap berada di negara masing-masing, akan menguntungkan negara maju yang memiliki angkatan kerja paling siap meskipun biaya *overhead* dan jaminan sosial tinggi dilihat dari kompetensi keterampilan dan motivasi kerja.

Dampak globalisasi yang terakhir dan tidak dapat terelakan adalah bahwa dalam sistem politik internasional muncul pusat-pusat kekuatan baru. Negara yang selama ini memegang kekuasaan hegemoni di dunia tidak dapat lagi memaksakan tujuan kebijakannya sendiri, baik di dalam wilayahnya maupun di tempat lain, sementara lembaga lain (swasta maupun pemerintah) yang selama ini lemah sekarang akan lebih kuat.

Berbagai lembaga, dari lembaga sukarela internasional hingga perusahaan TNC, menikmati kekuasaan yang lebih besar sementara wibawa pemerintah nasional makin turun. Lembaga-lembaga ini dengan menggunakan pasar global dan media global, memperoleh legitimasi dari konsumen dan warga lintas batas.

1. Janji janji Globalisasi

Dampak positif yang dijanjikan globalisasi sangat banyak (Deliarnov, 2006 : 203). Selain menjanjikan memperlancar arus transportasi

dan informasi; memberikan akses dan alih pengetahuan; memperpanjang usia harapan hidup; melayani masyarakat lebih baik lagi; meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan ekspor; membuat harga lebih murah; meningkatkan standard hidup; mengurangi kemiskinan; mengurangi eksploitasi terhadap tenaga kerja wanita dan anak-anak. Selain daftar kehebatan di atas, globalisasi juga dipandang sebagai salah satu pendorong lahirnya lembaga atau badan yang memberikan banyak bantuan modal (*World Bank* dan IMF), lembaga yang merupakan wadah pasar bebas (WTO), institusi intergovernmental untuk bantuan perdamaian (PBB); perburuhan (ILO); pendidikan (UNICEF); kesehatan (WHO) dan juga lembaga bantuan sosial (Palang Merah Internasional)

Benarkah janji-janji tersebut ? Bagi sebagian negara sedang berkembang janji-janji di atas tidak lain adalah mitos belaka. Hal ini terlihat dengan fakta sebagai berikut.

IMF dan World Bank selalu berusaha meyakinkan bahwa liberalisasi dan globalisasi akan memicu pertumbuhan. Padahal belum ada teori maupun bukti bahwa liberalisasi pasar betul-betul dapat memacu pertumbuhan (Stiglitz,2001) Pasar bebas justru membuat pasar domestik tidak efisien jika ada pihak-pihak melakukan monopoli. Masuknya produk asing justru mendesak dan mematikan produk dalam negeri sehingga bukannya pertumbuhan yang timbul tapi justru pengangguran terutama di sektor industri dan pertanian.

Bahwa globalisasi akan membantu negara-negara sedang berkembang meningkatkan ekspor dan menyediakan barang dan jasa dengan harga murah. Hal ini juga cuma janji kosong, karena pada kenyataannya negara sedang berkembang justru berhadapan dengan produk dari negara maju yang lebih berkualitas dan harga yang lebih murah. Sedangkan produk negara sedang berkembang sulit masuk ke pasar negara maju karena dihambat dengan berbagai cara.

Globalisasi akan menciptakan lapangan kerja. Hal ini memang tujuan utama didirikannya IMF ; Bank Dunia GATT seperti disarankan oleh JM Keynes, yakni untuk mengatasi kegagalan pasar dan mendorong peran pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja. Fakta di lapangan ternyata berbicara lain, justru munculnya TNCs di negara berkembang menimbulkan pengangguran karena biasanya bisnisnya bersifat *capital intensive* dan *high technology*. Menurut Susan George, 200 TNCs terbesar menguasai 25 % kekayaan dunia, tapi tidak banyak menyerap tenaga kerja. Sedangkan 6000 TNCs yang menguasai sepertiga perdagangan dunia hanya mampu menyerap kurang dari 1 % tenaga kerja dunia.

Globalisasi juga dikatakan akan mengurangi eksploitasi terhadap tenaga kerja perempuan dan anak-anak. Dalam prakteknya malah menunjukkan telah terjadi “feminisasi” tenaga kerja, yakni dominannya tenaga kerja perempuan disektor industri dengan upah yang rendah. Bahkan sebagian migran perempuan dari desa-desa itu terjebak *trafficking* (perdagangan perempuan antar negara).

2. Dampak Globalisasi Ekonomi Terhadap Indonesia.

Sejak tahun 1993, OECD sudah memberi sinyal Indonesia akan dirugikan dengan berlakunya liberalisasi perdagangan internasional. Akan tetapi Soeharto sebagai penguasa Orde Baru yakin sekali dengan prakarsa perdagangan bebas. Akhirnya yang terjadi adalah ramalan OECD tersebut terbukti, yakni Indonesia justru menghadapi persaingan baru dari negara-negara maju yang mampu menghasilkan produk dengan kualitas baik dan harga bersaing, sedang produk Indonesia sulit masuk ke pasar negara maju karena dihambat dengan pencabutan fasilitas kemudahan ekspor yang bernama *Generalized System of Preference*. GSP ini merupakan fasilitas yang diberikan oleh Departemen Perdagangan AS kepada sejumlah negara untuk mengurangi dan menghilangkan pajak impor bagi negara yang dianggap berdagang secara “sehat” dengan AS.

Sejak peristiwa WTC 11 September 2001, AS khususnya melakukan proteksi yang dikemas dengan istilah undang-undang bio-terrorism, iso-labeling, eco-labeling, ditambah embargo ekonomi

dan sangsi ekonomi. Peristiwa Santa Cruz di Timor Timur (waktu itu) membuat Indonesia diembargo dalam pengadaan alat militer dan juga perdagangan ekspor Indonesia ke AS. Tekanan paling keras dilakukan AS terhadap negara industri baru di Asia Timur termasuk Indonesia. Hal ini dilakukan oleh AS guna menyeimbangkan neraca perdagangan AS yang merosot pada beberapa tahun terakhir ini. Hal ini tentu berdampak pada perekonomian nasional karena masuknya produk asing, embargo, dan proteksi negara tujuan ekspor khususnya AS menjadikan daya saing produk domestik lemah dan munculnya efek domino karena tutupnya sejumlah industri, yaitu PHK dan pengangguran.

Perluasan ekspor Indonesia terasa makin berat sejak dicabutnya GSP tahun 2005 belum lagi halangan masuk (*entry barrier*) yang sengaja diciptakan oleh negara maju. Sehingga ekspor tekstil Indonesia tidak memiliki kuota untuk masuk pasar AS. Didalam negeri gempuran produk China terus-menerus terjadi, sehingga beberapa industri domestik rontok dan merumahkan karyawannya.

Globalisasi bukan hanya menggempur pelaku ekonomi di negara sedang berkembang. Globalisasi mampu mengendalikan demokrasi bahkan bertindak lebih jauh dengan mendikte apa yang harus dilakukan pemenang pemilu yang diselenggarakan secara demokratis sekalipun. Rakyat memang menentukan siapa yang menang dalam pemilihan umum. Namun siapa yang akan duduk di kabinet bisa ditentukan oleh konstituen pasar yang berada di sentra finansial global.

Hal di atas bisa terlihat jelas waktu Presiden Soeharto kembali menduduki kursi kepresidenan tahun 1996, Presiden AS Bill Clinton mengutus Walter Mondale datang ke Indonesia membujuk Soeharto agar sepenuhnya melakukan liberalisasi ekonomi sesuai resep dari IMF. Mondale menunjukkan jika Soeharto mengisi kabinetnya dengan menteri yang anti globalisasi maka pasar akan merespon negatif.

Di pasar global Indonesia tidak menghadapi persaingan biasa yang hanya menggantungkan diri pada mekanisme pasar, tetapi

Indonesia menghadapi kekuatan yang terpolo. Kekuatan ini bisa berbentuk TNCs, MNCs, pemerintahan negara kaya, lembaga dunia seperti IMF, World Bank dan WTO. Indonesia saat ini berada dalam jebakan “perang modern” yang dimulai dari krisis moneter 1997/1998. (Deliarnov, 2006).

PERAN BANK DUNIA DAN IMF DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA.

1. Peranan World Bank Dalam Perekonomian Indonesia

Selama rentang waktu tiga puluh tahun (tahun 1967-1998) dukungan pendanaan yang telah diberikan oleh Bank Dunia mencapai lebih dari US\$ 25 miliar. Porsi terbesar dari pembiayaan tersebut disedot oleh pembangunan infrastruktur yakni sebesar 40 %. Sektor pertanian mencapai porsi 19 %, sektor pembangunan perkotaan , air bersih dan sanitasi pencapai 10 %.(Subiyanto dan Riphath, editor, 2004 : 351)

Pada Dekade 1980-an, Bank Dunia mengawali program bantuan untuk merestrukturisasi sektor keuangan, sejalan upaya pemerintah melakukan deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Sedangkan selama kurun waktu 1990 - 1998 perhatian Bank Dunia tersedot pada masalah lingkungan hidup. Prasyarat lingkungan hidup dijadikan prasyarat dalam memberikan pinjaman pada Indonesia. Misalnya pinjaman pada sektor pertanian dikaitkan dengan penghutanan kembali (*reforestation*) yang memang sangat penting untuk dilakukan. Bahkan munculnya UU Lingkungan Hidup dan terbentuknya Bapedal juga tidak lepas dari dukungan Bank Dunia.

Perkembangan perekonomian Indonesia sejak Pelaita 1 sampai dengan Pelita VI sangat mengagumkan sehingga Indonesia dianggap sebagai salah satu “*Asian Miracle*”. Stabilitas ekonomi terjaga memungkinkan investor melakukan ekspansi. Bank Dunia terus menindak lanjuti pembiayaan bagi sektor keuangan (tahun fiskal 1993) yang bertujuan untuk memacu liberalisasi sektor keuangan Namun upaya ini gagal karena tidak mencapai hasil yang diharapkan dan membuahkan hasil krisis moneter pada tahun 1997.

Tabel Alokasi Pinjaman Bank Dunia perSektor (tahun 1969-1998)

Sektor	US\$ juta 1969-98	% 1969-98	% 1969-79	% 1980-90	% 1990-98
Infrastruktur(mi- gas, telkom, transport)	10,196	40.2	36.9	34.3	46.9
Pertanian Pendi- dikan,kesehatan, kependuduk- an,gizi	4,880	19.2	34.8	24.7	9.5
	3.301	13.0	7.3	11.6	16.0
Perkotaan, sani- tasi &air bersih Keuangan	2,624	10.4	6.1	6.6	15.1
	1,818	7.2	6.6	10.4	4.2
Penyesuaian Lain-lain	1,200	4.7	-	8.7	2.2
	1,351	5.3	8.3	3.7	6.1
Total	25,370	100.0	100.0	100.0	100.0

Sumber : Hutagalung,2004:353

Periode 200-2003 program Bank Dunia terfokus pada penurunan tingkat kemiskinan dengan pendekatan sentralisasi. Tiga tujuan utamanya adalah :1) melanjutkan pemulihan ekonomi; 2) menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab dan transparan serta 3) menyediakan pelayanan umum yang lebih baik terutama bagi kelompok miskin.

Pada tahun 2003 pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama dengan IMF serta menyusun paket Kebijakan Ekonomi Pasca Program IMF yang dikenal dengan “ *white paper*” untuk membuktikan upaya serius melanjutkan reformasi ekonomi mandiri kendali monitoring pada tangan pemerintah Indonesia. Persoalan ini terkendala dengan masih kuatnya KKN sehingga Bank Dunia menjadikan isu transparansi dan akuntabilitas menjadi elemen dalam setiap proyeknya.

Peranan IMF dalam Stabilitas Perekonomian Indonesia

Pada tahun 1967 Indonesia kembali kerjasama dengan IMF dengan kuota SDR 2 milyar. Sebelumnya juga pernah memberikan pinjaman pada Orde Lama sejumlah US\$ 102 juta. Selama tiga dasawarsa dukungan IMF berupa penyediaan fasilitas *Stand by Credit* (jangka menengah)

agar cadangan devisa di BI cukup guna menjaga nilai rupiah. Peran IMF menjadi sangat penting pada saat krisis moneter, yaitu pada saat terjadi kesepakatan antara IMF dengan Indonesia, yaitu berupa *Letter of Intent* (LOI).

Dengan adanya jaminan IMF serta komitmen pemerintah untuk melakukan reformasi di berbagai bidang seperti dituangkan dalam LOI, maka skema penjadwalan kembali hutang luar negeri yang jatuh tempo dapat dilakukan melalui skema Paris Club (hutang pemerintah) maupun London Club (hutang pemerintah/BI kepada swasta). Sejumlah US\$ 15 miliar pinjaman pokok telah dijadwalkan kembali pembayarannya melalui Paris Club (US\$ 4,2 miliar), Paris Club II (US\$ 5,4 miliar) dan Paris Club III (US\$ 5,4 miliar). Dengan penjadwalan ini maka tekanan dan beban APBN berkurang.

Secara umum program yang disarankan IMF untuk mengembalikan stabilitas makro-ekonomi dan kepercayaan pasar dapat dibagi menjadi tiga hal, yaitu :

1. Terwujudnya kerangka makro ekonomi yang kuat
2. Strategi komprehensif untuk melakukan restrukturisasi sektor keuangan
3. Kebijakan struktural secara umum (termasuk *good governance*)

Kebijakan makro ekonomi secara umum mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini ditunjukkan dengan membaiknya nilai tukar Rupiah pada Oktober 1998 dan tingkat bunga perbankan mulai menurun. Namun di satu sisi perekonomian mengalami pertumbuhan minus 13 % dan inflasi yang cukup tinggi.

Pada bulan Januari 2000 IMF kembali menyetujui US\$ 5 miliar *extended fund arrangement* (EEF) untuk tiga tahun kedepan dalam rangka mendukung program reformasi ekonomi dan struktural. Programnya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan inflasi, mengurangi hutang publik, mengembangkan pasar modal, reformasi perpajakan, mengurangi subsidi secara bertahap, desentralisasi fiskal, melanjutkan restrukturisasi perbankan dan korporasi, privatisasi dan reformasi diberbagai sektor, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan *good governance*.

Kemajuan yang cukup strategis dalam penanganan masalah fundamental yang terjadi sejak krisis 1997, mulai berhasil diatasi. Namun sayangnya kemajuan yang berarti tersebut tidak memicu kemajuan di sektor riil. Untuk menggerakkan sektor riil dan memperluas kesempatan kerja diperlukan investasi baru. Ketergantungan Indonesia terhadap IMF memang cukup besar namun hal tersebut dilakukan dalam rangka memulihkan dan menggerakkan perekonomian Indonesia. Namun sejalan dengan amanat MPR untuk segera mengakhiri program IMF, pemerintah telah mengeluarkan serangkaian paket kebijakan menjelang dan sesudah berakhirnya program kerja sama dengan IMF yang ditetapkan dengan Inpres No. 5 Tahun 2003.

Dalam rangka mengakhiri kerjasama dengan IMF maka pemerintah telah menyiapkan program pemulihan ekonomi yang pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pemerintah serta memonitor hasilnya. Peran IMF tetap ada dan dituangkan dalam *Post Program Monitoring* (PPM) yang merupakan proses konsultasi sebagai terjadi pada negara yang baru saja mengakhiri program dengan IMF.

Setelah tidak lagi kerjasama dengan IMF dan dalam rangka melanjutkan reformasi untuk mendayagunakan kemampuan sumber daya ekonomi dalam negeri dan meningkatkan daya tahan ekonomi secara berkelanjutan. Pemerintah Indonesia mengeluarkan paket kebijakan pada tahun 2003 dan 2004 yang berisi tiga sasaran pokok, yaitu :

1. Memelihara dan memantapkan stabilitas ekonomi makro;
2. Melanjutkan restrukturisasi dan reformasi sektor keuangan;
3. Meningkatkan investasi , ekspor dan penciptaan kesempatan kerja.

MASYARAKAT EKONOMI EROPA DAN ASIA

Masyarakat Ekonomi Eropa

Globalisasi telah membawa pengaruh kehidupan yang modern. Dimana modernisasi ditandai dengan peningkatan kemajuan teknologi dan informasi. Globalisasi telah merubah gaya hidup dan identitas masyarakat. Di Eropa, globalisasi telah merubah keadaan budaya masyarakat dengan

perubahan gaya hidup yang mengikuti tren masa kini baik dalam hal mode berpakaian maupun kebiasaan sehari-hari, masyarakat kini lebih menyukai mengkonsumsi produk korporasi dibandingkan dengan produk lokal, contohnya seperti *fast food*¹². Kemudian dalam hal sosial, saat ini Eropa tengah melakukan integrasinya dalam segala bidang, hal ini yang menciptakan suatu homogenitas di Eropa. Masyarakat masing-masing negara yang ada di Eropa kini memiliki identitas baru sebagai satu kesatuan masyarakat Uni Eropa. Tercapainya identitas baru tersebut didukung oleh adanya perjanjian Schengen, berupa perjanjian untuk menghapuskan pengawasan pada perbatasan dengan sesama negara Uni Eropa yang masuk dalam perjanjian tersebut. Kebijakan Schengen ini meliputi adanya Visa Schengen, dimana masyarakat Uni Eropa dalam mobilitasnya ke negara lain di dalam suatu kawasan hanya memerlukan satu visa. Adanya kebijakan tersebut secara langsung mendukung proses integrasi Eropa di era globalisasi saat ini. Perubahan sosial masyarakat ini berkaitan dengan aktivitas pekerjaan dan kelanjutan hidup bagi masyarakat Eropa yang saling tergantung satu dengan yang lain.

Globalisasi juga merubah pola sosial masyarakat yang dituntut bergerak cepat agar tidak tertinggal dengan ritme globalisasi yang ada, inilah yang kemudian menyebabkan masyarakat Uni Eropa memiliki sifat individualisme yang tinggi, yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana diri mereka bisa bertahan dengan arus globalisasi. Namun, lebih lanjut mengenai jalannya globalisasi di Eropa yang telah mempengaruhi berbagai sektor di Eropa dengan keuntungan dan keberhasilan yang dicapai, justru semakin hari menimbulkan dampak bagi masyarakat Eropa. Uni Eropa yang semakin terintegrasi dengan keberhasilan *full economic integration*, keberhasilan adanya kebijakan Schengen, dan lain sebagainya, dikemudian hari mendapat respon dari masyarakat Uni Eropa sendiri. Hal ini disebabkan oleh berbagai upaya yang dilakukan oleh Uni Eropa untuk menyesuaikan diri dengan arus globalisasi berdampak pada penurunan kualitas hidup masyarakat Uni Eropa. Penurunan kualitas hidup masyarakat Uni Eropa terjadi karena adanya dampak negatif yang dihasilkan dari jalannya proses globalisasi di Eropa

¹² Siswanto, Jurnal Kajian Wilayah: *Dinamika Masyarakat Eropa dan Globalisasi Politik: Perspektif Kajian Wilayah*, PS DR LIPI, Jakarta, 2014, hal. 98

yang semakin lama justru merugikan masyarakat. Dapat dilihat berbagai dampak tersebut sebagai berikut;¹³

Globalisasi memiliki dampak besar pada ranah sosial masyarakat di seluruh dunia tak terkecuali bagi Eropa. Globalisasi yang terjadi di Eropa lewat integrasi yang dijalankan oleh Uni Eropa telah menyebabkan adanya homogenitas masyarakat Eropa atau adanya identitas sebagai satu kesatuan masyarakat Uni Eropa. Hal tersebut menyebabkan masyarakat Eropa yang berasal dari tiap negara anggotanya kehilangan identitas asalnya. Masyarakat menjadi berkurang rasa nasionalismenya terhadap negara asalnya sehingga melupakan tradisi maupun adat istiadat lokal negaranya. Karena itu, perlahan budaya lokal mulai luntur akibat tergerus oleh globalisasi yang ada. Padahal jika dilihat, Eropa sebagai wilayah yang luas dan terdiri dari berbagai negara mempunyai budaya yang unik dan berbeda-beda, sehubungan dengan bahasa, norma-norma sosial, dan moralitas. Selain itu, dampak kebiasaan masyarakat yang bergantung pada produk-produk hasil korporasi telah melemahkan dan menurunkan produktivitas lokal yang merupakan hasil-hasil berasal dari alam dan diolah secara alami. Masyarakat Eropa lebih memilih produk yang modern dibandingkan produk lokal, padahal produk lokal memiliki potensi yang cukup baik.

Urbanisasi merupakan istilah yang menggambarkan perpindahan masyarakat dari desa ke kota. Perpindahan tersebut dimaksudkan untuk mencari kehidupan yang lebih menjanjikan. Itulah yang terjadi di Eropa, dimana masyarakat Eropa banyak yang meninggalkan desa kecil mereka dan memilih tinggal di kota untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka dan mengikuti arus globalisasi. Selepas ditinggalkan oleh masyarakatnya, desa-desa tersebut mulai terpinggirkan, budaya-budaya lokal setempat secara tidak langsung juga ikut terpinggirkan, dan perlahan Eropa tidak lagi memiliki keragaman budaya masyarakatnya. Tata sosial yang ada di masyarakat juga berubah, maka dari itu dikemudian hari terjadi banyak penyimpangan sosial dikarenakan masyarakat yang tidak bisa mengikuti arus globalisasi. Karena itu pula, terjadi ketimpangan sosial

¹³ European Union, *European Union : Environment*, EUROPA, diakses pada laman https://eropa.eu/european-union/topic/environment_en_

antara masyarakat kota dan masyarakat desa, baik dalam segi ekonomi, pendidikan, maupun kesejahteraan.

Dampak-dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat Eropa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, merupakan alasan hadirnya respon yang berasal dari masyarakat Eropa itu sendiri. Masyarakat Eropa perlahan mulai menyadari bahwa globalisasi tidak selalu memberikan hal positif bagi kehidupan mereka, namun perlahan juga memberikan efek negatif. Globalisasi yang ditandai dengan integrasi Eropa telah menyebabkan penurunan kualitas hidup masyarakat.

Masyarakat tidak lagi dapat menikmati kehidupan mereka, karena banyaknya tuntutan yang hadir dalam hidup mereka. Mereka juga dituntut untuk bergerak cepat dan mampu mengerjakan segala kegiatannya secara efektif dan efisien. Masyarakat Eropa mulai jengah dan lelah dengan pola kehidupan mereka yang selalu dijejali oleh kemajuan pengetahuan era modern, pola hidup yang serba cepat, dan teknologi yang kekinian. Bukan itu saja, kehidupan sosial mereka yang lebih individualis juga dirasa merugikan karena berdampak kurangnya aktivitas sosial mereka dan adanya tekanan dalam diri mereka yang tidak bisa dibagikan ke orang lain karena kurangnya teman. Kehidupan yang cepat ternyata belum bias memberikan kehidupan yang lebih baik. Adanya penurunan perhatian terhadap kualitas lingkungan juga mendapat respon dari masyarakat Eropa yang menginginkan perbaikan lingkungan, agar efek negatif dari aktivitas industri berupa polusi dapat berkurang. Solusi adanya energi alternatif untuk mendukung perbaikan lingkungan juga diharapkan oleh masyarakat.

Masyarakat Eropa juga menginginkan kembali ke desa mereka, dimana mereka mengidamkan sebuah kota kecil yang nyaman untuk ditinggali. Masyarakat Eropa tidak menentang adanya globalisasi dan berbagai integrasi yang telah dilakukan oleh Uni Eropa baik dalam integrasi ekonomi maupun politik. Karena globalisasi adalah sebuah fenomena yang berasal dari sejarah panjang umat manusia dan tidak bisa dihindarkan. Harus diakui bahwa globalisasi telah memberikan keuntungan ekonomi besar yang menyebabkan Eropa sebagai salah satu wilayah raksasa ekonomi di dunia. Namun, masyarakat Eropa menginginkan adanya perbaikan dan penataan kembali aspek-

aspek yang mulai hilang akibat adanya arus globalisasi, seperti aspek lingkungan, sosial, budaya, kesehatan, maupun sistem politik Uni Eropa. Agar masyarakat bisa kembali merasakan kehidupan mereka yang tidak tergesa-gesa dan bisa lebih memaknai kehidupan mereka. Masyarakat Eropa menginginkan kembali segala aktivitas yang mereka kerjakan dapat dinikmati dan memberikan arti hidup untuk mereka. Sudah sewajarnya, manusia selalu mendambakan kehidupan yang damai, baik, dan berkualitas. Manusia akan selalu mencari kenyamanan, kehebatan maupun kecanggihan teknologi tidak akan mampu menggantikan kenyamanan hidup untuk mereka.¹⁴

Masyarakat Ekonomi Asean

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan satu pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara, bertujuan untuk meningkatkan investasi asing di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia yang juga akan membuka arus perdagangan barang dan jasa dengan mudah dengan negara-negara di Asia Tenggara.

Pembentukan MEA dilandaskan pada empat pilar. Pertama, menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan pusat produksi. Kedua, menjadi kawasan ekonomi yang kompetitif. Ketiga, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang seimbang, dan pilar terakhir adalah integrasi ke ekonomi global. Penyatuan ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing kawasan, mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan angka kemiskinan dan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat ASEAN. Integrasi ini diharapkan akan membangun perekonomian ASEAN serta mengarahkan ASEAN sebagai tulang punggung perekonomian Asia. Dengan dimulainya MEA maka setiap negara anggota ASEAN harus meleburkan batas teritori dalam sebuah pasar bebas. MEA akan menyatukan pasar setiap negara dalam kawasan menjadi pasar tunggal. Sebagai pasar tunggal, arus barang dan jasa yang bebas merupakan sebuah kemestian. Selain itu negara dalam kawasan juga diharuskan membebaskan arus investasi, modal dan tenaga terampil. MEA memang sebuah kesepakatan yang mempunyai tujuan yang luar biasa namun beberapa pihak juga mengkhawatirkan kesepakatan ini. Arus

¹⁴ Joseph STIGLITZ, *Making Globalisation Work : The Multinational Corporation*, London, Penguin Alenn lane, 2006, hlm.188

bebas barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja tersebut tak pelak menghadirkan kekhawatiran tersendiri bagi beberapa pihak. Dalam hal ini pasar potensial domestik dan lapangan pekerjaan menjadi taruhan. Sekedar bahan renungan, indek daya saing global Indonesia tahun 2013-2014 (rangking 38) yang jauh di bawah Singapura (2), Malaysia (24), Brunai Darussalam (26) dan satu peringkat di bawah Thailand (37). Di sisi lain coba kita lihat populasi Indonesia yang hampir mencapai 40% populasi ASEAN. Sebuah pasar yang besar tapi tak didukung daya saing yang maksimal. Jangan sampai Indonesia mengulang dampak perdagangan bebas ASEAN China. Berharap peningkatan perekonomian malah kebanjiran produk China.

Setiap negara di Asean yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama, perlu menciptakan sebuah wadah atau badan dimana mereka saling berusaha untuk mewujudkan tujuan tersebut. Dan hal ini lah yang menjadi sebab adanya tujuan dari sebuah organisasi. Tujuan dicerminkan oleh sasaran yang harus dilakukan baik dalam jangka pendek, maupun jangka panjang.

Adapun tujuan dari MEA adalah Untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN, membentuk kawasan ekonomi antar negara ASEAN yang kuat. Bahwa saat ini di Amerika dan Eropa masih mengalami krisis ekonomi. Dan dengan terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN diharapkan akan bisa mengatasi masalah-masalah dalam bidang perekonomian antar negara ASEAN. Sehingga kasus krisis ekonomi seperti di Indonesia pada tahun 1997 dulu tidak terulang kembali. Terciptanya kawasan pasar bebas ASEAN. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi pelaku usaha di negara ASEAN. Persaingan produk dan jasa antar negara ASEAN akan diuji di sini. Bagi pelaku usaha dan jasa hendaknya mulai sekarang meningkatkan kualitas produk. Bagaimana produk itu agar dicintai konsumen. Dengan membuat produk yang berkualitas serta harga terjangkau pasti akan bisa bersaing dengan produk negara ASEAN lainnya.

1. Peluang dan tantangan Indonesia dalam kegiatan Masyarakat Ekonomi ASEAN

a. Pada Sisi Perdagangan

Menurut Santoso pada tahun 2008 Bagi Indonesia sendiri, MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia. Di sisi lain, muncul tantangan baru bagi Indonesia berupa permasalahan homogenitas komoditas yang diperjual-belikan, contohnya untuk komoditas pertanian, karet, produk kayu, tekstil, dan barang elektronik.

b. Pada Sisi Investasi

Kondisi ini dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya Foreign Direct Investment (FDI) yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (human capital) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia.

c. Aspek Ketenagakerjaan

Terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena dapat banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Selain itu, akses untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. MEA juga menjadi kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Riset terbaru dari Organisasi Perburuhan Dunia atau ILO menyebutkan pembukaan pasar tenaga kerja mendatangkan manfaat yang besar. Selain dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru, skema ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara. Pada 2015 mendatang, ILO merinci bahwa permintaan tenaga kerja profesional akan naik 41% atau sekitar

14 juta. Sementara permintaan akan tenaga kerja kelas menengah akan naik 22% atau 38 juta, sementara tenaga kerja level rendah meningkat 24% atau 12 juta. Namun laporan ini memprediksi bahwa banyak perusahaan yang akan menemukan pegawainya kurang terampil atau bahkan salah penempatan kerja karena kurangnya pelatihan dan pendidikan profesi. Jadi, penulis menyimpulkan bahwa peluang dan tantangan Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN sangatlah besar. Indonesia dapat memperoleh beberapa keuntungan diantaranya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun hal itu juga harus diikuti oleh perbaikan kualitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan sumber daya alam semaksimal mungkin.

d. Resiko yang dihadapi Indonesia saat MEA

Competitionrisk akan muncul dengan banyaknya barang impor yang akan mengalir dalam jumlah banyak ke Indonesia yang akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk-produk luar negeri yang jauh lebih berkualitas. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan defisit neraca perdagangan bagi Negara Indonesia sendiri.

Exploitationrisk dengan skala besar terhadap ketersediaan sumber daya alam oleh perusahaan asing yang masuk ke Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah sumber daya alam melimpah dibandingkan negara-negara lainnya. Tidak tertutup kemungkinan juga eksploitasi yang dilakukan perusahaan asing dapat merusak ekosistem di Indonesia, sedangkan regulasi investasi yang ada di Indonesia belum cukup kuat untuk menjaga kondisi alam termasuk ketersediaan sumber daya alam yang terkandung. employmentrisk dilihat dari sisi pendidikan dan produktivitas Indonesia masih kalah bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand serta fondasi industri yang bagi Indonesia sendiri membuat Indonesia berada pada peringkat keempat di ASEAN.

Menurut Media Indonesia, Kamis 27 Maret 2014, dengan adanya pasar barang dan jasa secara bebas tersebut akan mengakibatkan tenaga kerja asing dengan mudah masuk dan

bekerja di Indonesia sehingga mengakibatkan persaingan tenaga kerja yang semakin ketat di bidang ketenagakerjaan. Saat MEA berlaku, di bidang ketenagakerjaan ada 8 (delapan) profesi yang telah disepakati untuk dibuka, yaitu insinyur, arsitek, perawat, tenaga survei, tenaga pariwisata, praktisi medis, dokter gigi, dan akuntan. Hal inilah yang akan menjadi ujian baru bagi masalah dunia ketenagakerjaan di Indonesia karena setiap negara pasti telah bersiap diri di bidang ketenagakerjaannya dalam menghadapi MEA. Bagaimana dengan Indonesia? Dalam rangka ketahanan nasional dengan tetap melihat peluang dan menghadapi tantangan bangsa Indonesia di era MEA nantinya, khususnya terhadap kesiapan tenaga kerja Indonesia sangat diperlukan langkah-langkah konkrit agar bisa bersaing menghadapi tenaga kerja asing tersebut. Namun disisi lain, dengan adanya MEA, tentu akan memacu pertumbuhan investasi baik dari luar maupun dalam negeri sehingga akan membuka lapangan pekerjaan baru. Selain itu, penduduk Indonesia akan dapat mencari pekerjaan di negara ASEAN lainnya dengan aturan yang relatif akan lebih mudah dengan adanya MEA ini karena dengan terlambatnya perekonomian nasional saat ini dan didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran per february 2014 dibandingkan Februari 2013 hanya berkurang 50.000 orang. Padahal bila melihat jumlah pengangguran tiga tahun terakhir, per Februari 2013 pengangguran berkurang 440.000 orang, sementara pada Februari 2012 berkurang 510.000 orang, dan per Februari 2011 berkurang sebanyak 410.000 orang (Koran Sindo, Selasa, 6 Mei 2014). Dengan demikian, hadirnya MEA diharapkan akan mengurangi pengangguran karena akan membuka lapangan kerja baru dan menyerap angkatan kerja yang ada saat ini untuk masuk ke dalam pasar kerja. Untuk itu, penulis menyimpulkan bahwa resiko yang akan muncul dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah persaingan industri lokal dengan industri asing, pengeksploitasian sumber daya alam oleh Negara asing, serta persaingan tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja asing yang lebih berkualitas.

e. Cara menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

Banyak cara sekaligus persiapan untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015. Hal ini juga merupakan tantangan karena sejatinya pola pikir dan semangat pemerintah serta para pelaku ekonomi Indonesia masih seperti biasanya.

- 1). Menurut ekonom dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Edy Suandi Hamid, pemerintah dan pelaku ekonomi harus lebih ofensif menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 dengan memperluas pasar barang, jasa, modal, investasi, dan pasar tenaga kerja. Adanya MEA harus dipandang sebagai bertambahnya pasar Indonesia menjadi lebih dari dua kali lipat, yakni dari 250 juta menjadi 600 juta,” katanya. Dengan pola pikir dan semangat seperti itu, dia berharap Indonesia dapat memetik manfaat optimal dari MEA. Perekonomian harus didorong lebih cepat tumbuh, ekspansif, dan berdaya saing, bukan sebaliknya.
- 2). Menurut diplomat senior Makarin Wibisono juga mengingatkan bahwa dalam menghadapi MEA 2015, Indonesia perlu memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan sektor jasa. “Liberalisasi pasar jasa akan menguntungkan bagi Indonesia dalam dinamika MEA,” kata Makarim dalam seminar Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Tiongkok di Jakarta, beberapa waktu lalu. Menurut dia, liberalisasi pasar jasa menguntungkan karena meningkatkan kualitas serta menentukan biaya kewajaran bagi tenaga kerja sehingga kemudian meningkatkan daya saing di sektor industri. Pasar jasa yang efisien, menurut Makarim, akan meningkatkan pilihan konsumen, produktivitas, kompetisi, dan kesempatan untuk pembangunan sektor jasa baru. “Jika terjadi inefisiensi, dampak negatifnya pada produktivitas, inovasi, distribusi teknologi, dan menghalangi tercapainya pertumbuhan optimal,” kata Duta Besar Indonesia untuk PBB (2004–2007) ini.

- 3). Menurut rektor Universitas Sebelas Maret (Solo) Ravik Karsidi salah satu persiapan UNS adalah dengan mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) dengan hardskill dan softskill. Dari segi hardskill, UNS mempersiapkan kurikulum agar mahasiswanya mampu bersaing dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri. Sementara itu, dari segi softskill, UNS membekali mahasiswanya dengan persiapan spiritual dan mental melalui pelatihan spiritual quotient (SQ). Program ini ditindaklanjuti dengan pelatihan softskill di tingkat fakultas. Di antara pelatihan itu adalah tentang kepemimpinan, komunikasi dan kemampuan bahasa. Jadi dapat penulis simpulkan, untuk mengatasi tantangan serta resiko yang mungkin akan muncul dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN dapat dilakukan dengan membekali diri dengan ilmu pengetahuan, menanamkan rasa cinta terhadap produk dalam negeri, serta mempertajam softskill dan hardskill masyarakat.

KAWASAN BEBAS PERDAGANGAN ASEAN

AFTA (*ASEAN Free Trade Area*), bagi negara-negara pesertanya, sekarang adalah sebuah kenyataan yang mau tidak mau harus dihadapi. Ini karena sejak tanggal 1 Januari 2002, kesepakatan AFTA tersebut telah resmi diberlakukan, khususnya di negara ASEAN-6, yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand (di Vietnam mulai diberlakukan pada tahun 2006, Laos dan Myanmar pada tahun 2008, dan Kamboja pada tahun 2010).

Dengan diberlakukannya AFTA ini, maka negara-negara anggota harus menurunkan tarif impornya, menjadi hanya tinggal 0%-5%, terhadap barang-barang dari negara-negara sesama anggota AFTA yang telah dimasukkan ke dalam Daftar Inklusif (*Inclusive List*) dan telah memenuhi ketentuan yang disepakati (tentang kandungan produk ASEAN) dalam kesepakatan AFTA tersebut. Pada akhirnya, diharapkan keseluruhan tarif ini akan dihapuskan sama sekali (menjadi 0%), pada

tahun 2010 bagi negara ASEAN-6 dan 2015 bagi negara ASEAN-4, sehingga akan menciptakan kawasan perdagangan regional Asia Tenggara yang benar-benar bebas¹⁵.

Hal tersebut diperkuat dengan penandatanganan kesepakatan cetak biru AEC (*ASEAN Economic Community*) 2015 dan *ASEAN Charter* oleh para pemimpin negara ASEAN pada KTT ASEAN ke-13, 20 November 2007. Bila kita berbicara mengenai kawasan perdagangan ASEAN atau yang lebih dikenal sebagai AFTA, sesungguhnya kita sedang membicarakan 2 aspek dalam masalah hubungan internasional, khususnya dalam bidang ekonomi-politik. Aspek yang pertama adalah aspek regionalisme. Ini karena obyek yang kita bahas adalah ASEAN, yang merupakan organisasi regional negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Sedangkan aspek yang kedua adalah aspek liberalisasi perdagangan. Ini karena apa yang kita bahas dalam

AFTA ini sesungguhnya adalah bagian dari upaya penciptaan kawasan perdagangan bebas, yang memungkinkan masing-masing negara untuk berdagang dengan negara lainnya secara bebas, tanpa dikenai hambatan tariff maupun non-tarif.

Secara normatif, upaya untuk memunculkan AFTA ini lahir dari pemikiran tentang bagaimana meningkatkan hubungan (dan juga kerjasama), khususnya dalam bidang ekonomi, yang erat di antara negara-negara anggota ASEAN. Hal ini dipandang sebagai salah satu perwujudan dari tujuan bersama ASEAN, sebagaimana yang termuat di dalam Deklarasi Bangkok pada pasal 2 ayat 5, yaitu *“To collaborate more effectively for the greatest utilization of their agriculture and industries, the expansions of their trade, the improvement of their transportation and communication facilities, and the raising of the living standart of their peoples”*¹⁶.

Selain sebagai bagian dari kerja sama ASEAN, lahirnya AFTA juga harus disadari merupakan salah satu dampak dari munculnya tren liberalisasi ekonomi (termasuk perdagangan) yang melanda dunia.

¹⁵ Bambang Sugeng, *How AFTA Are You?: A Question to Enterpreneurs Who Act Locally But Think Globally*, hal.22

¹⁶ Isi Deklarasi ASEAN yang ditanda tangani di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 dan menjadi dasar bagi berdirinya ASEAN.

Perkembangan tren liberalisasi ini terutama disponsori oleh kelompok-kelompok yang secara tradisional memang menganut paham kapitalisme liberalisme (Amerika, Jepang, dan negara-negara Eropa Barat). Dalam pandangan kelompok ini, efisiensi dan efektifitas ekonomi hanya dapat dicapai apabila aktifitas ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Aktivitas perdagangan antar negara dilaksanakan berdasarkan konsep keunggulan komparatif (*comparative advantage*)¹⁷, yang memungkinkan setiap negara untuk terlibat meskipun tidak memiliki keunggulan mutlak (*absolute advantage*) dalam bidang apa pun. Pemerintah dalam hal ini hanya bertugas untuk mengawasi apakah mekanisme pasar tersebut berjalan dengan baik dan tidak terjadi pelanggaran atas aturan yang ada. Paham kapitalisme-liberal ini memperoleh momentum yang tepat untuk berkembang ke seluruh dunia ketika perang dingin berakhir.

Berakhirnya perang dingin telah membawa berbagai perubahan dalam arah ekonomi politik dunia. Dua perubahan yang paling penting tersebut adalah,

1. fokus perhatian negara-negara di dunia beralih dari masalah politik (pada masa perang dingin) menjadi pada masalah ekonomi, yang didasari oleh keinginan untuk meningkatkan kemakmuran masing-masing negara, dan
2. penyebaran paham kapitalisme dan liberalisme ekonomi oleh negara-negara pemenang perang dingin (Amerika dan sekutu-sekutunya) menjadi tidak terbendung, karena saat ini mereka tidak lagi memiliki pesaing.

Maka paham kapitalisme dan liberalisme ekonomi tersebut, termasuk dalam bidang perdagangan, kemudian menyebar ke seluruh dunia, baik yang diwujudkan dalam bentuk kesepakatan bilateral, multilateral (misalnya WTO), maupun regional (misalnya AFTA).

Berangkat dari kenyataan tersebut, maka sesungguhnya arus upaya liberalisasi perdagangan yang muncul dewasa ini (yang salah satu bentuknya adalah lahirnya berbagai kesepakatan perdagangan bebas) adalah suatu *hegemonic power* yang mau tidak mau harus diikuti

¹⁷ Robert O'Brien & Marc Williams, *Global Political Economy: Evaluations and Dynamics*, hal. 139

oleh setiap negara di dunia ini jika dia tidak ingin dikucilkan dari pergaulan ekonomi politik internasional. Dari kenyataan tersebut juga, maka Indonesia mau tidak mau dituntut untuk mampu mengambil kebijakan dari strategi perdagangan yang tepat, agar dapat menghadapi pemberlakuan AFTA tersebut sebaik mungkin dan dapat memperoleh kemanfaatan yang sebesar-besarnya dari kesepakatan tersebut. Dalam hal ini, kebijakan dan strategi yang diambil tersebut harus dapat menjadi jembatan, bahwa di satu sisi pemberlakuan AFTA ini dan keikutsertaan Indonesia di dalamnya adalah sesuatu kenyataan yang harus dipatuhi, namun di sisi lain Indonesia harus mampu mengambil kesempatan dari pemberlakuan AFTA ini guna memperoleh kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional.

Dalam tulisannya Stephenson menyatakan bahwa dengan keberhasilan kesepakatan perdagangan di bawah GATT (*General Agreement on Trade and Tariff*) dan WTO (*World Trade Organization*) serta prospek ke depannya, maka kesepakatan perdagangan regional, baik yang keanggotaannya bersifat tertutup (AFTA) maupun yang bersifat terbuka (APEC) akan semakin tidak menarik. Jika pun diteruskan, itu lebih disebabkan oleh alasan strategis untuk kebijakan luar negeri daripada oleh alasan ekonomi¹⁸. Bila kita mencermati, sesungguhnya pendapat ini muncul dari pandangan yang menganggap bahwa upaya mencapai efisiensi dan maksimisasi ekonomi melalui liberalisasi perdagangan tersebut tidak akan bisa tercapai bila masih ada sekat-sekat regional, karenanya liberalisasi yang harus dikembangkan bukanlah liberalisasi yang bersifat regional, melainkan liberalisasi global, yang melibatkan seluruh negara yang ada di dunia ini.

Mari Elka Pangestu menyebutkan paling tidak ada 3 kritik yang dialamatkan pada pelaksanaan AFTA saat ini¹⁹, yaitu masa transisi dari penandatanganan kesepakatan AFTA (Januari 1992) sampai berlaku efektifnya kesepakatan tersebut (1 Januari 2002) dinilai terlalu lama, sehingga menyebabkan hilangnya banyak kesempatan yang bisa diperoleh bila kesepakatan itu diberlakukan lebih cepat. Kenyataannya, masyarakat Eropa yang memulai kesepakatan Uni Eropanya pada

¹⁸ Sherry Stephenson, *ASEAN and The Multilateral Trading System, Law and Policy in International Business*.

¹⁹ Jayant Menon, *The Evolving ASEAN Free Trade Area: Widening And Deepening*.

waktu yang hampir bersamaan dengan lahirnya AFTA, saat ini malah telah berhasil membuat mata uang bersama Eropa. Sebaliknya ASEAN, baru pada tahun 2002 ini mulai melaksanakan liberalisasi perdagangan yang sebenarnya telah disepakati sejak lama, kemudian AFTA dinilai terlalu memfokuskan diri pada upaya penghapusan hambatan tarif dan melupakan hambatan non tarif. Padahal, kelancaran perdagangan menuju liberalisasi yang sesungguhnya juga sangat dipengaruhi oleh berkurangnya hambatan non tarif, selanjutnya kurangnya keberadaan pusat informasi yang diperlukan baik untuk menyampaikan informasi kepada pihak swasta maupun menerima masukan dari mereka berkaitan dengan pelaksanaan AFTA ini.

Persoalannya bagi setiap negara adalah bagaimana menjadikan semua pelaku ekonomi di dalam negeri menjadi efisien dan siap untuk menghadapi liberalisasi perdagangan tersebut, dan bagaimana agar dapat memperoleh surplus dampak positif yang sebesar besarnya dari kesepakatan liberalisasi perdagangan yang mereka ikuti tersebut.

Dengan jumlah penduduk yang mencapai 500-600 juta jiwa, perekonomian ASEAN memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan lebih besar lagi, dimana masing-masing negara anggota memiliki kesempatan untuk memperoleh bagian peningkatan kesejahteraan dari upaya pengembangan ekonomi ASEAN tersebut.

Jayant Menon lebih jauh mengatakan bahwa proses harmonisasi yang diperlukan tersebut bukan hanya dalam hal ketentuan hukum, tapi juga dalam hal standar yang digunakan, tes dan sertifikasi yang diwajibkan atas produk, prosedur kepabean, kebijakan investasi asing, konsultasi makro ekonomi, serta aturan dalam hal kompetisi yang adil²⁰. Tanpa itu semua, upaya untuk meningkatkan volume perdagangan antar negara-negara ASEAN melalui penghapusan hambatan tarif dan non tarif akan menjadi sia-sia, sebab para pelaku ekonomi masih tetap akan bingung dalam menghadapi system yang berbeda-beda yang diberlakukan oleh masing-masing negara ASEAN.

²⁰ J.amil Maidan Flores, *ASEAN Economic Cooperation: Helping The Breadwinners of Southeast Asia*, hal.39-60

Pada akhirnya, **Jamil Maidan Flores** dalam bukunya yang berjudul *ASEAN Economic Cooperation: Helping The Breadwinners of Southeast Asia* menyebutkan bahwa kerjasama ekonomi yang dicanangkan ASEAN sesungguhnya mencakup bidang-bidang yang lebih luas lagi, seperti bidang jasa, pengembangan industri, keuangan dan perbankan, investasi, pertanian dan kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, serta transportasi dan komunikasi²¹.

Maka keberhasilan kerjasama dalam bidang-bidang perdagangan ini, khususnya kesepakatan AFTA ini, sesungguhnya akan menjadi indikator bagi kemungkinan keberhasilan kerjasama dalam bidang – bidang lainnya tersebut. Bila ini berhasil maka yang lain pun diperkirakan akan berhasil, dan sebaliknya bila ini gagal maka yang lain pun diperkirakan akan gagal pula.

Kesepakatan liberalisasi perdagangan ASEAN (AFTA), sesungguhnya lahir dari kegundahan para pemimpin negara-negara ASEAN terhadap kondisi perdagangan intra-ASEAN yang selama ini menunjukkan hasil yang kurang baik. Meskipun kerjasama ASEAN (mulai dari deklarasi Bangkok sampai dengan penandatanganan kesepakatan pembentukan AFTA) telah berlangsung 25 tahun, nyatanya nilai perdagangan intra-ASEAN masih belum menunjukkan nilai yang signifikan, dengan pertumbuhan yang mengalami stagnasi.

Secara luas, pembentukan AFTA bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dengan menjadikannya sebagai basis produksi pasar dunia.²² Selain itu pembentukan AFTA ini juga bertujuan untuk mengembangkan perdagangan intra-ASEAN serta meningkatkan skala ekonomi dan spesialisasi industri-industri yang ada di negara-negara ASEAN²³.

Karenanya sasaran yang diharapkan dari pembentukan AFTA ini bukan hanya pengembangan dalam bidang perdagangan, namun juga pengembangan dalam bidang investasi. Dengan keberadaan AFTA ini, investor diharapkan menjadi semakin tertarik untuk menanamkan modalnya di kawasan ASEAN. Sebab ketika mereka

²¹

²²

²³ Ditjen Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional, *AFTA Dan Implementasinya*, hal.2

menanamkan modalnya dan memproduksi di salah satu negara ASEAN, mereka akan dapat juga melayani keseluruhan kawasan ASEAN dengan ketentuan AFTA tersebut, dimana barang-barang produksi ASEAN akan memperoleh keistimewaan dalam hal pengenaan tarif dan hambatan non tarif. Untuk itu maka AFTA ini dikembangkan agar dapat menjadi kesepakatan regional yang terbuka (*open regionalism*), yang di satu sisi berupaya untuk mengintegrasikan ekonomi kawasan, namun di sisi lain juga menyambut baik hubungan ekonomi dengan negara-negara dari luar kawasan.

Meski dimaksudkan untuk mengembangkan perekonomian ASEAN, khususnya untuk meningkatkan nilai perdagangan intra-ASEAN, kenyataannya tidak semua pihak satu suara mengenai keberadaan AFTA ini. Di Indonesia sendiri perbedaan pandangan tersebut juga kerap terjadi antara kelompok yang mendukung dengan kelompok yang menentang keberadaan AFTA ini. Bahkan kelompok pengusaha yang tadinya diharapkan akan dapat memperoleh manfaat besar dari kesepakatan AFTA ini, nyatanya tidak semua merasa senang dengan keberadaan AFTA ini. Namun demikian, satu hal yang harus disadari adalah bahwa pemberlakuan AFTA mulai tahun 2002 dan keikutsertaan Indonesia di dalamnya kini adalah satu kenyataan yang tak dapat ditolak. Sebagai konsekuensinya, seluruh pelaku ekonomi di Indonesia (khususnya pemerintah) diharuskan untuk menciptakan aturan-aturan perdagangan yang sejalan dengan isi kesepakatan AFTA tersebut.

Di sisi lain, pemberlakuan AFTA ini tentunya akan membawa dampak bagi pelaku ekonomi nasional. Dampak tersebut akan bersifat negative bagi pelaku ekonomi yang tidak efisien sehingga tidak mampu bersaing, namun akan bersifat positif bagi pelaku ekonomi yang sudah efisien sehingga mampu bersaing. Maka pemikiran yang seharusnya dikembangkan bukan lagi berbicara tentang masalah penerimaan ataupun penolakan terhadap AFTA, melainkan bagaimana AFTA tersebut dapat disikapi dengan bijak. Dengan itu Indonesia kemudian diharapkan mampu mengambil kebijakan-kebijakan perdagangan yang tepat agar dapat memanfaatkan keberadaan AFTA ini sebaik mungkin bagi kepentingan nasional.

Dalam konteks kebijakan secara luas, Sjamsumar Dam dan Riswandi menyebutkan paling tidak ada 5 hal pokok yang harus dilakukan Indonesia dalam menghadapi AFTA ini, agar di satu sisi dapat mendorong peningkatan kegiatan perdagangan intra- ASEAN sebagaimana yang dicita-citakan dari pembentukan AFTA ini, namun di sisi lain juga dapat mengoptimalkan pemanfaatan AFTA bagi pengembangan ekonomi nasional. Lima hal pokok tersebut adalah:

1. Memantapkan organisasi pelaksana AFTA yang ada pada level Nasional.
2. Meningkatkan promosi dan penetrasi pasar ke negara-negara ASEAN lainnya.
3. Meningkatkan efisiensi dan produktifitas pelaku ekonomi dalam negeri.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia nasional.
5. Dan melakukan upaya untuk melindungi industri kecil nasional.

Pada level yang lebih implementatif dalam hal kebijakan perdagangan, Gandaprawira menyebutkan bahwa pemerintah harus melakukan upaya deregulasi kebijakan di bidang perdagangan.

Deregulasi tersebut misalnya dengan menyederhanakan hambatan non tarif yang ada, memasukkan beberapa ketentuan kuota yang kompleks ke dalam sistem tarif yang sederhana, serta mengurangi berbagai hambatan perizinan di bidang investasi. Ini penting mengingat selama ini kebijakan perdagangan Indonesia terkenal sarat dengan hambatan birokratis dan berbelit-belit, sehingga mempersulit kegiatan perdagangan itu sendiri. Selain itu, deregulasi kebijakan perdagangan yang diambil tersebut hendaknya tidak hanya dalam bidang impor (yang memang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap negara anggota AFTA), tapi juga dalam bidang ekspor. Hal ini untuk mempermudah para pelaku ekonomi nasional guna memperluas kegiatan ekonominya melalui pengembangan kegiatan ekspor. Karena sesungguhnya kesempatan untuk mengembangkan kegiatan ekspor inilah yang diharapkan oleh setiap negara ketika ia memutuskan untuk mengikuti sebuah kesepakatan liberalisasi perdagangan.

Upaya deregulasi kebijakan dan birokrasi, serta pengambilan strategi perdagangan yang tepat ini terutama diharapkan dapat dimotori oleh Departemen Perdagangan (khususnya melalui Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Direktorat Perdagangan Luar Negeri, dan Badan pengembangan ekspor Nasional) selaku regulator utama kegiatan perdagangan luar negeri di Indonesia, dan oleh Departemen Keuangan (melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) selaku ujung tombak dalam proses pengawasan terhadap kegiatan ekspor dan impor di lapangan.²⁴

DAMPAK EEC, NAFTA DAN AFTA

Beberapa studi literatur studi yang dilakukan oleh ADB 2002 dengan menggunakan model gravitasi untuk melihat dampak pembentukan suatu PTA. Terhadap perdagangan di intra maupun extra kawasan pada 11 blok perdagangan yang menerapkan PTA selama tahun 1980 sampai 2000 diperoleh kesimpulan bahwa AFTA dan NAFTA merupakan blok perdagangan yang memiliki *intra-bloc effect*, yang tidak signifikan dengan kata lain AFTA dan NAFTA tidak mampu menciptakan peningkatan perdagangan bagi negara-negara anggotanya sehingga perdagangan di intra kawasan relatif tidak meningkat sementara pada blok perdagangan lainnya APEC, ECO dan Mercosur mampu mendorong peningkatan perdagangan bagi negara anggotanya.

Namun di sisi lain AFTA berperan dalam peningkatan perdagangan di Asia secara signifikan sedangkan di kawasan lain yang perdagangannya intra kawasan meningkat, justru tidak signifikan peranannya dalam perdagangan dunia.

Fenomena di atas terjadi dengan hasil studi sebelumnya yang juga menggunakan strategi untuk melihat pengaruh PTA terhadap perdagangannya di 58 negara yang bergabung dalam kawasan perdagangan bebas di Eropa. Amerika Utara, Amerika Latin, Amerika Tengah, Afrika Timur Tengah dan ASEAN selama periode 1980 sampai 1996 hasil studi empirisnya untuk AFTA menunjukkan koefisien perdagangan intra ASEAN yang negatif dan koefisien intra ASEAN tidak signifikan. Temuan

²⁴ Nattapong Thongpakde, *ASEAN Free Trade Area: Progress And Challenges*, hal.51

ini mengidentifikasi bahwa perdagangan interaksi yang tidak mampu didorong AFTA bahkan cenderung menyebabkan terjadinya pengalihan perdagangan intra ASEAN.²⁵

Namun hasil study oleh Elliot dan Ikemoto (2004) menghasilkan prediksi yang berbeda dengan kedua penelitian di atas. Dengan menggunakan model yang sama (model gravitasi) hasil estimasinya menunjukkan bahwa dampak AFTA pada awal pembentukannya tidak signifikan dalam mendorong perdagangan intra-ASEAN, bahkan lebih merendah dibandingkan sebelum AFTA terbentuk (khususnya selama periode 1988-1992). Namun seiring dengan berjalannya waktu, AFTA memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan perdagangan intra-ASEAN. Menurut pengalaman krisis ekonomi 1997-1998 yang menimpa hampir seluruh Asia Tenggara, menurutnya, menyadarkan negara-negara ASEAN bahwa segala sesuatu yang terjadi di negara lain kawasan ini akan berdampak pada negara lainnya. Hal itu memberikan dorongan semangat ASEAN untuk lebih meningkatkan kerja sama, termasuk di bidang perdagangan, karena dengan demikian dapat memberikan ketahanan kawasan dalam menangkul guncangan serupa yang mungkin terjadi di kemudian hari, perdagangan intra-ASEAN yang semakin terintegrasi akan meningkatkan kegiatan industri intra-ASEAN (intra-regional production networks) di mana produksi parts, komponen dan intermediate goods lainnya yang kini tersebar di seluruh negara ASEAN dapat dirakit pula di ASEAN untuk menghasilkan barang jadi (Ng dan Yeats, 1999)²⁶

ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION (APEC)

Sejarah APEC

Secara harfiah, APEC merupakan singkatan dari Asia Pacific Economic Cooperation, yaitu wadah kerja sama bangsa-bangsa di kawasan Asia Pasific di bidang ekonomi. APEC resmi terbentuk pada bulan Nopember 1989 di Canberra, Australia. Pembentukan forum ini merupakan usulan

²⁵ R. Winantyo, Rahmat Dwi Saputra, Sri Fitriani, Rita Morena, Aswin Kosotali, Gunwan Saichu, Usmanti Rohmadyan, Sholihh, Aditya Rachmanto, dan Dadan Gandara. Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. (Jakarta : PT elex Media Komputindo, 2008), hal.103.

²⁶ Ibid, hal. 104

mantan Perdana Menteri Australia, Bob Hawke, yang merupakan kelanjutan dari berbagai usulan dan upaya untuk mengadakan kerja sama ekonomi regional Asia Pasific. Ada dua faktor yang dominan yang mendorong lahirnya APEC yaitu:

1. Adanya kekhawatiran akan gagalnya perundingan putaran Uruguay yang dapat berakibat meningkatnya proteksionisme dan munculnya kelompok-kelompok perdagangan seperti Pasar Tunggal Eropa dan Pasar Bebas Amerika Utara.
2. Perubahan besar di bidang politik dan ekonomi yang sedang terjadi dan berlangsung di Uni Soviet dan Eropa Timur.

Dua faktor inilah yang melatarbelakangi kelahiran APEC, suatu forum kerja sama internasional yang dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi di kawasan Asia Pasifik terutama di bidang perdagangan dan investasi.

Dinamika ekonomi politik Asia Pasifik pada akhir tahun 1993 tampak memasuki babak baru, terutama dalam bentuk pengorganisasian kerja sama perdagangan dan investasi regional.

Dalam hal ini, negara-negara Asia Pasifik berbeda dengan negara-negara di Eropa Barat. Negara-negara di Eropa Barat memulainya dengan membentuk wadah kerja sama regional.

Dengan organisasi itu, ekonomi di setiap negara saling berhubungan dan menghasilkan ekonomi Eropa yang lebih kuat daripada sebelum Perang Dunia II. Sebaliknya, negara-negara Asia Pasifik, terutama sejak tahun 1970-an, saling berhubungan secara intensif dan menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi walaupun tanpa kerangka kerja sama formal seperti yang ada di Eropa.

Bahkan, berbagai transaksi ekonomi terjadi antarnegara yang kadang-kadang tidak memiliki hubungan diplomatik. Taiwan adalah contoh negara yang tidak diakui eksistensinya politiknya, tetapi menjadi rekanan aktif sebagian besar negara Asia Pasifik dalam kegiatan ekonomi. Sekarang dinamika ekonomi itu dianggap memerlukan wadah organisasi yang lebih formal.

Dunia usaha lebih dahulu merasakan adanya kebutuhan akan organisasi itu, seperti tercermin dalam pembentukan Pacific Basin Economic Council (PBEC) tahun 1969. Organisasi ini beranggotakan pebisnis dari semua negara Asia Pasifik, kecuali Korea Utara dan Kamboja. Organisasi PBEC aktif mendorong perdagangan dan investasi di wilayah Asia Pasifik, tetapi hanya melibatkan sektor swasta.

Pada tahun 1980 muncul Pacific Economic Cooperation Council (PECC). Organisasi yang lahir di Canberra, Australia ini menciptakan kelompok kerja untuk mengidentifikasi kepentingan ekonomi regional, terutama perdagangan, sumber daya manusia, alih teknologi, energi, dan telekomunikasi.

Walaupun masih bersifat informal, PECC melibatkan para pejabat pemerintah, pelaku bisnis, dan akademis. Salah satu hasil kegiatan PECC adalah terbentuknya Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) sebagai wadah kerja sama bangsa-bangsa di kawasan Asia Pasifik di bidang ekonomi yang secara resmi terbentuk bulan November 1989 di Canberra, Australia pada tahun 1989.

Pembentukan APEC atas usulan Perdana Menteri Australia, Bob Hawke. Suatu hal yang melatarbelakangi terbentuknya APEC adalah perkembangan situasi politik dan ekonomi dunia pada waktu itu yang berubah secara cepat dengan munculnya kelompok-kelompok perdagangan seperti MEE, NAFTA dan AFTA.

Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya. Perdagangan bebas seperti yang dikatakan oleh Adam Smith, perdagangan sebagai kebijakan yang mampu meningkatkan kemakmuran nasional. Sedangkan menurut David Ricardo seorang tokoh aliran klasik menyatakan bahwa nilai penukaran ada jikalau barang tersebut memiliki kegunaan dengan demikian suatu barang dapat ditukarkan jika dapat digunakan. Selanjutnya David Ricardo juga membuat perbedaan antara barang yang dapat dibuat atau diperbanyak sesuai dengan kemauan orang, dilain pihak ada barang yang

sifatnya terbatas misalnya lukisan dari pelukis ternama, barang kuno dan sebagainya.²⁷

Semenjak tahun 1983 ekonomi Indonesia semakin merangkak naik. Terkait dengan persetujuan Presiden Suharto yang menyetujui forum APEC. Banyak yang memberi masukan diantaranya golongan pengusaha dan para teknokrat yang terus mendukung presiden

Suharto untuk menyetujui liberalisasi perdagangan 2015. Kemudian Indonesia lagi-lagi menjadi tuan Rumah APEC pada tanggal 5-7 Oktober 2013 lalu. Melihat apa yang digambarkan oleh Alison suatu proses dimana pemain-pemain seperti presiden, para menteri, penasehat, jenderal, anggota parlemen dan lainnya berusaha menetapkan tujuan, menilai berbagai alternatif sarana untuk menetapkan pilihan melalui suatu proses intelektual.²⁸

Selain itu perubahan besar terjadi di bidang politik dan ekonomi yang terjadi di Uni Soviet dan Eropa Timur. Hal ini diikuti dengan kekhawatiran gagalnya perundingan Putaran Uruguay (perdagangan bebas). Apabila masalah perdagangan bebas gagal disepakati, diduga akan memicu sikap proteksi dari setiap negara dan sangat menghambat perdagangan bebas. Oleh karena itu, APEC dianggap bisa menjadi langkah efektif untuk mengamankan kepentingan perdagangan negara-negara di kawasan Asia Pasifik.

Tujuan Pendirian Apec

Pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) I APEC di Canberra tahun 1989, telah disepakati bahwa APEC merupakan forum konsultasi yang longgar tanpa memberikan “Mandatory Consequences” kepada para anggota-nya. Dari kesepakatan yang diperoleh dalam pertemuan tersebut dapat disimpulkan bahwa APEC memiliki dua tujuan utama:

1. Mengupayakan terciptanya liberalisasi perdagangan dunia melalui pembentukan sistem perdagangan multilateral yang sesuai dengan kerangka GATT dalam rangka memajukan proses kerja

²⁷ Kanisius, 2005, *Kebudayaan, perdagangan, dan globalisasi*, Yogyakarta: (anggota IKAPI) hal 159

²⁸ Mochtar masoed. “ilmu hubungan internasional disiplin dan metodologi. Jakarta : LP3ES, 1990. Hal 237.

sama ekonomi Asia Pasifik dan perampungan yang positif atas perundingan Putaran Uruguay.

2. Membangun kerja sama praktis dalam program-program kerja yang difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang menyangkut penyelenggaraan kajian-kajian ekonomi, liberalisasi perdagangan, investasi, alih teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia.

Sesuai kepentingannya, APEC telah mengembangkan suatu forum yang lebih besar substansinya dengan tujuan yang lebih tinggi, yaitu membangun masyarakat Asia Pasifik dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang merata melalui kerja sama perdagangan dan ekonomi. Pada pertemuan informal yang pertama para pemimpin APEC di Blake Island, Seattle, Amerika Serikat tahun 1993, ditetapkan suatu visi mengenai masyarakat ekonomi Asia Pasifik yang didasarkan pada semangat keterbukaan dan kemitraan; usaha kerja sama untuk menyelesaikan tantangan-tantangan dari perubahan-perubahan; pertukaran barang, jasa, investasi secara bebas; pertumbuhan ekonomi dan standar hidup serta pendidikan yang lebih baik, serta pertumbuhan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Keanggotaan Apec

Keanggotaan APEC meliputi kawasan Asia, kawasan Australia dan kawasan Amerika, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kawasan Asia : Indoensia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, singapura, Thailand, cina, jepang, korea, dan Taiwan.
2. Kawasan Australia : Australia, selandia baru, papua nugini.
3. Kawasan Amerika : Amerika serikat, kanada, Chili, dan Meksiko.
Selain itu juga

Keanggotaan APEC terbagi ke dalam beberapa tingkatan yakni sebagai berikut :

1. Pada awal pembentukkannya anggota APEC terdiri atas : Amerika Serikat
 - a. Australia
 - b. Brunei Darussalam
 - c. Filipina

- d. Indonesia
 - e. Thailand
2. Dalam perkembangannya anggota APEC terus bertambah. Pada pertemuan ke tiga APEC di Seoul, Korea Selatan Pada tahun 1991, anggota APEC bertambah 3 negara , yaitu :
 - a. Cina
 - b. Taiwan
 - c. Hongkong
 3. Pada pertemuan ke lima APEC di Blake Island Seattle, Amerika Serikat pada tahun 1993 masuk 3 negara lagi sebagai anggota baru APEC yaitu :
 - a. Chili
 - b. Meksiko
 - c. Papua Nugini
 4. Sedangkan pada pertemuan ke sepuluh di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 1998, anggota APEC bertambah 3 negara lagi, yaitu :
 - a. Peru
 - b. Rusia
 - c. Vietnam

Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan aktif dalam pembentukan APEC maupun pengembangan kerjasamanya. Keikutsertaan Indonesia dalam APEC sangat didorong oleh kepentingan Indonesia untuk mengantisipasi dan mempersiapkan diri dalam menghadapi perdagangan dunia yang bebas sekaligus mengamankan kepentingan nasional RI. Kontribusi Indonesia terbesar bagi APEC adalah disepakatinya komitmen bersama yang dikenal juga sebagai ‘Tujuan Bogor’ (*Bogor Goals*) yaitu liberalisasi perdagangan dan investasi secara penuh pada tahun 2010 untuk ekonomi yang sudah maju, dan tahun 2020 untuk ekonomi berkembang. Komitmen ini menjadi dasar dalam berbagai inisiatif untuk mendorong percepatan penghapusan tarif perdagangan maupun investasi antar anggota APEC.

Ruang Lingkup Apec

APEC menggunakan tiga pilar utama sebagai kunci pencapaian tujuannya;

1. Liberalisasi Perdagangan dan Investasi

Liberalisasi Perdagangan dan Investasi dimaksudkan untuk mengurangi dan apabila memungkinkan menghapuskan hambatan tariff dan non tariff. Upaya tersebut difokuskan pada pembukaan pasar untuk meningkatkan perdagangan dan investasi.

2. Fasilitasi bisnis

Fasilitasi bisnis memfokuskan kegiatan pada upaya untuk mengurangi biaya transaksi, meningkatkan akses pada informasi perdagangan, memaksimalkan manfaat dari teknologi informasi dan menyesuaikan kebijakan dan strategi bisnis untuk mendorong pertumbuhan dan mencapai keterbukaan perdagangan dan investasi.

3. Kerjasama Ekonomi dan Teknik

ECOTECH memberikan kesempatan pada anggota ekonomi APEC untuk meningkatkan kapasitasnya melalui pelatihan dan kerjasama sehingga mampu menarik manfaat dari perdagangan dunia dan ekonomi baru (new economy). Hasil dari ketiga pilar tersebut akan memperkuat ekonomi anggota APEC melalui pemanfaatan maksimal sumber daya dan meningkatkan efisiensi.

Rangkaian Pertemuan Para Pemimpin Apec

1. **Blake Island**, 20 November 1993

Dengan tuan rumah Presiden Amerika Serikat Bill Clinton, para Pemimpin APEC mengadakan Pertemuan Informal untuk pertama kalinya di Blake Island, Seattle, Washington. Pada pertemuan tersebut disepakati bahwa Visi APEC adalah :

- a. Memanfaatkan kekuatan dari keberagaman ekonomi negara anggota memperkuat kerja sama dalam rangka meningkatkan kemak-muran;
- b. Membangun semangat keter-bukaan dan kemitraan yang mendalam;

- c. Mencapai pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan berkelanjutan;
- d. Berperan serta dalam memperkuat perekonomian dunia;
- e. Mendorong terciptanya sistem perdagangan internasional yang terbuka;
- f. Mengurangi hambatan perdagangan dan investasi;
- g. Memanfaatkan kemajuan di bidang telekomunikasi dan transportasi;
- h. Melindungi kualitas udara, air, dan kawasan hijau;
- i. Mengatur dan memperbaharui sumber-sumber energi untuk memberikan rasa aman pada masa yang akan datang.

2. **Bogor**, 15 November 1994

Pada Pertemuan Para Pemimpin APEC kedua ini yang menjadi pokok bahasan adalah arah ekonomi APEC pada 25 tahun mendatang. Dalam deklarasi mereka yang dikenal dengan “Declaration of Common Resolve” , Para Pemimpin ekonomi menyetujui untuk menentukan sasaran mengenai waktu perdagangan dan investasi bebas di wilayah APEC, yakni:

- a. Tahun 2010 bagi anggota ekonomi maju (industrialized economies);
- b. Tahun 2020 bagi anggota ekonomi yang sedang berkembang (developing economies).

Selanjutnya APEC akan memberikan kesempatan bagi anggota ekonomi yang sedang berkembang untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonominya secara berkesinambungan dan pembangunan yang merata dalam rangka menjaga kestabilan perekonomiannya.

3. **Osaka**, 19 November 1995

Pada pertemuan ketiga di Osaka, Jepang, Para Pemimpin APEC mulai menterjemahkan Visi Blake Island and Declaration of Common Resolve/ Bogor dalam suatu cetak biru untuk melaksanakan komitmen mereka atas perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka, fasilitasi bisnis, dan kerja sama ekonomi serta kerjasama

teknik antar anggota. Agenda pembahasan yang dikenal dengan Aksi Osaka terdiri dari dua bagian pokok yaitu:

- a. Bagian pertama, menyangkut masalah liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan investasi,
- b. Bagian kedua, menyangkut kerja sama ekonomi dan teknik di bidang energi dan transportasi, infrastruktur, usaha kecil dan menengah, dan teknologi pertanian.

Untuk mewujudkan pelaksanaan Agenda Aksi Osaka ini telah ditetapkan Rekening Khusus untuk pembiayaan proyek-proyek yang mendukung agenda tersebut.

4. **Manila**, 25 November 1996

Pertemuan keempat Para Pemimpin APEC telah menghasilkan suatu rencana aksi yang dikenal dengan nama Manila Action Plan for APEC atau MAPA, di antaranya Rencana Aksi Individual (RAI) dan Rencana Aksi Kolektif (RAK). Dalam pertemuan ini dilaporkan kemajuan atas kegiatan bersama para anggota APEC untuk mencapai sasaran Deklarasi Bogor mengenai perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka di wilayah APEC pada tahun 2010 dan 2020; serta kegiatan bersama di antara para anggota sesuai dengan bagian kedua dari Agenda Aksi Osaka. MAPA menyerukan enam tema untuk Aksi tersebut, yaitu :

- a. Peningkatan akses pada pasar barang;
- b. Peningkatan akses pada pasar jasa,
- c. Sistem investasi yang terbuka,
- d. Penurunan biaya usaha,
- e. Sektor infrastruktur yang terbuka dan efisien,
- f. Peningkatan kerja sama ekonomi dan teknik.

Dalam rangka kerja sama ekonomi dan teknik ditetapkan enam bidang kerja sama, yaitu:

- a. Pengembangan sumber daya manusia,
- b. Pengembangan pasar modal yang aman dan efisien,
- c. Upaya memperkuat infrastruktur ekonomi,

- d. Pemanfaatan teknologi masa depan,
 - e. Peningkatan pertumbuhan yang berkesinambungan,
 - f. Pertumbuhan usaha kecil dan menengah.
5. **Vancouver**, November 1997
- Dalam Pertemuan kelima Para Pemimpin APEC, Para Pemimpin menegaskan kembali komitmen dan keinginan mereka atas usaha untuk mengembangkan Rencana Aksi Individu (RAI) dan memperbaiki Rencana Aksi tersebut setiap tahun. Para Pemimpin APEC mengesahkan kesepakatan para menteri APEC yang menyatakan bahwa Aksi Individu tersebut akan dilaksanakan sejalan dengan liberalisasi sektoral sukarela yang dipercepat (Early Voluntary Sectoral Liberalization atau disingkat EVSL) pada 15 sektor dengan ketentuan akan diajukan pada tahun 1998, dan dilaksanakan mulai tahun 1999. Para Pemimpin APEC yakin bahwa partisipasi penuh dan aktif dari para anggota ekonomi dalam mendukung WTO merupakan kunci pokok bagi kemampuan APEC untuk melanjutkan dan memperkuat sistem perdagangan global. Para Pemimpin juga menyambut baik kemajuan forum-forum APEC dalam melibatkan dunia usaha, para akademisi dan ahli, kelompok wanita dan pemuda dalam kegiatan pada tahun 1997, serta mendorong mereka untuk melanjutkan usaha-usaha tersebut.
6. **Kuala Lumpur**, November 1998
- Pertemuan keenam ini menitikberatkan pada strengthening the Foundation for Growth. Para Pemimpin APEC menegaskan keyakinannya atas fundamental ekonomi yang kuat dan prospek pulihnya ekonomi Asia Pasifik. Mereka menyetujui untuk mengejar suatu strategi pertumbuhan secara bersama guna mengakhiri krisis keuangan. Mereka menjanjikan usaha-usaha memperkuat jaring pengaman sosial, sistem keuangan, arus perdagangan dan investasi, penerapan ilmu dan teknologi, pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur ekonomi, dan keterkaitan antara usaha dan perdagangan sehingga memberikan dasar dan penetapan langkah untuk menuju pertumbuhan yang berkesinambungan pada abad 21. Pada Pertemuan tersebut disetujui pula mengenai Kuala Lumpur Action Program on Skills Development yang bertujuan

untuk mendukung terciptanya pertumbuhan yang berkesinambungan serta merata, yaitu dengan mengurangi disparitas ekonomi dan mengembangkan kehidupan sosial masyarakat melalui pengembangan keahlian/kecakapan.

7. **New Zealand**, 12-13 September 1999

Fokus utama pertemuan ketujuh Para Pemimpin APEC adalah untuk merespon krisis keuangan Asia 1997, menanamkan kembali kekuatan pertumbuhan dan investasi di wilayah APEC dengan mendorong liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan investasi, serta memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Pada pertemuan New Zealand ini ada tiga pokok tema yang dibahas, yaitu :

- a. Liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan investasi, usaha memperkuat pasar,
- b. Upaya mengembangkan dukungan terhadap APEC.

8. **Brunei Darussalam**, 15-16 November 2000

Pada tanggal 15-16 November 2000, Para Pemimpin APEC mengadakan pertemuan ke-8 di Bandar Seri Begawan. Ada 3 subtema yang dibahas pada pertemuan tersebut, yaitu : Building Stronger Foundations, Creating New Opportunities, dan Making APEC Matter More. Pembahasan tersebut menekankan pada kelanjutan usaha penguatan pasar, pemanfaatan revolusi teknologi, dan peningkatan hubungan dengan masyarakat APEC secara luas. Subtema-subtema tersebut dirancang untuk mengakomodasi 3 bidang yang merupakan prioritas utama bagi kegiatan APEC tahun 2000, yakni : Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Sumber Daya Manusia (SDM), dan Teknologi Informasi (TI).

Sekretariat Apec

Sekretariat APEC dibentuk pada tahun 1993. Para pegawai Sekretariat APEC terdiri atas 21 pejabat dari seluruh negara anggota ekonomi dan beberapa orang staf lokal. Sekretariat APEC dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif dengan masa tugas satu tahun dan berasal dari negara anggota ekonomi yang sedang menjadi ketua APEC.

1. Sekretariat APEC berfungsi untuk:
 - a. Menunjang mekanisme kegiatan APEC.
 - b. Menyediakan “advisory” teknis untuk koordinasi pembinaan bidang perdagangan.
 - c. Mengenalkan dan menginformasikan peranan APEC kepada masyarakat dunia.

- a. Prinsip Umum Kerjasama Apec
 - 1). Menyeluruh (comprehensiveness): yaitu mencakup semua hambatan terhadap sistem perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka.
 - 2). Konsisten WTO (WTO-consistency): yaitu langkah liberalisasi dan fasilitasi konsisten dengan WTO.
 - 3). Kesebandingan (comparability): yaitu mewujudkan kesebandingan langkah liberalisasi dan fasilitasi yang ditempuh anggota.
 - 4). Tidak memihak (non-discrimination): yaitu hasil liberalisasi dan fasilitasi dinikmati oleh anggota maupun non-anggota APEC.
 - 5). Transparan (transparency): yaitu menjamin transparansi peraturan agar terwujud iklim usaha yang pasti.
 - 6). Standstill: yaitu menahan untuk tidak menerapkan kebijakan yang menambah tingkat proteksi.
 - 7). Simultaneous start, Continuous Process & Differentiated Timetable: yaitu proses liberalisasi dan fasilitasi dimulai segera, berkesinambungan dan tetap memperhatikan tingkat pembangunan masing-masing anggota.
 - 8). Fleksibel (flexibility): yaitu fleksibilitas dimungkinkan untuk menghadapi isu yang muncul dari perbedaan tingkat pembangunan masing-masing anggota.
 - 9). Kerjasama (cooperation): yaitu kerjasama ekonomi dan teknik yang mendukung liberalisasi dan fasilitasi akan ditempuh secara aktif.

b. Manfaat Apec Bagi Indonesia

- 1). APEC merupakan forum yang fleksibel untuk membahas isu-isu ekonomi internasional.
- 2). APEC merupakan forum konsolidasi menuju era perdagangan terbuka dan sejalandengan prinsip perdagangan multilateral.
- 3). Peningkatan peran swasta dan masyarakat Indonesia menuju liberalisasi perdagangan.
- 4). Salah satu pilar APEC yaitu fasilitasi perdagangan dan investasi secara langsung akan memberikan dampak positif bagi dunia usaha di Indonesia yakni kemudahan arus barang dan jasa dari Indonesia ke anggota APEC lainnya. Beberapa inisiatif APEC yang memberikan manfaat kepada dunia usaha di Indonesia antara lain melalui pelaksanaan *APEC Business Travel Card* (ABTC) serta penyederhanaan prosedur kepabeanan.
- 5). Peningkatan Human and Capacity Building.
- 6). Indonesia dapat memanfaatkan proyek-proyek APEC untuk peningkatan kapasitas dan peningkatan sumber daya manusia, baik yang disponsori oleh anggota ekonomi tertentu maupun melalui skema APEC.
- 7). Sumber peningkatan potensi ekonomi perdagangan dan investasi Indonesia. Pembentukan APEC telah memberikan manfaat terhadap peningkatan arus barang, jasa maupun pertumbuhan ekonomi negara anggota APEC. Indonesia memiliki potensi untuk memanfaatkan potensi pasar APEC bagi peningkatan ekspor maupun arus investasi, khususnya karena mitra dagang utama Indonesia sebagian besar berasal dari kawasan APEC.
- 8). APEC sebagai forum untuk bertukar pengalaman
- 9). Forum APEC yang pada umumnya berbentuk "*policy dialogue*" memiliki manfaat yang sangat besar terutama untuk menarik pelajaran dan pengalaman positif maupun negatif (*best practices*) anggota APEC lainnya dalam

hal pengambilandan pembuatan kebijakan liberalisasi perdagangan dan investasi.

- 10). Memproyeksikan kepentingan-kepentingan Indonesia dalam konteks ekonomiinternasional
- 11). APEC merupakan salah satu forum yang memungkinkan Indonesia untukmemproyeksikan kepentingan-kepentingannya dan mengamankan posisinya dalam tata hubungan ekonomi internasional yang bebas dan terbuka.

KEBIJAKAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI (INTERNASIONAL)

Pengertian Kebijakan Perdagangan Luar Negeri (Internasional)

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama, penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.

Kebijakan perdagangan internasional adalah kebijakan yang mencakup tindakan pemerintah terhadap rekening yang sedang berjalan (*current account*) daripada neraca pembayaran internasional, khususnya tentang ekspor dan impor barang. Kebijakan Perdagangan Internasional bisa disebut juga sebagai kebijakan yang dilakukan suatu negara yang berupa tindakan ataupun peraturan yang mempengaruhi baik langsung ataupun tidak langsung terhadap struktur, komposisi dan arah perdagangan internasional dari ke negara tersebut serta rangkaian tindakan yang akan diambil untuk mengatasi kesulitan atau masalah hubungan perdagangan internasional guna melindungi kepentingan nasional.

Kebijakan perdagangan internasional timbul karena meluasnya jaringan-jaringan hubungan ekonomi antar negara. Jadi, kebijakan perdagangan internasional adalah segala tindakan pemerintah/negara,

baik langsung maupun tidak langsung untuk memengaruhi komposisi, arah, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Adapun kebijakan yang dimaksud dapat berupa tarif, dumping, kuota, larangan impor, dan berbagai kebijakan lainnya.

Setiap negara mempunyai kebijakan - kebijakan tersendiri untuk melindungi perekonomian dalam negeri mereka dari dampak negatif persaingan yang ditimbulkan dalam perdagangan internasional. Perdagangan internasional memungkinkan masuknya barang - barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri.

Jika barang dan jasa dari luar negeri lebih banyak dan lebih diminati oleh masyarakat dibandingkan produk dalam negeri, maka hal itu akan berdampak buruk bagi perekonomian dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat suatu kebijakan perdagangan internasional.

Perbedaan Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Konvensional Dan Islam

Dalam permasalahan perdagangan, baik perdagangan domestik maupun internasional, Islam menjadikan pedagang sebagai asas yang akan dijadikan titik perhatian dalam kajian maupun hukum-hukum perdagangannya. Status hukum komoditi yang diperdagangkan akan mengikuti status hukum pedagangnya. Hukum dagang/jual-beli adalah hukum terhadap kepemilikan harta, bukan hukum terhadap harta yang dimilikinya. Dengan kata lain, hukum dagang/jual-beli adalah hukum untuk penjual dan pembeli, bukan untuk harta yang dijual atau yang dibeli.

Allah Swt. berfirman: Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba (QS al-Baqarah : 275). Maknanya adalah, Allah telah menghalalkan jual-beli untuk manusia dan melarang adanya riba dalam setiap transaksi. Rasulullah saw. juga bersabda: *“Dua orang orang yang berjual-beli boleh memilih (akan meneruskan jual-beli mereka atau tidak) selama keduanya belum berpisah (dari tempat aqad)”*. (HR al-Bukhari dan Muslim).

Dalam perdagangan internasional, Islam telah memberikan ketentuan terhadap penetapan tarif, baik untuk ekspor maupun impor, yang biasa dikenal dengan bea cukai. Menurut hukum Islam, bea

cukai haram diambil untuk pedagang warga negara terhadap komoditi apapun. Adapun pedagang warga negara asing diperlakukan sesuai dengan yang telah dikenakan terhadap pedagang warga Negara Islam ketika memasuki negara asing tersebut. Jika pedagang warga Negara Islam memasukkan barang dagangan dikenakan tarif bea masuk sebesar 10% (misalnya), maka bagi pedagang asing yang masuk ke negara Islam juga dikenakan 10%. Tarif bea masuk 10% diberlakukan sebagai balasan terhadap apa yang telah diperlakukan terhadap pedagang warga Negara Islam di negara asing tersebut.

Perbandingan konsep perdagangan luar negeri dilakukan dengan menganalisis persamaan dan perbedaannya. Persamaan konsep perdagangan luar negeri antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalisme adalah pada karakter ideologi keduanya yang sama-sama bersifat menyeluruh, global mendunia. Adapun perbedaannya yaitu kemas dengan istilah perdagangan luar negeri, kapitalisme mengemas dengan istilah pasar bebas, dimana pasar bebas kapitalisme itu sesungguhnya merupakan bagian dari politik luar negeri negara yang menganut ideologi tersebut sebagai bentuk metode menyebarkan ideologinya yaitu berupa penjajahan gaya baru. Sementara perdagangan luar negeri negara Islam berbeda dengan perdagangan bebas dalam seluruh aspeknya, apakah itu dalam aspek peran dan posisi negara, asas terjadinya perdagangan, komoditi yang diperdagangkan, bea cukai, termasuk status pedagangnya. Dalam aspek - aspek itulah perbandingan konsep perdagangan luar negeri ini dijelaskan berikut:

1. Posisi dan Peran Negara

Islam memandang perdagangan luar negeri sebagai aktifitas jual beli, sehingga akan memberi sanksi terhadap yang melanggarnya, sebagaimana aktifitas-aktifitas muamalah lainnya, seperti ijarah, pernikahan dan sebagainya. Dalam pandangan Islam, negara di dunia ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu *daarul Islam* dan *daarul harby*. Menurut Islam, posisi negara dalam perdagangan luar negeri sangat urgen, yaitu menjalankan fungsi supervisi secara umum.

Sementara menurut sistem ekonomi pasar bebas, peran Negara diletakkan dalam peran pelengkap saja, mengingat doktrin yang diungkapkan oleh Smith di Eropa pada abad 18 (*Adam Smith, The*

Wealth of Nations, 1776) *laissez faire* yang artinya meminimalisasi peran Negara. Doktrin ini muncul dan tenggelam oleh Teori Keynes yang menganjurkan campur tangan pemerintah setelah depresi besar sebelum Perang Dunia II tahun 1930-an. Namun, perlu disadari, bahwa perdagangan bebas yang dipelopori oleh AS sejak akhir abad 20 melalui berbagai pertemuan ekonomi seperti APEC dan rencana penerapannya secara total dari berbagai negara di dunia yang diawali pada rentang tahun 2010-2020 adalah strategi AS untuk mengawasi perekonomian dunia dengan cara memberi kekuasaan penuh kepada WTO untuk mengatur perdagangan dunia dan meminimalkan peranan masing-masing Negara.

2. Asas Terjadinya Perdagangan

Menurut Islam, aktivitas perdagangan itu terjadi antar dua pedagang tertentu terhadap komoditi tertentu, bukan hanya komoditi yang diperdagangkan, tanpa memandang dari pedagang yang memiliki komoditi tersebut. Berdasarkan realitas aktivitas perdagangan ini, maka asas dalam perdagangan adalah pedagang bukan komoditi. Sebab aktivitas perdagangan itu tidak akan terjadi kecuali dengan adanya dua pedagang, baik komoditinya ada ditempat atau tidak, sudah diproduksi atau belum, sudah tersedia atau masih diusahakan. Berdasarkan realitas ini, maka perdagangan itu dilakukan oleh dua pihak, sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Penjual dan pembeli merupakan asas dalam mengkaji perdagangan dan bukan komoditi yang dimiliki penjual yang hendak dimiliki pembeli.

Adapun menurut para penganut sistem kapitalis, mereka menjadikan komoditi sebagai asas dalam mengkaji perdagangan luar negeri. Oleh karena itu, mereka melakukan kajian perdagangan berdasarkan pada asal komoditi, bukan pada pemilik komoditi. Hubungan perdagangan antar negara dibangun berdasarkan asal komoditi, yakni menjadikan komoditi sebagai asas perdagangan untuk perdagangan luar negeri.

3. Komoditi Yang Diperdagangkan

Komoditi dalam perdagangan merupakan unsur utama, karena memang dalam perdagangan komoditilah yang menjadi obyek pelaku para pedagang, sekalipun dalam pandangan Islam bukan

sebagai asas perdagangan. Dalam pandangan Islam, hukum asal komoditi mengikuti hukum pedagangnya, artinya: negara percaya terhadap warga negaranya yang melakukan perdagangan. Dari sisi kepemilikan barang, maka komoditi yang diperdagangkan adalah komoditi yang masuk dalam kategori kepemilikan individu, bukan komoditi milik umum, juga bukan milik negara. Karena barang kepemilikan umum dan kepemilikan negara dikelola oleh negara untuk kesejahteraan warga negara. Disamping itu ada beberapa komoditi yang dilarang diperdagangkan berdasarkan nash-nash syara', seperti minuman keras (*khamer*), ganja, opium dan sebagainya. Dalam pandangan Islam, barang-barang tersebut dan yang sejenisnya, tidak dianggap sebagai komoditi ekonomi.

Sementara menurut pandangan kapitalisme, karena komoditi menjadi asas dalam perdagangan maka komoditi apapun bisa diperdagangkan. Tidak peduli milik umum maupun milik negara asalkan mendatangkan untung yang besar maka bebas diperjual belikan.

4. Bea Cukai

Bea cukai (*excise tax*) tidak diambil dari warga negara Islam atas komoditi impor atau ekspor. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir, bahwa dia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: "*Tidak akan masuk surga, orang yang memungut bea cukai (excise tak).*" (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Hakim dari Ukhab bin Amir). Dari Abil Khair, dia berkata: aku mendengar Ruwaifi' bin Tsabit bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda: "*Sesungguhnya orang-orang yang memungut bea cukai (excise tak) itu berada dalam neraka.*" (HR. Ahmad dari Ruwaifi' bin Tsabit al-Anshari).

Sedangkan terhadap selain warga daulah Islam, yakni pedagang-pedagan asing maka dikenakan atas mereka sebagaimana mereka mengenakan atas pedagang-pedagang kita, baik mereka orang-orang muslim, atau non muslim. Hanya saja, memungut bea cukai dari orang asing itu hukumnya mubah, tidak wajib. Negara boleh membebaskan mereka dari berbagai pungutan (pajak), atau dari pajak atas komoditi tertentu. Itu semua dilakukan menurut ada tidaknya kemaslahatan bagi kaum muslimin. Mengingat memungut

bea cukai dari orang asing itu hukumnya mubah, bukan wajib.

Sementara dalam pandangan pasar bebas kapitalisme, bea cukai mulai dibebaskan sejak munculnya organisasi-organisasi perdagangan dunia seperti WTO, GATT, OPEC, APEC dan lain-lain untuk negara-negara anggotanya.

5. Status Pedagang

Dalam pandangan Islam, status pedagang menjadi penentu dari status komoditi yang diperdagangkan. Sehingga dalam perdagangan luar negeri diterapkan hukum kewarganegaraan pedagangnya. Pedagang dianggap sebagai rakyat suatu negara berdasarkan kewarganegaraannya, tidak berdasarkan agama. Maka ada pedagang berkewarganegaraan Islam dan ada pedagang asing, yaitu setiap pedagang yang tidak memiliki kewarganegaraan negara Islam, baik muslim maupun non muslim.

Pedagang yang termasuk warga negara, mereka berhak melakukan aktivitas perdagangan di luar negeri, sama seperti hak mereka untuk melakukan perdagangan di dalam negeri. Mereka berhak mengimpor komoditi yang diinginkannya dari negara mana pun yang mereka mau dan mereka berhak mengekspor komoditi apapun yang mereka mau ke negara mana pun yang mereka suka, tanpa ada sedikit pun ikatan atau persyaratan. Sebab firman Allah SWT. *“Dan Allah telah menghalalkan jual beli”* (QS. al-Baqarah: 275).

Adapun menurut kapitalisme, standar pedagang yang dibolehkan berdagang di luar negeri melakukan ekspor-impor adalah materi yang menjadi modal mereka maupun komoditinya. Semakin banyak modal pedagang tersebut maka kesempatan berdagang di luar negeri semakin besar karena bisa mendapatkan pasar luar negeri maupun bahan baku dari luar negeri.

Demikian tadi perbedaan konsep perdagangan luar negeri antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalisme. Memang Perdagangan luar negeri sistem ekonomi Islam seakan sama dengan perdagangan luar negeri sistem ekonomi Kapitalisme. Sebenarnya ia tidak sama dengan perdagangan bebas. Sebab perdagangan bebas

mengharuskan aktivitas perdagangan antar negara terjadi tanpa adanya ikatan (syarat) apa pun, tanpa menentukan tarif bea cukai dan tanpa ada penghalang bagi impor komoditi, artinya meniadakan sama sekali pengawasan negara terhadap perdagangan luar negeri (*foreign trading*). Sedang sistem perdagangan dalam Islam berbeda dengan sistem perdagangan bebas, sebab negara membuat ikatan-ikatan atau syarat-syarat atas perdagangan yang dilakukan dengan negara-negara lain sesuai dengan kemaslahatan yang diperoleh oleh kaum muslimin. Mengingat kebolehan perdagangan luar negeri itu hanyalah untuk warga negara, tidak untuk yang lain.

Legalitas perdagangan luar negeri kepada warga negara dengan tanpa adanya ikatan dan syarat, tidak dianggap sebagai perdagangan bebas, sebab negara melarang mengekspor dan mengimpor beberapa komoditi. Misalnya negara melarang mengekspor komoditi-komoditi yang jika di ekspor akan menyebabkan bahaya, seperti komoditi-komoditi strategis. Negara melarang mengimpor komoditi-komoditi yang menyebabkan musuh bertambah kuat. Negara juga melarang ekspor dan impor dengan negara yang secara *de facto* sedang berlangsung peperangan, apabila hal itu akan menambah kekuatan musuh, menolongnya, atau melepaskannya dari kesulitan. Disamping itu ada beberapa komoditi yang dilarang diperdagangkan berdasarkan nash-nash syara', seperti minuman keras (*khamer*), ganja, opium dan sebagainya. Dalam pandangan Islam, barang-barang tersebut dan yang sejenisnya, tidak dianggap sebagai komoditi ekonomi. Dengan demikian, sistem perdagangan dalam Islam bukan perdagangan bebas.

Macam – Macam Perdagangan Luar Negeri

Adapun macam - macam kebijakan perdagangan internasional yaitu kebijakan perdagangan bebas dan kebijakan perdagangan proteksionis.

1. Kebijakan Perdagangan Bebas.

Kebijakan perdagangan bebas adalah kebijakan perdagangan yang menginginkan adanya kebebasan dalam perdagangan, sehingga tidak ada rintangan yang menghalangi arus produk dari dan ke luar negeri. Kebijakan perdagangan ini berkembang seiring dengan

adanya arus globalisasi di mana antara negara satu dengan negara lain dalam kehidupannya lebih transparan tidak terbatas oleh batas-batas teritorial tiap-tiap negara. Karena perdagangan bebas ini tidak ada rintangan maka harga produk ditentukan oleh kekuatan pasar (permintaan dan penawaran) sesuai dengan hukum ekonomi. Manfaat dari perdagangan bebas menurut teori klasik adalah sebagai berikut:

- a. Dapat mendorong persaingan antarpengusaha, sehingga nantinya akan tercipta kualitas produk dengan dasar teknologi tinggi.
- b. Mendorong terjadinya efisiensi biaya (cost) sehingga mampu menghasilkan produk dengan harga yang mampu bersaing.
- c. Meningkatkan mobilitas modal, tenaga ahli dan investasi (faktor produksi) ke berbagai negara sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.
- d. Meningkatkan perolehan laba sehingga memungkinkan para pengusaha berinvestasi lebih luas.
- e. Konsumen dapat lebih bebas dalam menentukan variasi dan pilihan produk yang diinginkan.

Saat ini perdagangan bebas belum berlaku secara menyeluruh dan masih terbatas pada kawasan-kawasan tertentu saja karena masih adanya keterbatasan pada permasalahan kebijakan tarif, kuota, diskriminasi harga dan lain-lain, sehingga hanya berlaku bagi negara yang masih termasuk dalam kawasan tersebut. Contoh organisasi perdagangan bebas diantaranya adalah NAFTA (organisasi perdagangan bebas untuk negara di kawasan Amerika Utara), AFTA (organisasi perdagangan bebas untuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara) dan EFTA (Organisasi perdagangan bebas untuk negara-negara anggota masyarakat Uni Eropa).

2. Kebijakan Perdagangan Proteksionis

Kebijakan perdagangan proteksionis adalah kebijakan perdagangan yang melindungi produk-produk dalam negeri agar mampu bersaing dengan produk asing yang dilakukan dengan cara membuat berbagai rintangan/hambatan arus produksi dari dan ke luar negeri. Alasan

negara menganut kebijakan perdagangan proteksionis antara lain:

- a. Dari adanya perdagangan bebas, yang diuntungkan adalah negara-negara maju saja, karena merek memiliki modal dan teknologi yang maju. Selain itu harga jual produk dari negara-negara maju dinilai terlalu tinggi dibanding dengan harga bahan baku yang dihasilkan oleh negara-negara berkembang.
- b. Untuk melindungi industri dalam negeri yang baru tumbuh.
- c. Untuk membuka lapangan kerja. Dengan adanya proteksi maka industri dalam negeri dapat tetap hidup dengan demikian akan mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
- d. Untuk menyetatkan neraca pembayaran. Upaya kebijakan proteksi melalui peningkatan ekspor produksi dalam negeri akan mampu mengurangi defisit neraca pembayaran.
- e. Untuk meningkatkan penerimaan negara. Dengan cara mengenakan tarif tertentu pada produk impor dan ekspor sehingga negara dapat meningkatkan penerimaan.

Adapun macam-macam kebijakan perdagangan proteksionis antara lain:

- a. Kouta Impor

Kebijakan yang menetapkan batas jumlah barang yang boleh diimpor dengan tujuan untuk melindungi produsen dan produk dalam negeri.

- b. Kouta ekspor

Kebijakan dengan menetapkan batas jumlah barang yang diekspor dengan tujuan untuk menjamin persediaan barang tersebut guna memenuhi kebutuhan dalam negeri.

- c. Subsidi

Kebijakan dengan cara memberikan tunjangan kepada perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang untuk keperluan ekspor, sehingga harga barang tersebut bisa bersaing dengan barang luar negeri. Kebijakan subsidi biasanya diberikan untuk menurunkan biaya produksi barang domestik, sehingga diharapkan harga jual produk dapat lebih murah dan bersaing

di pasar internasional. Tujuan dari subsidi ekspor adalah untuk mendorong jumlah ekspor, karena eksportir dapat menawarkan harga yang lebih rendah. Harga jual dapat diturunkan sebesar subsidi tadi. Namun tindakan ini dianggap sebagai persaingan yang tidak jujur dan dapat menjurus ke arah perang subsidi.

d. Tarif Impor

Kebijakan dengan mengenakan tarif/bea impor yang tinggi terhadap barang yang datang dari luar negeri sehingga harga barang impor akan menjadi lebih mahal.

e. Tarif ekspor.

Kebijakan dengan mengenakan tarif atau bea terhadap barang yang diekspor dengan nilai yang lebih rendah dengan tujuan untuk merangsang kegiatan ekspor.

f. Premi

Kebijakan berupa pemberian hadiah atau penghargaan kepada perusahaan yang mampu memproduksi barang dengan kuantitas dan kualitas yang tinggi. Pemberian premi ini diharapkan dapat menghasilkan produk-produk yang berkualitas tinggi.

g. Diskriminasi harga

Kebijakan melalui penetapan harga produk secara berlainan dengan negara tertentu, yang dilakukan dalam rangka perang tarif agar negara tertentu yang dijadikan target mau menurunkan harga.

h. Larangan ekspor

Kebijakan larangan ekspor untuk mengekspor jenis barang-barang tertentu dilakukan dengan pertimbangan ekonomi, politik, sosial dan budaya dalam negeri.

i. Larangan Impor

Kebijakan melarang impor untuk barang-barang tertentu dilakukan dengan alasan untuk melindungi produk - produk dalam negeri atau dengan alasan untuk menghemat devisa. Dampak pelaksanaan kebijakan larangan impor:

- 1). Melindungi perusahaan dalam negeri dari kebangkrutan
- 2). Menghindari/mengurangi defisit neraca pembayaran

j. Dumping

Dumping merupakan kebijakan menjual barang ke luar negeri dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga penjualan didalam negeri. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memperluas dan menguasai pasar. Dumping ini bisa dilakukan jika terdapat aturan/hambatan yang jelas dan tegas sehingga konsumen di dalam negeri tidak mampu membeli barang yang didumping dari luar negeri.²⁹

3. Teori Perdagangan Luar Negeri

a. Merkantilisme

Terjadi sekitar abad ke 16 – abad 18 di Inggris, Perancis, Belanda, Spanyol. Negara harus melakukan ekspor sebesar – besarnya dan membatasi impor. Pendapat lain mengatakan bahwa ekspor yang lebih besar daripada impor selisihnya merupakan pemasukan logam mulia terutama emas. Semakin banyak emas yang dimiliki suatu negara maka semakin jaya negara tersebut.

b. Teori Keunggulan Absolut (Adam Smith)

Mengajukan perdagangan bebas bagi semua negara di dunia. Dengan demikian setiap negara dapat berspesialisasi dalam produksi komoditi yang memiliki keunggulan absolut, yaitu dapat memproduksi lebih efisien daripada negara – negara lain untuk di ekspor. Kemudian negara tersebut mengimpor barang yang kurang efisien diproduksi di negaranya daripada di negara lain. Adam smith menyarankan sistem perdagangan bebas.

c. Teori Keunggulan Komparatif (David Ricardo)

Meskipun suatu negara mengalami kerugian atau ketidakunggulan absolut dalam memproduksi kedua komoditi jika dibandingkan negara lain, tetapi masih bisa memproduksi dan mengekspor komoditi yang mempunyai kerugian absolut

²⁹ Amir, M.S., *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri* (Jakarta : PPM, 2000)Hal 3

lebih kecil dan mengimpor komoditi yang mempunyai kerugian absolut lebih besar.³⁰

Keuntungan Dan Penyebab Timbulnya Perdagangan Luar Negeri

Keuntungan yang dapat diperoleh dari perdagangan luar negeri adalah :

1. Tidak semua negara mempunyai alat-alat produksi dan kondisi-kondisi ekonomi yang sama, baik kuantitas maupun kualitas sehingga hal tersebut menyebabkan biaya produksi yang tidak sama antara negara satu dengan negara lainnya. Oleh karena itu, bagi satu negara lebih menguntungkan impor daripada perdagangan di dalam negeri.
2. Adanya faktor scarcity atau faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara yang memiliki faktor-faktor produksi yang berlebihan bisa memproduksi dengan biaya yang rendah kemudian mengekspor ke luar negeri.

Kondisi – kondisi penyebab timbulnya perdagangan internasional adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan faktor-faktor pemberian alam.
2. Perbedaan faktor-faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara.
3. Perbedaan citarasa dari konsumen masing – masing negara.
4. Perbedaan penguasaan teknologi.
5. Perbedaan harga faktor produksi.³¹

Tujuan Perdagangan Luar Negeri

Tujuan perdagangan internasional dalam Islam adalah supaya tercipta kemaslahatan diantara umat manusia dan menjadi salah satu bentuk tolong menolong. Supaya tercapai kemaslahatan tersebut bagi umat manusia, Dr. Jaribah bin Ahmad Al Haritsi pengarang buku *Fikih ekonomi Umar bin Khattab* mengatakan bahwa agar hubungan ekonomi Internasional dapat merelisasikan kemanfaatan sebesar mungkin bagi

³⁰ Sasono, Herman Budi, *Manajemen Ekspor dan Perdagangan Internasional*, (Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2013) Hal 194

³¹ Ibid, Hal. 185

kaum muslimin dan menjauhkan mereka dari mudharat yang akan terjadi, maka hubungan tersebut harus memenuhi kaidah sebagai berikut:

1. Kehalalan barang dan jasa di tempat perdagangan.
2. Jika hubungan ekonomi internasional dapat merealisasikan kemaslahatan bagi kaum muslimin.
3. Jika wilayah Islam sebagai prioritas.
4. Pengaturan masuk dan menetapkan non muslim di bumi Islam.
5. Perjanjian perdagangan.
6. Negara Islam memiliki otoritas dalam pengaturan dan pengawasan hubungan ekonomi luar negeri.
7. Urusan kegiatan ekonomi harus dipimpin seorang muslim jika terdapat non muslim yang andil didalamnya.



DAFTAR PUSTAKA

<https://contohdanfungsi.blogspot.com/2013/03/unsur-unsur-sistem-ekonomi.html?m=1>

https://sarjanaekonomi.co.id/sistem-ekonomi-pengertian-fungsi-macam-ciri-tujuan-terlengkap/#Tujuan_Sistem_Ekonomi

<http://yuliarahma24.blogspot.com/2014/04/perekonomian-indonesia-sektor-moneter.html?m=1>

Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari teori menuju aplikasi*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010),

Yenni Samri Juliati Nasution, *Human Falah : Peranan Pasar Modal dalam Perekonomian Negara*, 2015,

Kanisius. 2005. *Kebudayaan, Perdagangan, dan Globalisasi*. Yogyakarta: (anggota IKAPI).

M.S, Amir. 2000. *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri* . Jakarta : PPM.

Masoed, Mochtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*. Jakarta : LP3ES.

Sasono, Herman Budi, *Manajemen Ekspor dan Perdagangan Internasional*,
Winantyo, R dkk. 2008. *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*. Jakarta : PT
elex Media Komputindo.